



LAPORAN

RAPAT KOORDINASI BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Barat dengan baik tepat pada waktunya.

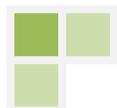
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu kami akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga akan lebih melengkapi laporan kegiatan ini.

Samarinda, Februari 2020

Ketua Panitia

Ir. Surono, M.Si

NIP. 19660119 199903 1 003



A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional.

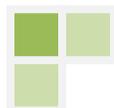
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Penggunaan dana APBD dan kucuran dana APBN digunakan ke desa. Semua dilakukan untuk membuat desa menjadi bagian penting dalam kesatuan negara republik Indonesia

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan dan 103 Kecamatan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019. Kondisi Desa di Kalimantan Timur yang masuk Kategori Mandiri sebanyak 11 Desa, kategori Maju sebanyak 107 Desa, Kategori Berkembang sebanyak 415 Desa, Kategori Desa Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa sangat Tertinggal jumlahnya yaitu 23 Desa.

Dengan 841 desa di Kalimantan Timur, tugas berat di bebankan pada semua stakeholder, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Khusus DPM-PD Kaltim, dengan 4 bidang yaitu bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan TTG, bidang pemerintahan desa dan kelurahan, bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Salah satu tahapan dalam pembangun Kalimantan Timur adalah komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

Rakor Bidang PMD dilaksanakan dengan tujuan secara umum untuk menguatkan koordinasi dan arus pelaporan yang berbasis data secara berjenjang bagi seluruh pelaku bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dan secara khusus, adalah untuk mengoptimalkan kapasitas kab/kota sehingga yang menjadi tugas pokok dan fungsinya bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.



Sebagai penutup, iijinkan kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pembicara/nara sumber. Kepada para peserta, rekan-rekan kab/kota yang berkenan meluangkan waktu dan hadir pada Rapat Koordinasi ini di sela-sela rutinitas pekerjaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini.

B. DASAR HUKUM

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :

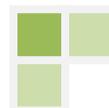
- a. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat Tahun 2020

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 bermaksud sebagai wadah Koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan kab/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tujuan :

- a. Penyamaan Persepsi terkait Permendagri no 90 tahun 2019
- b. Memberikan wawasan terkait rencana Bantuan Keuangan Kepada Desa
- c. Ekspos target sasaran RPJMD 2019 – 2023 provinsi kaltim
- d. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan Program data pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Mengevaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan rencana kerja 2021
- f. Mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan pemberdayaan



- masyarakat dan desa dalam rangka Pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- g. Menghasilkan berita acara hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2020

D. SASARAN KEGIATAN :

Sasaran Kegiatan ini adalah :

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa tahun 2020 ini : Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan

E. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang akan dicapai, melalui Rapat Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut:

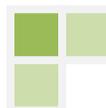
- a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi dan kab/kota terkait program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Updating dan pemutakhiran data terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Rekomendasi pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini kepada pemangku pimpinan.

F. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilaksanakan dengan metode talkshow dengan sesi sebagai berikut :

1. Pemaparan materi narasumber dari perangkat daerah terkait tingkat provinsi dengan metode talkshow yang dipandu oleh moderator
2. Pemaparan materi bidang teknis di lingkup DPMPD Prov. Secara panel dan dipandu oleh moderator

Berita acara kesepakatan yang dipandu oleh bidang teknis dan moderator



G. PELAKSANAAN KEGIATAN

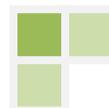
1. Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, di Hotel Novotel, Balikpapan.

2. jadwal

JADWAL RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020 Balikpapan, 10 Februari 2020

Hari/ Tanggal	Waktu	Materi	Moderator	Keterangan
Senin, 10 Februari 2020	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta dan Undangan	Panitia	
	08.30 - 09.30	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ▪ Pembacaan Doá ▪ Laporan Ketua Panitia ▪ Sambutan Plt. Seketaris Daerah Prov. Kaltim sekaligus membuka Acara 	Panitia	
	08.30 – 08.45	Coffe Break		
	08.45 – 12.15	Sesi I :		
		1. Bappeda Prov. Kaltim terkait Kebijakan Tahun 2021 terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) 2. BPKAD Prov. Kaltim dengan materi : Kebijakan terkait rencana Bantuan keuangan kepada Desa 3. DPMPD Prov. Kaltim (dengan materi terkait kebijakan Program DPMPD Kaltim tahun 2020 – 2021)	Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim	
	12.15 – 13.30	Ishoma		
		Sesi II :		
	13.30-13.45	1. Paparan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terkait Evaluasi Tahun 2019 dan Rencana di Tahun 2021	Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim
	13.45-14.00	2. Paparan Bidang Pembangunan Desa adan Kawasan Perdesaan		
	14.15-14.30	3. Paparan Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan & Sosbudmasy.		
	14.30 – 14.45	4, Paparan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG		
	14.45 – 15.00	Coffe Break		
	15.00- 16.30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi 		
	16.30- selesai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan Berita Acara Kesepakatan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan ▪ Penutup 		



3. Narasumber

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah :

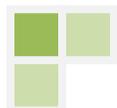
- Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim
- BPKAD Prov. Kaltim
- Bapeda Prov. Kaltim
- Kepala Bidang di lingkup DPMPD Prov. Kaltim

4. Peserta

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan

5. Pembiayaan

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

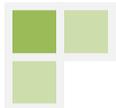


PENUTUP

Demikian Laporan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan untuk keperluan pelaporan, dan juga sebagai arsip bagi kantor sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan Rakor yang akan datang

Ketua Panitia

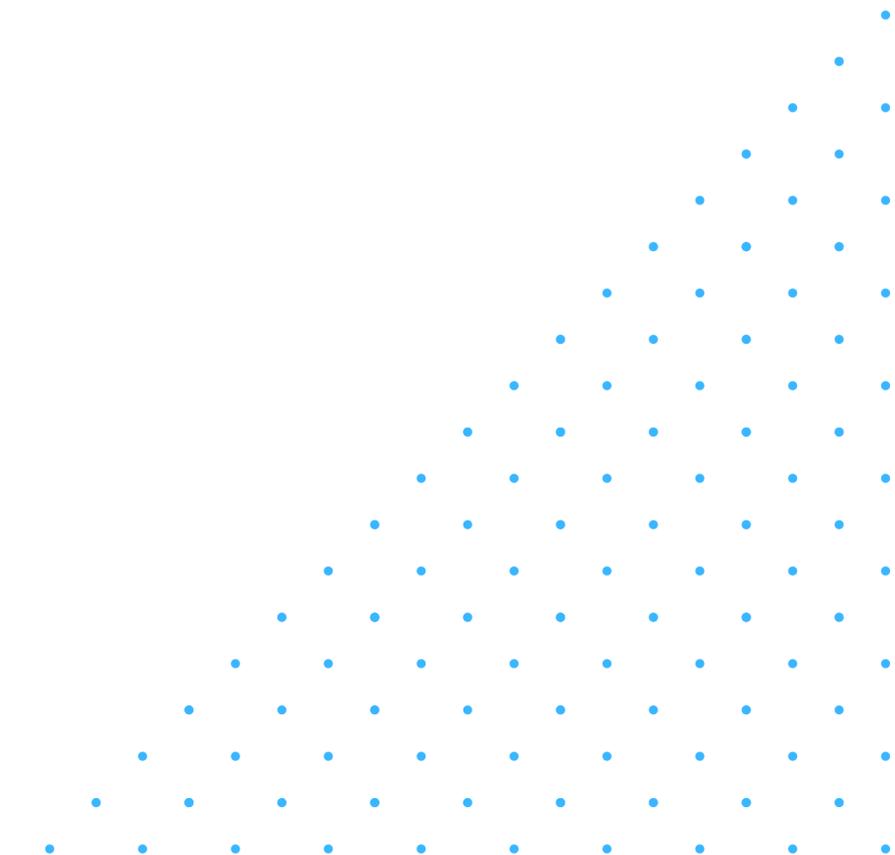
Ir. Surono, M.Si
NIP. 19660119 199903 1 003





LAMPIRAN

NOTA DINAS





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jl. M.T. Haryono No. 96/IV A ☎ (0541) 7779725 Fax. 7779726
SAMARINDA 75124

Nota Dinas

Kepada Yth. : Kepala Bidang/Sekretaris di Lingkup DPM-Pemdes Prov. Kaltim
Tembusan : Kepala DPM-Pemdes Prov. Kaltim (sebagai laporan)
Dari : Sekretaris DPM-Pemdes Prov. Kaltim
Tanggal : 3 Februari 2020
Perihal : Materi Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Tahun 2020

=====

Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020, maka bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Hotel Novotel Balikpapan Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 2 Klandasan Ulu Kota Balikpapan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk menyiapkan bahan/materi paparan dengan kisi-kisi sebagaimana terlampir beserta jadwal tentatif.
3. Bahan/materi diharapkan dapat diserahkan ke Sub Bagian Perencanaan dalam bentuk **hard copy** dan **soft copy** paling lambat hari **Kamis, tanggal 6 Februari 2020**.
4. Konfirmasi lanjut dapat menghubungi Sub Bagian Perencanaan Program.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Sekretaris,

Ir. Surono, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196601191999031003



NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Kalimantan Timur
Tanggal : 3 Februari 2020
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan sebagai agenda Kerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 Februari 2020
Pukul : 07.30 Wita – Selesai
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan
Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 2 Klandasan Ulu Kota Balikpapan
Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang diminta sebagai Pembicara pada diskusi panel sesuai tugas fungsi masing-masing. (*jadwal tentative terlampir*).
3. Saudara diharapkan hadir pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dimaksud.
4. Panitia hanya menanggung biaya konsumsi dalam kegiatan sedangkan biaya perjalanan akibat kegiatan tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing Bidang/Sekretariat.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

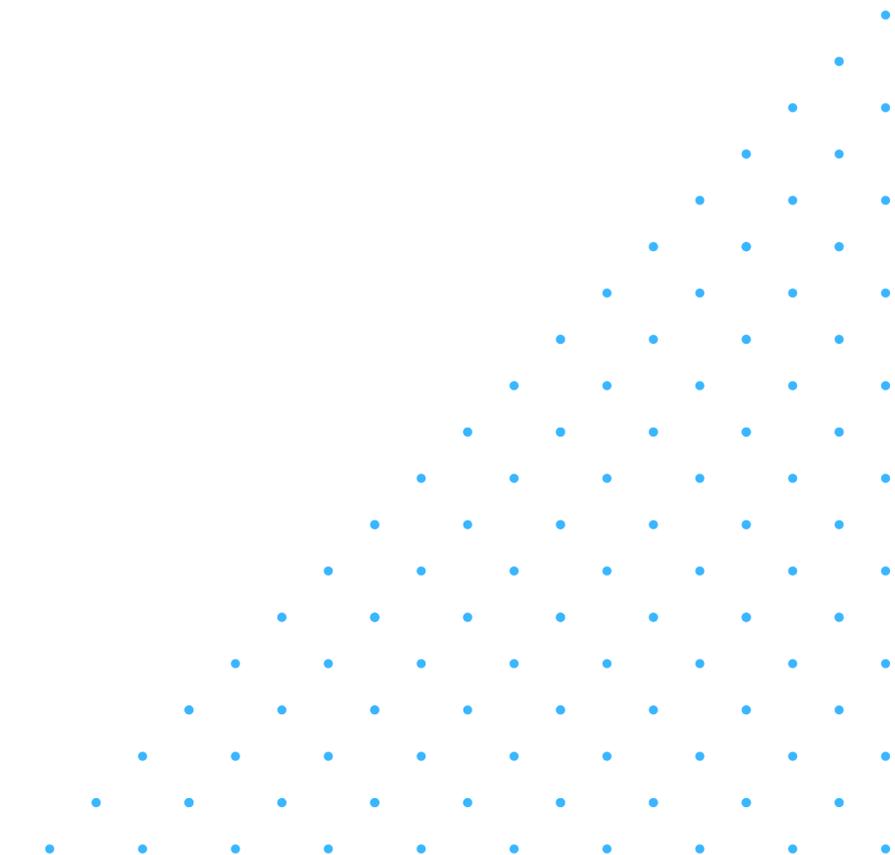
Kepala,

MOH. JAUHAR EFENDI
Pemula Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



LAMPIRAN

SURAT MENYURAT





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. M. T Haryono Samarinda No. 96/IV A ☎ (0541). 777925 Fax. 777926
SAMARINDA 75124

Samarinda, 6 Februari 2020

Nomor : 410/119 /DPMPD
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Mohon kesediaan menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020

Kepada

Yth Bapak Plt. Sekda Prov. Kaltim di-

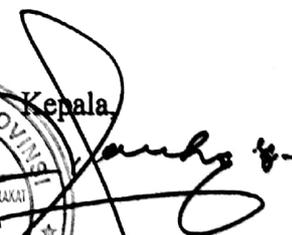
SAMARINDA

Dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Peserta Rakor terdiri dari jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten dan Kota se Kaltim.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan dimaksud pada :

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Pukul : 08.30 Wita – 09.30 Wita
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan
Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 2 Klandasan Ulu Kota
Balikpapan Kalimantan Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Kepala

Dr. Moh. Jauhar Efendi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. : (0541) 737762 - 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA - 75124

Nomor : 050/880 /DPMPD/Rengram
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020

Samarinda, 31 Januari 2020

Kepada Yth.

1. Kepala DPMPD Kabupaten/sebutan lain
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota / sebutan lain
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Se -

Kalimantan Timur

Dalam rangka Sinkronisasi dan Sinegritas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi Tahun 2020 diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Pukul : 07.30 Wita - Selesai
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan
Jl. Brigjen Ery Suparjan No. 2 Klandasan Ulu Kota
Balikpapan Kalimantan Timur.
2. Peserta Rapat dari Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur sebagaimana *daftar terlampir*.
3. Bahan yang disiapkan peserta Dinas/Bagian yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota dan disampaikan ke penyelenggara sebagai berikut, yaitu :
 - a. Struktur Organisasi dengan disertai nama-nama Pejabat structural.
 - b. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (APBD, APBN)
 - c. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 (APBD, APBN)
 - d. Renstra Dinas/Bagian yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Data Status Desa/IDM
4. Pakaian menyesuaikan hari kerja
5. Jadwal Tentative terlampir.

6. Biaya Transportasi PP, akomodasi dan uang saku ditanggung Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing, sedangkan biaya konsumsi selama Rapat Koordinasi ditanggung oleh penyelenggara.
7. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Cq. Sub Bagian Perencanaan Program, melalui contact Person Sdri. Nazly, S.Pi (Hp. 08125518267) dan Sdri. A. Aisyiah Lydia Fachriah, S.Sos, M.Si (Hp. 081254137900).

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Plt. ~~SEKRETARIS DAERAH~~ ~~PROVINSI KALIMANTAN~~ ~~PEREMINTAHAN DAN KESRA~~
SEKRETARIS DAERAH
8
~~MOH. NUR HAR EFENDI, M.Si~~
Kabina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim

DAFTAR LAMPIRAN
UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PEMBERTDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu
8. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Bontang.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kota Samarinda.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Kota Balikpapan
11. Sekretaris DPMPD Kabupaten / sebutan lain Se Kalimantan Timur
12. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi di lingkup DPMPD Kabupaten / sebutan lain Se Kalimantan Timur
13. Kepala Bagian Pemerintahan dan Sub Bagian yang menangani Bagian Pemerintahan Setda Kota Se Kalimantan Timur
14. Pejabat Sekretariat DPMPD Kabupaten / sebutan lain (Kasubbag Perencanaan Program, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan) Se Kalimantan Timur
15. Konsultan Pendamping Wilayah Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. MT. Hariyono No. 96/IV. A Telp. : (0541) 7779726 Fax. : (0541) 7779725 Samarinda - 75124

Samarinda, 31 Januari 2020

Nomor : 050/104/Rengram
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rakor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Prov. Kaltim
Di -
Samarinda

Dalam rangka Sinkronisasi dan Sinegritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Februari 2020
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan Jl. Brigjen Ery Suparjan
No. 2 Klandasan Ulu Kota Balikpapan Kalimantan
Timur

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, dimohon kiranya Bapak dapat menugaskan 1 (satu) orang Pejabat untuk menjadi narasumber pada acara dimaksud, dengan materi **Kebijakan Tahun 2021 terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.** (*jadwal tentative terlampir*).

Biaya Perjalanan Dinas Narasumber akibat kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih


DR. MOH. JASJAR EFENDI, M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda (sebagai laporan)
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda (sebagai laporan)
3. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda (sebagai laporan)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. MT. Hariyono No. 96/IV. A Telp. : (0541) 7779726 Fax. : (0541) 7779725 Samarinda - 75124

Samarinda, 31 Januari 2020

Nomor : 050/103 /Rengram
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rakor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Prov. Kaltim
Di -
Samarinda

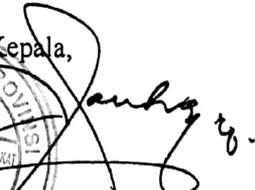
Dalam rangka Sinkronisasi dan Sinergitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Februari 2020
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan Jl. Brigjen Ery Suparjan
No. 2 Klandasan Ulu Kota Balikpapan Kalimantan
Timur

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, dimohon kiranya Bapak dapat menugaskan 1 (satu) orang Pejabat untuk menjadi narasumber pada acara dimaksud, dengan materi Kebijakan terkait rencana bantuan keuangan kepada Desa. (*jadwal tentative terlampir*).

Biaya Perjalanan Dinas Narasumber akibat kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala,

DR. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Perdana Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda (sebagai laporan)
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di – Samarinda (sebagai laporan)
3. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda (sebagai laporan)

JADWAL RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020

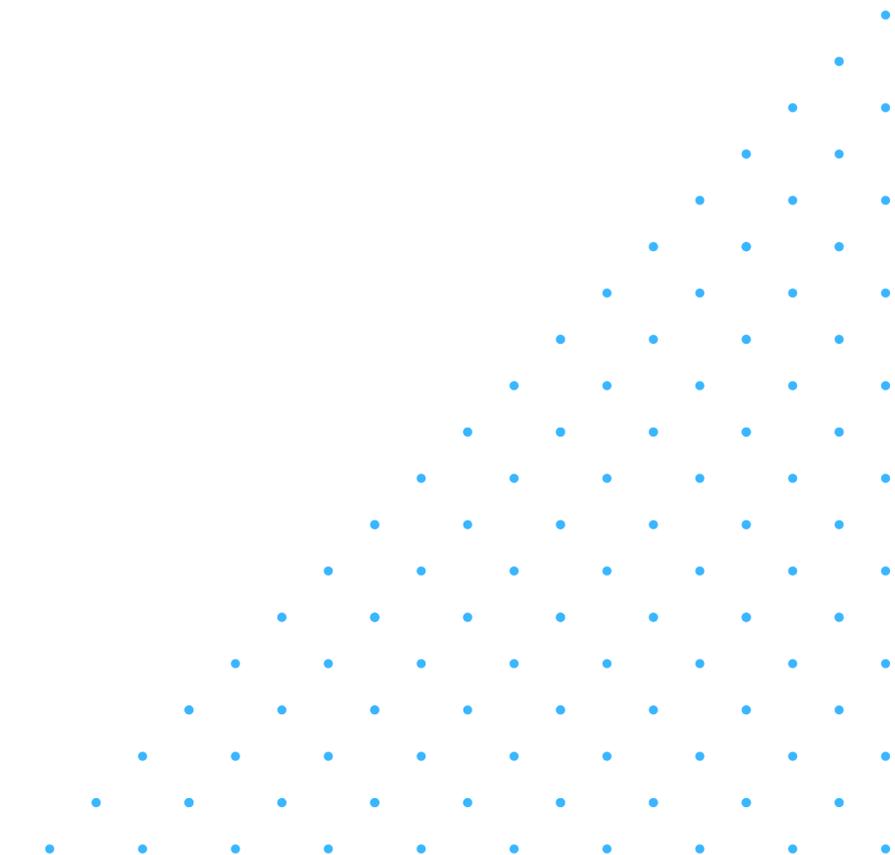
Balikpapan, 10 Februari 2020

Hari/ Tanggal	Waktu	Materi	Moderator	Keterangan
Senin, 10 Februari 2020	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta dan Undangan	Panitia	
	08.30 - 09.30	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya ▪ Pembacaan Doá ▪ Laporan Ketua Panitia ▪ Sambutan Plt. Seketaris Daerah Prov. Kaltim sekaligus membuka Acara 	Panitia	
	08.30 – 08.45	Coffe Break		
	08.45 – 12.15	Sesi I : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Prov. Kaltim terkait Kebijakan Tahun 2021 terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) 2. BPKAD Prov. Kaltim dengan materi : Kebijakan terkait rencana Bantuan keuangan kepada Desa 3. DPMPD Prov. Kaltim (dengan materi terkait kebijakan Program DPMPD Kaltim tahun 2020 – 2021) 	Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim	
	12.15 – 13.30	Ishoma		
		Sesi II :		
	13.30-13.45	1. Paparan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terkait Evaluasi Tahun 2019 dan Rencana di Tahun 2021	Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim
	13.45-14.00	2. Paparan Bidang Pembangunan Desa adan Kawasan Perdesaan		
	14.15-14.30	3. Paparan Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan & Sosbudmasy.		
	14.30 – 14.45	4, Paparan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG		
	14.45 – 15.00	Coffe Break		
	15.00- 16.30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi 		
	16.30- selesai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan Berita Acara Kesepakatan dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan ▪ Penutup 		



LAMPIRAN

SK PANITIA





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jalan MT. Haryono No. 96 (0541) 7779726 Fax. (0541) 7779725
SAMARINDA (75124)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/ 48 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan perlu diselenggarakan rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa agar penyelenggaraan rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berjalan dengan baik, lancar, terarah dan efektif, maka dipandang perlu membentuk panitia persiapan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai tugas dan fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam panitia Persiapan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
 8. Undang – Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no. 62 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Persiapan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- Pembagian tugas panitia persiapan Rakor
 - Membahas mekanisme pelaksanaan Rakor
 - Membahas dan menetapkan materi dari Narasumber Rakor
 - Menetapkan jadwal Rakor
 - Menyiapkan Administrasi kegiatan dengan baik dan benar.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA,



Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan :

- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/SK. /2020 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Sekretaris DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur

Bidang Sekretariat

1. Kasubbag Perencanaan Program
2. Andri Irawan, S.Sos
3. Rina Fernanda Handayani, SH
4. Rulisa Novianti S, A.Md

Bidang Persidangan

1. Kasubbag Keuangan
2. A. Aisyiah Lydia Fachriah, S.Sos, M.Si
3. Jakaria, SE
4. Farida Eriyani, SE

Bidang Dokumentasi dan Pelaporan

1. Fachroni, S.STP
2. Nur Muslich, S.Sos

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2020


Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jalan MT. Haryono No. 96 (0541) 7779726 Fax. (0541) 7779725
SAMARINDA (75124)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/ 46 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinegritas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa perlu diselenggarakan rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa agar penyelenggaraan rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berjalan dengan baik, lancar, terarah dan efektif, maka dipandang perlu membentuk panitia dan menunjuk narasumber dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai tugas dan fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam panitia kegiatan dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
 8. Undang – Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no. 62 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- Menyelenggara dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis.
 - Memfasilitasi berlangsungnya rapat koordinasi.
 - Menyusun laporan pertanggung jawaban rapat koordinasi dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan rapat koordinasi kepada pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA,

Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Perbina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan :

- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/SK. 46 /2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Kepala DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Sekretaris DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Sekretariat

1. Kasubbag Perencanaan Program
2. Staf Bagian Perencanaan Program

Bidang Persidangan

1. Kasubbag Umum
2. Staf Bagian Umum

Bidang Dokumentasi dan Pelaporan

1. Kasubbag Keuangan
2. Staf Bagian Keuangan

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2020

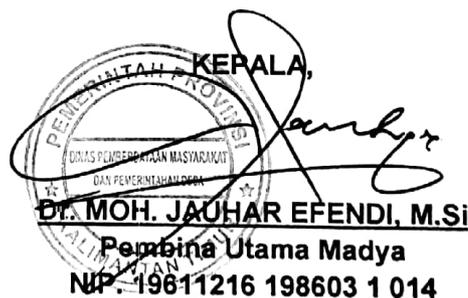

KEPALA,
[Handwritten Signature]
Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050/SK. AC /2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

Narasumber : 1. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

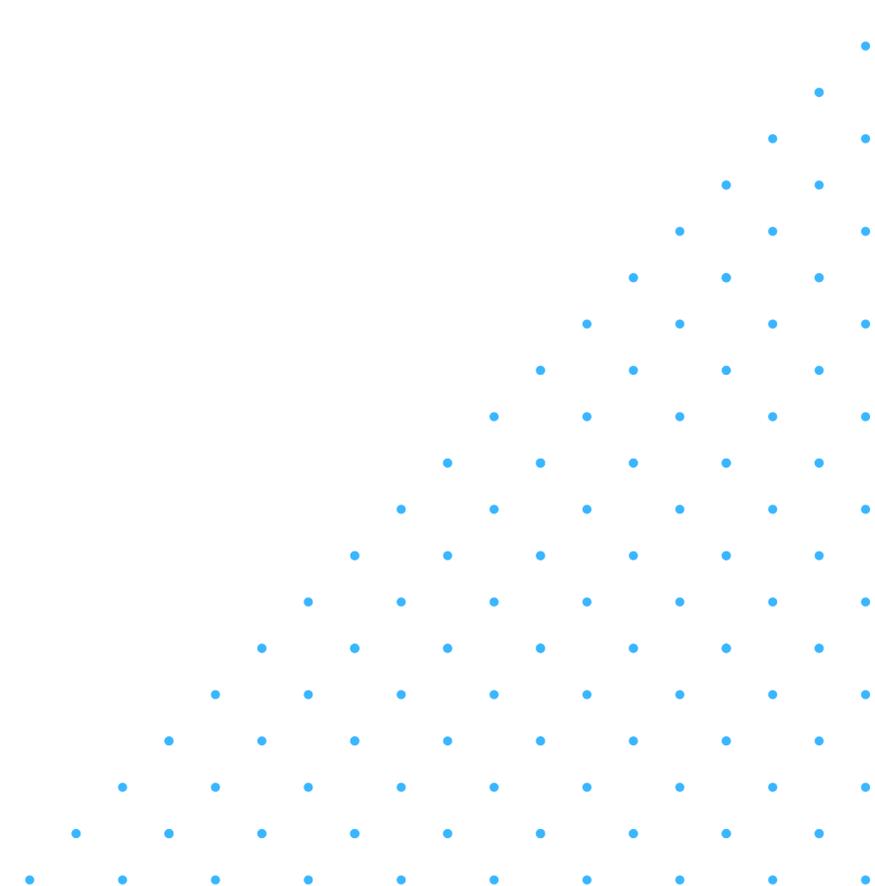
Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Januari 2020


KEPALA,
DR. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



LAMPIRAN

PANDUAN ACARA



PANDUAN



RAPAT RK KOORDINASI **2020**

*Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Laporan Ketua Panitia	02
Rakor 2020	06
Jadwal Kegiatan	13
Tata Tertib	16
Penutup	21

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan perkenannya maka Buku Panduan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 yang diselenggarakan di Balikpapan, Tanggal 10 Februari 2020, dapat tersusun dengan Baik. Buku ini secara umum menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor serta memberikan gambaran tentang petunjuk teknis setiap tahapan pelaksanaan Rakor.

Tema Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020, yang diselenggarakan pada tahun ini yaitu “

”. Semoga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat secara nyata merumuskan dan mengimplementasikan hasil-hasilnya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata kepada bangsa, selaras dengan tema yang diusungnya.

Balikpapan, 10 Februari 2020

TTD

Panitia Pelaksana

LAPORAN KETUA PANITIA RAKOR DPMPD 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

- Yang terhormat Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang menangani ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan Timur beserta jajarannya;
- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;

Hadirin yang berbahagia

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini sehubungan dengan dilaksanakannya Pembukaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020.

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 *ini dilaksanakan* dengan maksud sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara provinsi dan kab/kota se Kaltim ; serta untuk menilai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan

Pada akhirnya melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 diharapkan tercipta sinkronisasi program dan kegiatan serta percepatan pencapaian progress kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyamaan pemahaman dan persepsi.

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain

- a. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintahan No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

- e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat Tahun 2020

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 bertujuan:

- a. Koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan kab/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa
- b. Sinkronisasi data pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara provinsi dan kab/kota
- c. Menghasilkan rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk ke depan dapat selaras dengan visi misi Gubernur terpilih.
- d. Berbagi pengalaman antar provinsi dan kab/kota terkait pencapaian progress kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

- e. Pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa tahun 2020 ini :
DPMPD Kab/Kota se Kalimantan Timur

HASIL YANG AKAN DICAPAI

Hasil yang akan dicapai, melalui Rapat Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi dan kab/kota terkait program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Updating dan pemutakhiran data terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

- d. Rekomendasi pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini kepada pemangku pimpinan

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilangsungkan dengan Pemaparan materi, Diskusi /Dialog Interaktif antara panelis (narasumber) dengan para peserta Rapat Koordinasi dipandu moderator

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu dan Tempat

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, di Hotel Novotel, Balikpapan.

b. Narasumber

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah :

- Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim
- Sekretaris / Kepala Bidang di Lingkungan DPMPD Prov. Kaltim
- DDPI Kalimantan Timur

Peserta

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur DPMD/ DPMK 10 Kab/Kota se Kalimantan Timur kurang lebih berjumlah 100 orang.

PEMBIAYAAN

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

PENUTUP

Demikian Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat kami sampaikan, selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mohon perkenan dapat Memberikan Arahan sekaligus Membuka Acara secara Resmi.

Terima kasih.

SINERGITAS PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MENUJU KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

A. PENDAHULUAN

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan kegiatan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan program pembangunan perdesaan melalui beberapa pendekatan. Penggunaan dana APBD dan kucuran dana APBN digunakan ke desa. Semua dilakukan untuk membuat desa menjadi bagian penting dalam kesatuan negara republik Indonesia

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan dan 103 Kecamatan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019. Kondisi Desa di Kalimantan Timur yang masuk Kategori Mandiri sebanyak 11 Desa, kategori Maju sebanyak 107 Desa, Kategori Berkembang sebanyak 415 Desa,

Kategori Desa Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa sangat Tertinggal jumlahnya yaitu 23 Desa.

Dengan 841 desa di Kalimantan Timur, tugas berat di bebankan pada semua stakeholder, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Khusus DPM-PD Kaltim, dengan 4 bidang yaitu bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Bidang usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan TTG, bidang pemerintahan desa dan kelurahan, bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Salah satu tahapan dalam pembangun Kalimantan Timur adalah komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan melakukan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020

Rakor Bidang PMD dilaksanakan dengan tujuan secara umum untuk menguatkan koordinasi dan arus pelaporan yang berbasis data secara berjenjang bagi seluruh pelaku bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dan secara khusus, adalah untuk mengoptimalkan kapasitas kab/kota sehingga yang menjadi tugas pokok dan fungsinya bisa dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, iijinkan kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pembicara/nara sumber. Kepada para peserta, rekan-rekan kab/kota yang berkenan meluangkan waktu dan hadir pada Rapat Koordinasi ini di sela-sela rutinitas pekerjaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini.

B. TUJUAN

Tujuan

1. Koordinasi & konsolidasi antar provinsi dan kab/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemajuan/progress yang terjadi di kab/kota di tahun sebelumnya.
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pencapaian progress kegiatan pemberdayaan masyarakat dan rekomendasi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Melakukan sinkronisasi data pelaksanaan kegiatan per kab/kota (kelengkapan dan validitas data)
4. Berbagi pengalaman antar kab/kota didalam kegiatan pencapaian progress kegiatan pemberdayaan masyarakat agar memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama.

C. PENERIMA MANFAAT

Dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini, maka akan diperoleh manfaat internal bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yakni perkuatan koordinasi untuk peningkatan kinerja DPM-PD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Penerima manfaat lainnya adalah untuk eksternal, yaitu dengan terciptanya good governance di semua Badan Publik yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk terciptanya kesadaran kepada semua pihak untuk membangun desa, memnuju Kalimantan Timur Berdaulat.

D. OUT PUT

Output kegiatan ini berupa kegiatan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh DPMPD/DPMPK Kab/Kota, baik Kepala Dinas dan personel sub Bagian Perencanaan Program, yang diharapkan akan menghasilkan:

1. Solusi strategis atas permasalahan dan program yang ada di Provinsi Kalimantan Timur terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
2. Pembagian peran dan tugas kepada DPMPD/DPMPK Kab/Kota atas permasalahan dan kepentingan yang ada baik internal maupun eksternal.

E. OUT COME

Melalui *output* di atas diharapkan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini memiliki kontribusi dan dampak bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal Program/ Kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri, yang sesuai dengan visi Gubernur yaitu Kalimantan Timur Berdaulat.

F. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada:

Waktu : 10 Februari 2020
Tempat : Novotell Hotel Balikpapan,
Susunan Acara : Terlampir
Peserta : +/- 100 peserta, yang terdiri atas:

G. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Tabel: Rencana Jadwal Pelaksanaan Waktu Pencapaian Keluaran

No.	NAMA KEGIATAN	Bulan			
		Februari			
1	Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	■	■	■	■

H. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

RAPAT RK Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa **2020**

*Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020*

TATA TERTIB

Pasal 1

Waktu danTempat

- a. Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2020, di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
- b. Tempat Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dilaksanakan di Hotel Novotel, Balikpapan

Pasal 2

Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 3

Peserta

Peserta Rakornas Komisi Informasi adalah:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Peserta

Hak Peserta

- a. Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 berhak untuk mengikuti acara pembukaan acara-acara persidangan baik dalam pemberian materi seminar maupun dalam rapat-rapat pembahasan serta acara lainnya selama Rakor berlangsung;
- b. Peserta Rakornas berhak mengeluarkan pertanyaan, pendapat dan usul/saran pada setiap rapat;

Kewajiban Peserta

- a. Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata tertib ini;
- b. Setiap peserta wajib menghadiri acara pembukaan, rapat-rapat dan seminar sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini dengan penuh rasa tanggung jawab sejak tanggal 10 Februari 2020
- c. Setiap Peserta wajib menjaga ketertiban, kesopanan, kelancaran dan keamanan Rakornas;
- d. Setiap Peserta wajib mengisi absensi pada setiap kali mengikuti rapat-rapat;
- e. Setiap Peserta wajib menjaga kenyamanan antara sesama peserta;

Demikian Buku Panduan ini dibuat, yang berisikan secara umum tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 10 Februari 2020

Kami sadar bahwa didalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya. Kami berharap Buku Panduan ini dapat dijadikan sebagai panduan secara teknis setiap tahapan pelaksanaan Rakor, guna terselenggaranya Rakornasi Secara baik dan sukses.

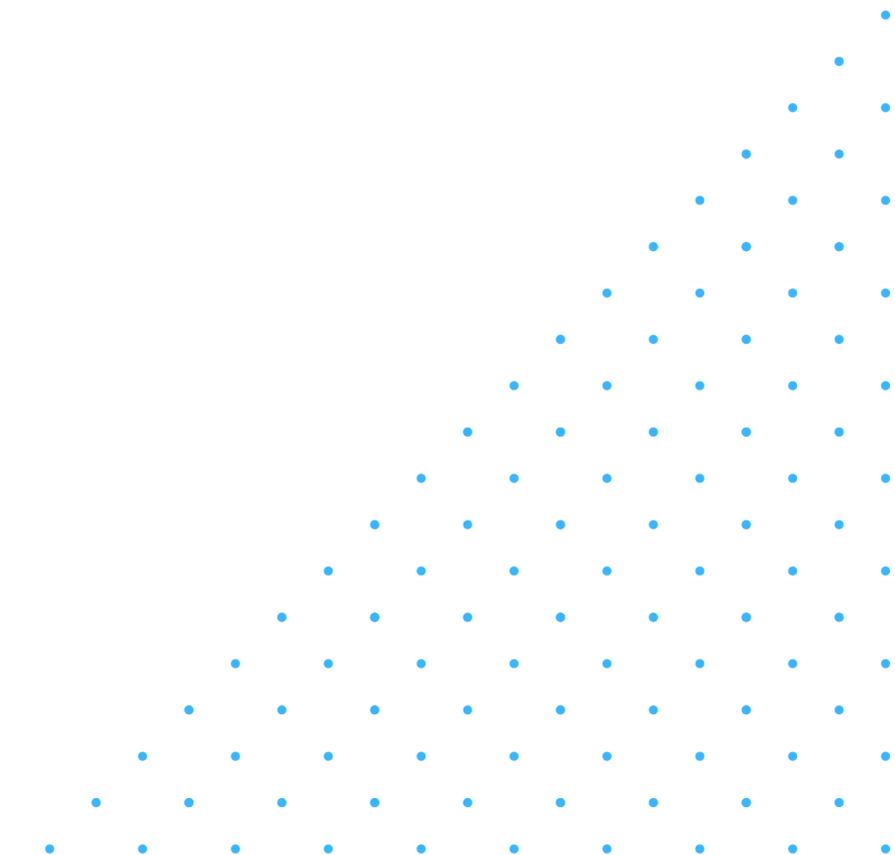
Jakarta, 10 Februari 2020

TTD



LAMPIRAN

LAPORAN KETUA PANITIA



**LAPORAN
PANITIA PELAKSANA
Pada Acara Pembukaan**

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020

Samarinda, 10 Februari 2020

~~~~~

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Salam Sejahtera untuk Kita Semua*

- Yang terhormat Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang menangani ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan Timur beserta jajarannya;
- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 
- 
- 
- 
- 

Hadirin yang berbahagia

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan ini sehubungan dengan dilaksanakannya Pembukaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020.

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 *ini dilaksanakan* dengan maksud sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara provinsi dan kab/kota se Kaltim ; serta untuk menilai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan

---

Pada akhirnya melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 diharapkan tercipta sinkronisasi program dan kegiatan serta percepatan pencapaian progress kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyamaan pemahaman dan persepsi.

Adapun Dasar Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- e. DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat Tahun 2020

## **I. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 bermaksud sebagai wadah Koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan kab/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa

### **Tujuan :**

- a. Penyamaan Persepsi terkait Permendagri no 90 tahun 2019
- b. Memberikan wawasan terkait rencana Bantuan Keuangan Kepada Desa
- c. Ekspos target sasaran RPJMD 2019 – 2023 provinsi kaltim
- d. Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan Program data pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Mengevaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan rencana kerja 2021

- 
- f. Mendiskusikan penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka Pengambilan kebijakan dan penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
  - g. Menghasilkan berita acara hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2020

#### **SASARAN KEGIATAN**

Sasaran Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa tahun 2020 ini : Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan

#### **HASIL YANG AKAN DICAPAI**

Hasil yang akan dicapai, melalui Rapat Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini adalah sebagai berikut:

- a. Optimalnya fungsi koordinasi antar provinsi dan kab/kota terkait program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Evaluasi progress pelaksanaan program/ kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Updating dan pemutakhiran data terkait dengan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Rekomendasi pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ini kepada pemangku pimpinan

---

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilangsungkan dengan metode talkshow dengan sesi sebagai berikut :

1. Pemaparan materi narasumber dari perangkat daerah terkait tingkat provinsi dengan metode talkshow yang dipandu oleh moderator
2. Pemaparan materi bidang teknis di lingkup DPMPD Prov. Secara panel dan dipandu oleh moderator
3. Berita acara kesepakatan yang dipandu oleh bidang teknis dan moderator

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **a. Waktu dan Tempat**

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, di Hotel Novotel, Balikpapan.

### **b. Narasumber**

Narasumber pada acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah :

- Kepala Dinas PMD Prov. Kaltim
- BPKAD
- Kepala Bidang di lingkup DPMPD Prov. Kaltim

### **Peserta**

Peserta acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini adalah aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota melalui perangkat daerah terkait yang menangani penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan masyarakat dan desa/ kelurahan

## **PEMBIAYAAN**

Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

---

## **PENUTUP**

Demikian Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat kami sampaikan, selanjutnya kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mohon perkenan dapat Memberikan Arahan sekaligus Membuka Acara secara Resmi.

Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

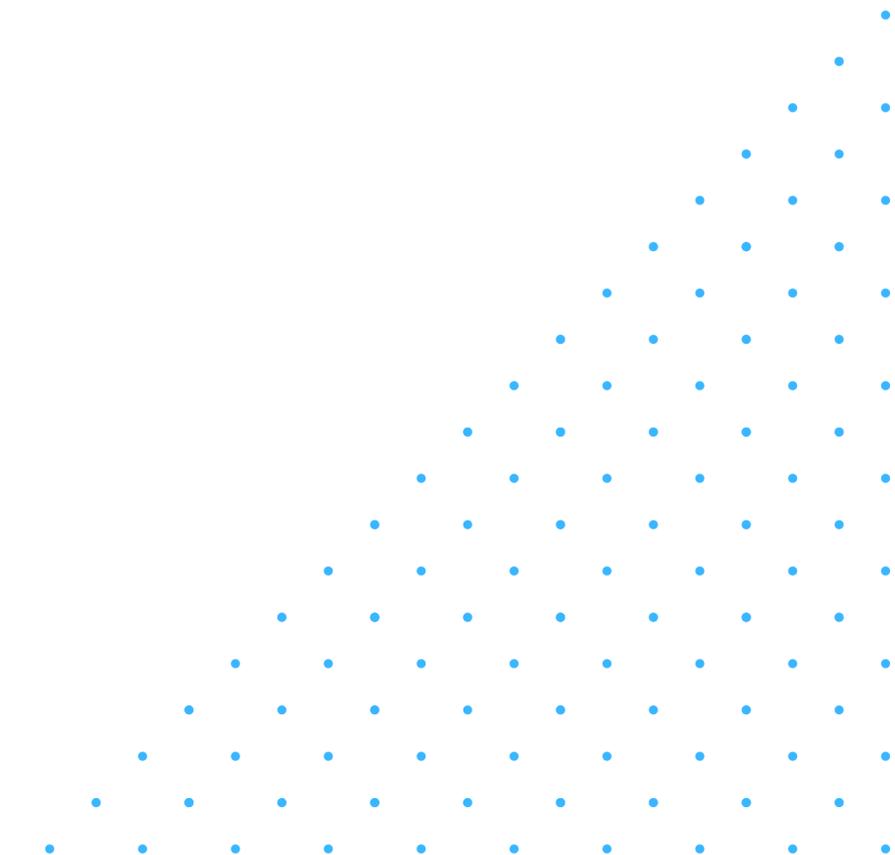
Samarinda, 10 Februari 2020  
Ketua Panitia Penyelenggara  
Sekretaris DPMPD Provinsi Kalimantan Timur

Ir. SURONO, M.Si



# LAMPIRAN

**SAMBUTAN GUBERNUR  
(DIWAKILI PLT. ASISTEN 1  
SETDA PROV. KALTIM )**





SAMBUTAN/ARAHAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PADA ACARA PEMBUKAAN

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa Tahun 2020

*Samarinda, 10 Februari 2020*

~~~~~

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

- Yang terhormat Kepala Dinas/ Bagian yang menangani ke-PMD-an Kab/Kota se Kalimantan Timur beserta jajarannya;
- Yang terhormat Sekretaris/ Kepala Bidang di Lingkungan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
- Hadirin yang berbahagia;

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam acara pembukaan “Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 “.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas diselenggarakannya “Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2020 “.

Melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan penyesuaian kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, pengambilan kebijakan mengenai permasalahan dihadapi sehingga dapat diberikan alternatif solusi pemecahan permasalahan dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Selain itu sebagai

upaya mewujudkan harmonisasi dan sinergitas, dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Hadirin yang Saya Hormati.

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan dan 103 Kecamatan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, Kondisi Desa di Kalimantan Timur yang masuk Kategori Mandiri sebanyak 11 Desa, kategori Maju sebanyak 107 Desa, Kategori Berkembang sebanyak 415 Desa, Kategori Desa Tertinggal sebanyak 285 Desa dan Kategori Desa sangat Tertinggal jumlahnya yaitu 23 Desa.

Dengan kondisi tersebut, diharapkan seluruh Pemangku Kepentingan dapat bekerja lebih maksimal lagi, khususnya dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk mewujudkan peningkatan Desa Mandiri, sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat Kalimantan Timur berdaulat

Hadirin yang Saya Hormati.

Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2018 – 2023 adalah “*Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat*”, visi ini bermaksud Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2018 – 2023 diberikan tugas yang cukup berat, yaitu pada misi 2 ke RPJMD 2018 – 2023 yaitu Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Ekonomi Kerakyatan yang berkeadilan, dengan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan target 150 desa dan pada tahun 2020 ini, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMD Dinas, menargetkan 25 desa untuk dapat meningkatkan status desanya.

Sebelumnya Di tahun 2019, dari 15 desa sasaran RPJMD, terelalisasi sebanyak 14 desa yang naik statusnya, dan di tahun 2020 ini, diharapkan kepada Kabupaten untuk bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa saling bahu

membahu membangun sintergitas dan koordinasi untuk dapat memenuhi target 25 desa di tahun ini.

Terkait juga dengan misi ke 2 RPJMD 2018- 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan menargetkan 360 BUMDes yang aktif selama periode 5 tahun dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendorong BUMDes di Kabupaten untuk dapat berkontribusi lebih kepada masyarakat. Kegiatan seperti Pelatihan Pengelolaan BUMdesa, Rapat Teknis BUMDesa, dan Rapat Teknis BUMDesa target pencapaian IDM dengan sasaran 30 BUMDesa.

Disamping itu berkaitan dengan misi ke 4 RPJMD 2018 – 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapat tugas untuk melaksanakan program kampung iklim, dengan target 40 desa. Sebagai pengantar, Program Kampung Iklim merupakan suatu program untuk memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif

masyarakat dalam melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Pelaksanaan program mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Di tahun 2020 ini, Program Kampung Iklim+ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan mulai dilaksanakan dengan menargetkan 20 Kampung/Desa/kelurahan dengan melakukan kegiatan awal berupa Sosialisasi terkait Program Kampung Iklim+ ini.

Hadirin yang Saya Hormati.

dalam kesempatan ini saya perlu mengingatkan kembali kepada seluruh pemangku kepentingan Perangkat Daerah Teknis dapat menyusun dan merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan khususnya berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa "*Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat*" sesuai RPJMD 2018 – 2023.

Dengan tekad dan komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera serta kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh komponen masyarakat, Insha Allah semua target dalam mewujudkan Visi Kaltim Kalimantan Timur Yang Berdaulat dapat tercapai dan masyarakat Kaltim yang sejahtera dan merata dapat segera terwujud.

Peserta Rapat Koordinasi dan Hadirin yang Berbahagia.

Dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Peserta atas kehadirannya, juga kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dan Narasumber yang telah meluangkan tenaga dan waktunya sehingga acara ini terlaksana dengan baik.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 ini, saya nyatakan resmi dibuka. Mudah mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat Ridlo dari Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

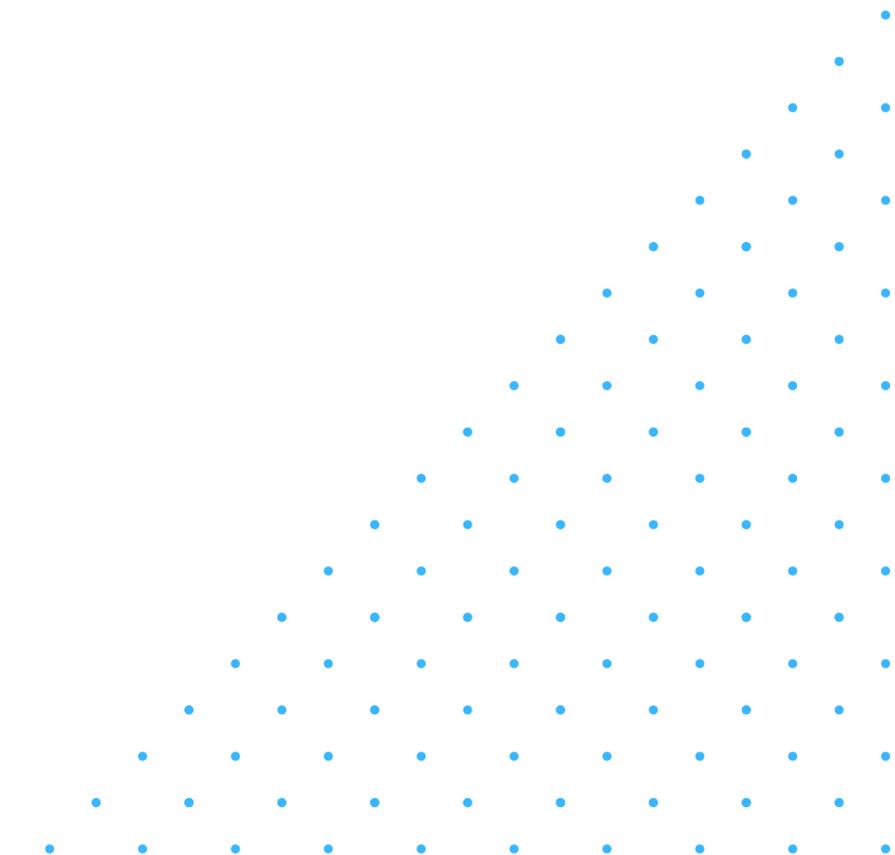
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Moh. Jauhar Efendi



LAMPIRAN

BIODATA NARASUMBER



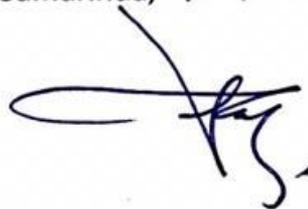
BIODATA NARASUMBER

PROGRAM KEGIATAN : RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA TINGKAT PROV.KALTIM TAHUN 2020

TANGGAL PELAKSANAAN : 10 FEBRUARI 2020

1. Nama Lengkap : H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM
2. Tempat Tanggal Lahir : 15 - Feb - 1968
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
5. Instansi : BPKAD
6. Jabatan : Kabid Anggaran
7. Alamat Kantor : Jl. Bajaj mada No.2 Samarinda.
8. Nomor Telpon / HP : 0811586404
9. Email : fahmi.keu@gmail.com

Samarinda, 10 Februari 2020



(.....)

BIODATA NARASUMBER

PROGRAM KEGIATAN : RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TINGKAT PROV.KALTIM TAHUN 2020

TANGGAL PELAKSANAAN : 10 FEBRUARI 2020

1. Nama Lengkap : H. Hariyo Santoso.
2. Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta / 10-07-1963.
3. Agama : Islam.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
5. Instansi : Bappeda Prop. Kaltim.
6. Jabatan : Kabid.
7. Alamat Kantor : Jl. Kesuma Bangsa No 2 Samarinda
8. Nomor Telpon / HP : 0812 5500376
9. Email :

Samarinda, 10 Februari 2020

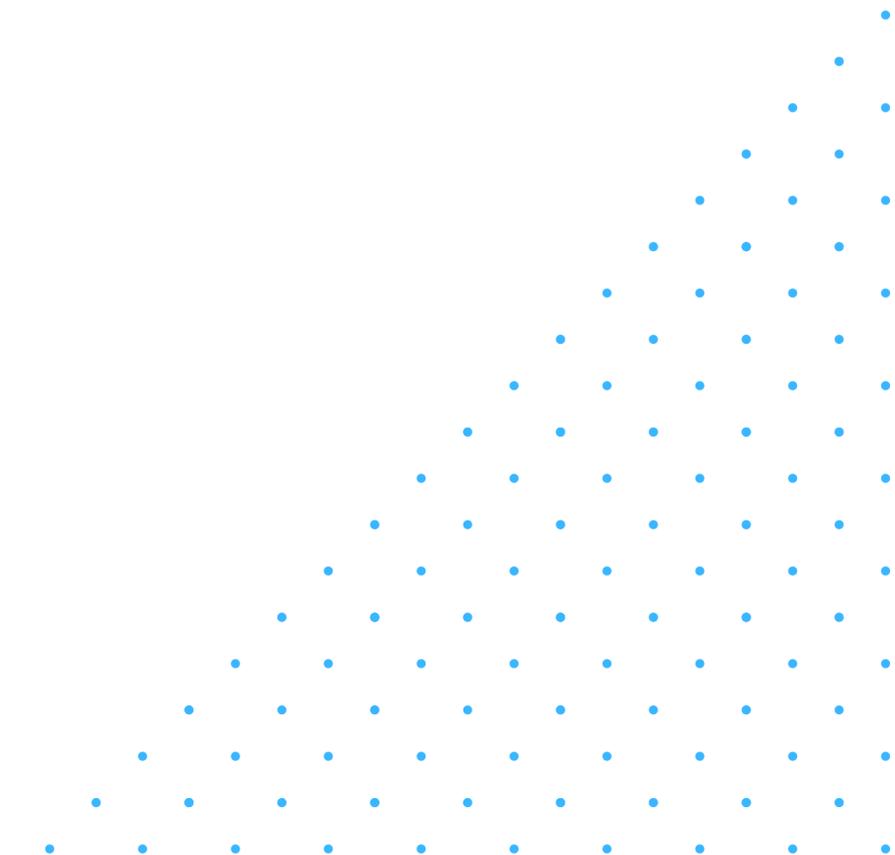


(.....)



LAMPIRAN

PAPARAN NARASUMBER



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PROGRAM/KEGIATAN BIDANG
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT**



HJ. ISNIANI TRIKORAWATI

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Disampaikan pada Rapat Teknis DPMPD SE KALTIM 2020

Latar Belakang



Visi Presiden RI 2019 – 2023 :
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi : Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul



Visi Gubernur Kaltim 2019 – 2023 :
Berani untuk Kaltim Yang Berdaulat.

Misi : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing



Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa.
2. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
3. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa
4. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa



Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

STRUKTUR BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT



**PROGRAM/KEGIATAN
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSBUDMASY
TAHUN 2020**



TUGAS POKOK dan FUNGSI BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSBUDMASY (PERGUB NOMOR 62 TAHUN 2016)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy;

Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy;

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy;

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy;

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

RENCANA AKSI BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TAHUN 2020

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatkan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan Yang
Berperan Aktif dalam
Pembangunan
Desa/Kelurahan

TARGET

35 LKD & LKA
3 MHA
150 Org/Kelompok

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA

Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa/Kelurahan Melalui Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Meningkatkan kualitas SDM perdesaan (*Community empowerment*), yaitu dengan Penyiapan SDM di Desa dengan kompetensi yang sesuai dengan tantangan yang ada

ISU – ISU STRATEGIS

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Misi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2023.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2019 – 2023.
3. Penataan Kelembagaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
4. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pendayagunaan Kader Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat Desa.
6. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Konvergensi Intervensi Percepatan Penurunan Stunting.
8. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat berdasarkan Permendagri No.42 Th 2005

PERMASALAHAN

1. Belum seluruhnya Kabupaten/Kota yang membuat Regulasi Tentang Penataan Kelembagaan Desa/Kelurahan sesuai Permandagri Nomor 18 Tahun 2018;
2. Belum adanya Kabupaten/Kota yang menyampaikan data Penataan Kelembagaan Desa/Kelurahan sesuai Permandagri Nomor 18 Tahun 2018;
3. Kurang optimalnya peran DPMD Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan penataan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
4. Lemahnya Pengakuan Hukum Tentang Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur;
5. Pemanfaatan Dana APBDesa masih berorientasi pada kegiatan Insfrastruktur;
6. Kurangnya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk melakukan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Lemahnya dukungan APBDesa/Kelurahan untuk kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Belum adanya Kabupaten/Kota membentuk Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat.

RENCANA KEGIATAN
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
DAN SOSBUDMASY
TAHUN ANGGARAN 2020

RATEK BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSBUDMASY

RATEK PENANGGULANGAN HIV AIDS

RATEK PEMBENTUKAN MHA

RATEK POKJANAL POSYANDU

RATEK POSYANDU

**PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI MASYARAKAT TENTANG
KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING**

PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

**PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG TEKNIK
FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN**

TARGET PESERTA RAPAT TEKNIS POKJANAL POSYANDU



***Total Peserta 30 Orang : DPMPD Prov, DPMPD
Kab/Kota, Anggota Pokjanal Posyandu***

Lokasi :

Samarinda (minggu II maret)

TARGET PESERTA RAPAT TEKNIS POSYANDU



Total Peserta 30 Orang : Bappeda Paser, DPMPD Paser, DPMPD Prov. Kaltim, Dinkes Paser, DKP3A Paser, Ketua Pokjanel Posyandu Paser, Kades lingkungan Paser

Lokasi :

Paser (minggu III maret)

TARGET PESERTA RAPAT TEKNIS KELEMBAGAAN



Total Peserta 30 Orang : DPMPD KAB/KOTA

Lokasi :

Samarinda (minggu III FEBRUARI)

**TARGET PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG TEKNIK
FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN**



Total Peserta 120 Orang : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/Kel)

Lokasi :

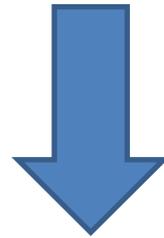
Samarinda (Kec. Palaran) Februari Minggu ke 3

Penajam Paser Utara (Kec. Sepaku) Maret Minggu ke 3

Kutai Kartanegara (Kec. Kota Bangun) Maret Minggu ke 2

Kutai Timur (Kec. Muara Wahau) Maret Minggu ke 1

TARGET PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI MASYARAKAT TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING



Total Peserta 150 Orang : Terdiri dari Perwakilan Apartur Desa, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan Masyarakat Umum

Lokasi :

Kutai Barat (Kec. Long Iram) Februari Minggu ke 3

Penajam Paser Utara (Kec. Babulu) Mei Minggu ke 1

Paser (Long Ikis) Mei Minggu ke 1

TARGET PESERTA PELATIHAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA



Total Peserta 80 Orang : Terdiri dari Kepala Desa, Kelompok Masyarakat dan Pelaku UMKM

Lokasi :

Mahakam Ulu (Kec. Data Bilang) Februari Minggu ke 3

Berau (Kec. Biduk - Biduk) Mei Minggu ke 2

Program Kegiatan Tahun 2020 Seksi Ketahanan dan Sosbudmasy						
Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Lokasi		
				Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 250.000.000,-	Ratek Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Maret 2020	Berau		
Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosbudmasy		Ratek HIV/AIDS	Maret 2020	Samarinda		
		Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan pada 5 MHA di Prov. Kaltim	3 Kabupaten (Paser, Berau, dan Kutai Timur)	Paser	Muara Komam	Swan Slutung (MHA Maluy)
					Muara Samu	Muara Andeh (MHA Paring Sumpit)
				Kutai Timur	Muara wahau	Nehas Liang Bing
				Berau	Sambaliung	Benua Baru
					Segah	Tepian Buah

PENUTUP

Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya merupakan kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi semata namun lebih dari itu merupakan kiprah mitra kerja DPMD baik yang berada di Kabupaten /kota, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerjasama.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu OPD tapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa perlu mendapat tambahan perhatian yang memadai baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

TERIMA KASIH

SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN



I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019.(1)

PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN AKAN DATANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Penilaian Posyandu	10 Kab/Kota	9 Kab/Kota	98%	Waktu pelaksanaan akhir tahun, keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi tentang indikator penilaian Posyandu, waktu pelaksanaan lomba mendekati akhir tahun, keterbatasan anggaran sehingga tidak melakukan verifikasi ke lapangan	Perlu Sosialisasi Indikator Lomba Posyandu , Perlu Alokasi Anggaran, Waktu Agar tidak diakhir tahun, Perlu Verifikasi lapangan

I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019.(2)

PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN AKAN DATANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Penilaian BBGRM	10 Kab/Kota	5 Kab/Kota	50%	Kurangnya sosialisasi tentang lomba BBGRM, Indikator lomba BBGRM belum diupdate, Lomba BBGRM Tk Nasional tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran kab/kota sehingga tidak bisa mengikuti lomba	Perlu Sosialisasi indikator Lomba BBGRM, Perlu Alokasi Anggaran, Perlu ditingkatkan SDM dalam pemahaman terkait penilaian lomba BBGRM
	Pencanangan BBGRM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		

I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019.(3)

PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN AKAN DATANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Pencegahan Stunting melalui posyandu	20 Lokus Stunting	4 Lokus Stunting	20%	Keterbatasan Anggaran untuk verifikasi data stunting, keterbatasan kemampuan kader pembangunan manusia dalam pendataan stunting, dana desa belum maksimal dialokasikan untuk pencegahan stunting, kurang maksimalnya perhatian kades terhadap KPM dan kasus stunting	Kader Pembangunan stunting perlu ditingkatkan kapasitasnya, Kades agar memperhatikan posyandu dan Kader KPM, perlu honor KPM stunting dialokasikan Dana Desa, Alokasi Anggaran pencegahan stunting

II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019) (1)

KODEFIKASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET (RENSTRA)	PAGU ANGGARAN (Rp) BERDASARKAN RENSTRA	LOKASI	DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH/PROVINSI TERKAIT
2.13.05.1.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, MHA	Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat & HKG-PKK serta BBGRM	10 Kabupaten/Kota	300.000.000	Kutai Kartanegara	Anggaran dan SK	Anggaran dan SK

II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019) (2)

KODEFIKASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET (RENSTRA)	PAGU ANGGARAN (Rp) BERDASARKAN RENSTRA	LOKASI	DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH/PROVINSI TERKAIT
2.13.05.1.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, MHA	Fasilitasi Rembuk Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	150,000,000.00	10 Kabupaten/Kota	Perbup dan Anggaran	SK dan Anggaran
		Fasilitasi Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan perempuan serta kesetaraan Gender dan Pembangunan	10 Kabupaten/Kota	5,000,000,000.00	10 Kabupaten/Kota	Anggaran, SK, Perbup, Perwali	SK dan Anggaran

II B. RENCANA USULAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sebagai bahan Pemutakhiran Permendagri No 90 Tahun 2019)

KODEFIKASI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN (POIN-POIN)	KETERANGAN
2.13.05.1.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, MHA	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota	<p>Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat & HKG-PKK serta BBGRM</p> <p>Fasilitasi Rembuk Stunting Tingkat Prov dan KabKota</p> <p>Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Kesetaraan Gender dan Pembangunan</p>	<p>Pencanangan BBGRM, Puncak Peringatan BBGRM, Penutupan BBGRM</p> <p>Koordinasi Tim Konvergensi Pencegahan Stunting</p> <p>10 Program Pokok PKK</p>	

SEKSI KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT



**KISI - KISI PEMAPARAN KEPALA BIDANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA ACARA RAKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019.

PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN AKAN DATANG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosbudmasy	MONEV MHA Kabupaten Kutai Kartanegara Desa Kedhang Ipil	5 MHA	5 MHA	100%	Tingkat Pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat terhadap Masyarakat Hukum Adat masih rendah	Meningkatkan intensitas sosialisasi serta kualitas pembinaan pengembangan MHA
	MONEV MHA Kabupaten Kutai Barat DPMPK Kutai Barat				Kurangnya Sosialisasi Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA	Tersedianya dana untuk Rakor MHA se Kaltim. Menyurati Kabupaten (Dinas PMD) Terkait Pendataan MHA.
	MONEV MHA Kabupaten Kutai Timur. MHA Wehea					Memberikan pelatihan Pada Kepala Desa dan Ketua MHA Se Kaltim
	MHA Kabupaten Paser Desa Swan Slutung. MHA Kampung Mulyu					

II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019)

KODEFIKASI	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET (RENSTRA)	PAGU ANGGARAN (Rp) BERDASARKAN RENSTRA	LOKASI	DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH/PROVINSI TERKAIT
2.13.05.1.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, MHA	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	5 MHA	250.000.000,00	Kutai Barat (2), Kutai Kartanegara (1), Mahakam Ulu (2)	Perbup dan Anggaran	Perbup dan Anggaran
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	17 MHA	150.000.000,00	Paser, KUKAR, Berau, Kutim, Kubar, Mahulu	Perbup dan Anggaran	Perbup dan Anggaran
2.13.02.1.01.02	Program Penataan Desa	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	3 Kabupaten	750.000.000,00	Berau, Kutim, Kubar	SK dan Anggaran	SK dan Anggaran

Catatan :

Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT



KISI - KISI PEMAPARAN KEPALA BIDANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PADA ACARA RAKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA TAHUN AKAN DATANG
Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat	150 orang	150 orang	100%	1. Pengakuan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.	1. Mendorong Kementerian Desa, PDT & Trans melalui Dirjen PPMD agar segera mengeluarkan Regulasi dan Pedoman Tentang Pembentukan Kaderisasi di Tingkat Desa
					2. Peran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi hingga terbitnya Peraturan Mendes PDDT tentang Pendampingan Desa masih belum mengakomodir dan memberikan kejelasan tentang keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai ujung tombak Pembangunan di Desa. Kondisi ini salah satu memicu ketimpangan informasi yang di dapat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa.	2. Meminta kejelasan ke Dirjen Bina Pmdes tentang Keberadaan KPM sesuai Permendagri No 7 Tahun 2007
1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat					3. Peran Tenaga Ahli Profesional belum di optimalkan untuk melakukan Pengkaderan bagi Masyarakat, sehingga Desa masih berharap dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional Desa.	3. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pembinaan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilatih oleh Balitmas
					4. Pemanfaatan Dana Desa masih identik untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur	4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai Permendagri No 7 Tahun 2007 dan Permendes 18 Tahun 2019
					5. Kurangnya Informasi dan data dari Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan Peningkatan kapasitas Masyarakat	5. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menganggarkan dana bantuan Operasional bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM/L)
						6. Melakukan Peningkatan SDM bagi Kelompok Masyarakat di Perdesaan melalui Pelatihan berbasis keterampilan dan Permasalahan
						7. Melakukan Kerjasama bersama Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Latihan Masyarakat (Balmasy) untuk melakukan peningkatan SDM melalui Pelatihan Keterampilan berbasis Potensi dan Masalah
						8. Melakukan kerjasama bersama Perguruan Tinggi dalam pengembangan Kapasitas Masyarakat
						9. Melakukan kerjasama bersama Perbankan untuk mendukung akses Permodalan bagi Kelompok Masyarakat

II A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 (Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019)

KODEFIKASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET (RENSTRA)	PAGU ANGGARAN (Rp) BERDASARKAN RENSTRA	LOKASI	DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH/PROVINSI TERKAIT
	PROGRAM : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						
	KEGIATAN : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kab/kota						
	1. Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas Kelembagaan		100 Org/Kelompok	150.000.000	Kalimantan Timur	Dukungan Anggaran Transportasi bagi Peserta dan Tempat	Narasumber
		1.1	Peningkatan SDM bagi Kelompok Masyarakat di Perdesaan berbasis keterampilan				
		1.2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tentang Konvergensi Stunting				

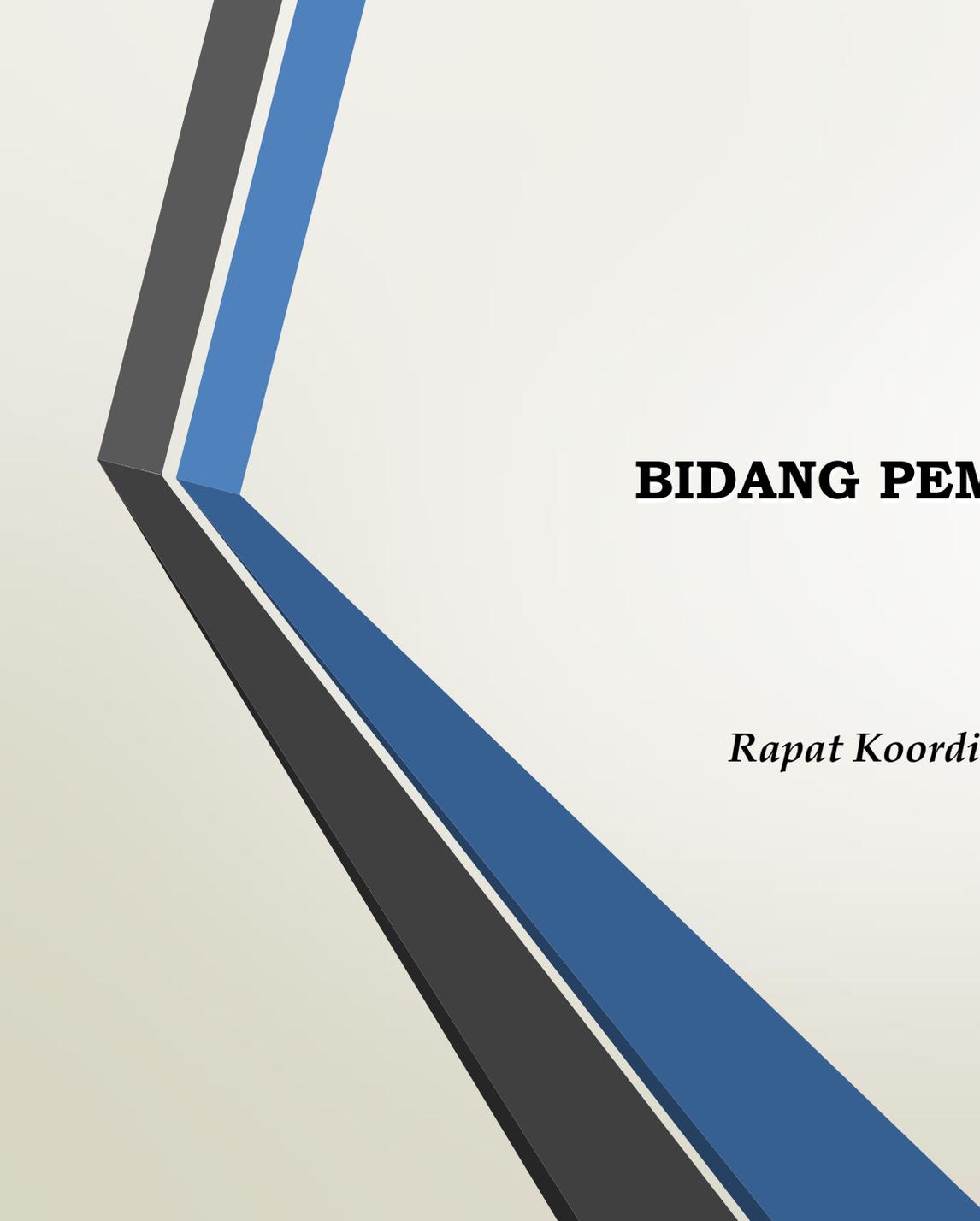
		1.3	Peningkatan Kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				
		1.4	Peningkatan Kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia Tentang Teknik Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting				
		1.5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Masyarakat di Perdesaan Tentang Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan				
		1.6	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Difabel				
		1.7	Rapat Teknis Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur				
	PROGRAM : Program Penataan Desa			100.000.000	Kalimantan Timur		
	KEGIATAN : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat						
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat						
		1.1	Pelatihan Pararegal bagi Masyarakat Hukum Adat			Dukungan Anggaran Transportasi bagi Peserta dan Tempat	Narasumber
		1.2	Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat				
Catatan :							
Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019							

I B. RENCANA USULAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Sebagai bahan Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)

KODEFIKASI	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN (POIN-POIN)	KETERANGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rapat Teknis Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Timur		Dasar Hukum : UU Desa No 6 Tahun 2014, Permendes, PDT & Trans Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat, Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
			Peningkatan Kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		
			Peningkatan Kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia Tentang Teknik Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting		
		Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Perdesaan	Peningkatan SDM bagi Kelompok Masyarakat di Perdesaan berbasis keterampilan		Visi Misi Presiden RI 2019 - 2024 Indonesia Maju SDM Unggul
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tentang Konvergensi Stunting		Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur 2018 - 2023 Kaltim Yang Berdaulat Melalui Peningkatan SDM Unggul yang berdaya saing (Program Prioritas Gubernur Kaltim)
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok Masyarakat di Perdesaan Tentang Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan		
			Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Difabel		
			Pelatihan Pararegal bagi Masyarakat Hukum Adat		
			Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat		

SEKIAN
TERIMA KASIH...





BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

*Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan, 10 Februari 2020*

STRUKTUR BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Tugas	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan administrasi Desa, kelembagaan, dan kapasitas Desa.	
Fungsi	1.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan administrasi Desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
	2.	Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
	3.	Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan administrasi Desa dan Kelurahan;
	4.	Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengembangan kelembagaan, kapasitas desa, dan Kelurahan;

Seksi Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan

Melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan perkembangan, administrasi Desa dan Kelurahan

Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa

Melakukan pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan, dan aset Desa.

Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan

Melakukan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, kerjasama, dan kapasitas aparatur Desa dan Kelurahan

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Strategi Peningkatan Kinerja tahun Yang Akan datang
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelurahan							
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.	Jumlah Perangkat Desa yang berhasil dilatih	60 Orang	54 Orang	90 %	-	Memantapkan koordinasi bersama Pemerintah Pusat, OPD Provinsi terkait, dan Pemerintah Kab./Kota
-	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.						Mengusulkan ke Pemprov. berkenaan dengan optimalisasi dukungan anggaran program/kegiatan
-	Rapat-rapat, koordinasi dan pembinaan aparatur desa.						Menjaga soliditas team work.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Strategi Peningkatan Kinerja tahun Yang Akan datang
2.	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Laporan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD	1 Laporan	1 laporan	100	-	Memantapkan koordinasi bersama Pemerintah Pusat, OPD Provinsi yang terkait, dan Pemerintah Kab./Kota
-	Rapat-rapat teknis, monitoring penyaluran keuangan desa dan penguatan pengelolaan keuangan desa						Mengusulkan ke Pemprov. berkenaan dengan optimalisasi dukungan anggaran program/kegiatan
							Menjaga soliditas team work.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2019

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan	Strategi Peningkatan Kinerja tahun Yang Akan datang
3.	Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.						
-	Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan Tingkat Prov. Kaltim	Jumlah desa dan kelurahan yang berhasil meraih juara lomba Desa/Kel.Tk. Prov.	3 Desa dan 3 Kelurahan	3 Desa dan 3 Kelurahan	100	-	Memantapkan koordinasi bersama Pemerintah Pusat, OPD Provinsi yang terkait, dan Pemerintah Kab./Kota
-	Perlombaan Cerdas Cermat Desa/Kampung Tingkat Prov. Kaltim	Jumlah Desa yg berhasil meraih juara lomba Cerdas Cermat Desa Tk Prov.	3 Desa /Kampung	3 Desa /Kampung	100	-	Mengusulkan ke Pemprov. berkenaan dengan optimalisasi dukungan anggaran program/kegiatan
-	Mengikuti Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional	Laporan PinDesKel	1 Laporan	1 Laporan	100	-	Menjaga soliditas team work.

RENCANA KERJA TAHUN 2020

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pelaksanaan	Tempat Penyelenggaraan/Lokasi
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelurahan							
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.						
-	Pelatihan Peningkatan Aparatur Desa	Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih	42 Orang	-	-	16 s/d 21 Maret 2020	Hotel Haris Samarinda
-	Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Anggota BPD yang berhasil dilatih	42 Orang	-	-	16 s/d 21 Maret 2020	Hotel Haris Samarinda
-	Konsultasi, pembinaan koordinasi peningkatan kapasitas aparatur Desa.	Laporan	1 Laporan	-	-	Februari-Des 2020	Jakarta, Provinsi dan Kab./Kota

RENCANA KERJA TAHUN 2020

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pelaksanaan	Tempat Penyelenggaraan/ Lokasi
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelurahan							
2.	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa						
	- Rapat kerja teknis pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta Rakernis	70 Orang	-	-	11 Februari 2020	Hotel Novotel Balikpapan
	- Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Jumlah perangkat Desa yang berhasil dilatih	30 Orang	-	-	Bulan Juni 2020	Diinformasikan lebih lanjut
	- Monitoring penyaluran keuangan desa dan penguatan pengelolaan keuangan desa	Laporan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD	Laporan	-	-	April-Des 2020	7 Kabupaten

RENCANA KERJA TAHUN 2020

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pelaksanaan	Tempat Penyelenggaraan/ Lokasi
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelurahan							
3.	Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
-	Rapat kerja teknis pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah peserta Rakernis	50 Orang	-	-	12 Februari 2020	Hotel Novotel Balikpapan
-	Lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yg berhasil meraih juara lomba cerdas cermat desa dan kelurahan tk. Prov.	3 Desa dan 3 Kelurahan	-	-	30-31 Maret 2020	Hotel Haris Samarinda
-	Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tk. Prov.	3 Desa dan 3 Kelurahan	-	-	11 Mei s/d 13 Juni 2020	Samarinda
-	Mengikuti Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional	Laporan PinDesKel	1 Laporan	-	-	Bln Agustus 2020	Jakarta

RENCANA KERJA 2021
 BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Kodefikasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Renstra	Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Kab./ Kota	Dukungan Perangkat Daerah Provinsi
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten						
2.13.05.1.01.02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat						
	Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi - Perlombaan Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan - Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan - Konsultasi, koordinasi, pembinaan penataan desa dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa.	- Jumlah Desa yang berhasil meraih juara lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi. - Jumlah Desa yang berhasil meraih juara lomba cerdas cermat Desa	3 Desa dan 3 Kelurahan 3 Desa	458.500.000	Prov. Kaltim dan Luar Prov. Kaltim	- DPMD/ K - Bagian Pemerintahan Setkab/ Kot	- Bappeda - BPKAD - Biro Adbang - Diskes - BPOD

Kodefikasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub-Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Renstra	Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi	Dukungan Pemerintah Kab./ Kota	Dukungan Perangkat Daerah Provinsi
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan						
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan - Pelatihan Peningkatan Aparatur Desa - Rapat-rapat, konsultasi, koordinasi dan pembinaan peningkatan aparatur desa	- Jumlah Aparatur Desa yang berhasil dilatih	40 Orang	458.500.000	Samarinda Luar Kaltim dan 7 Kabupaten	- DPMD/ K	- Bappeda - BPKAD - Biro Adbang - Inspektorat
	Monitoring penyaluran keuangan desa. - Monitoring penyaluran keuangan desa dan penguatan pengelolaan keuangan desa - Rapat kerja teknis pengelolaan keuangan Desa. - Konsultasi dan koordinasi kebijakan pengelolaan keuangan Desa/Aset Desa	- Laporan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD	1 Laporan	325.000.000	7 Kabupaten Jakarta	- DPMD/ K - BPKAD	- Bappeda - BPKAD - Biro Adbang - Inspektorat

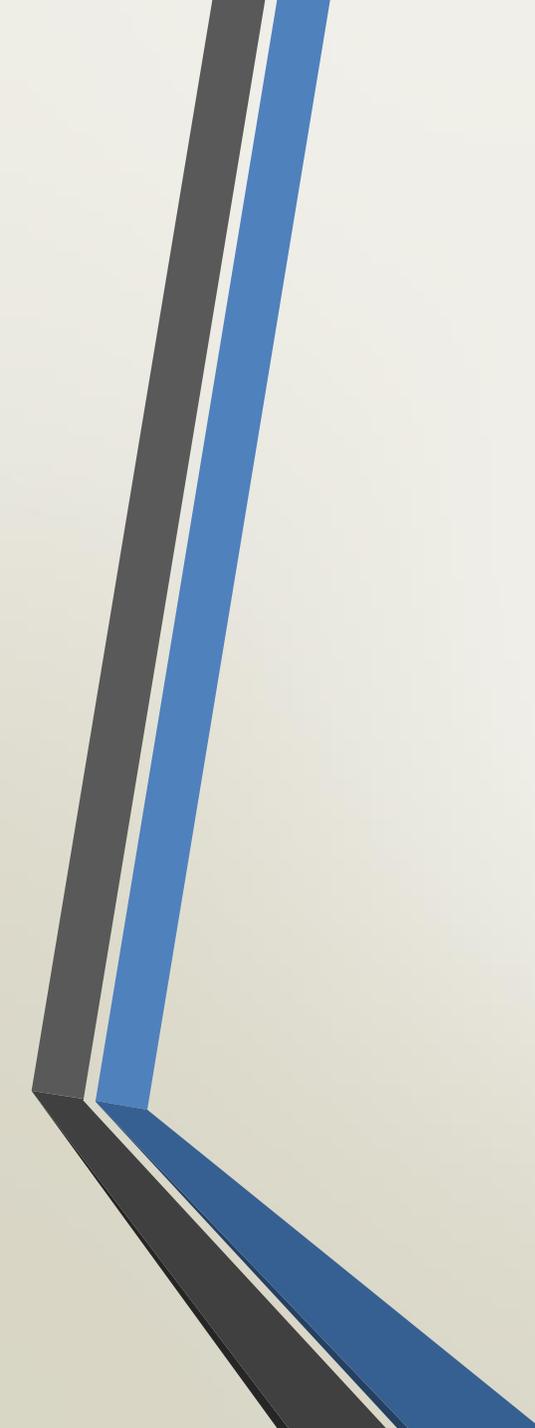
USULAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DPMPD PROV. KALTIM
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
Program Penataan Desa	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	1.	Fasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No. 6/2014, Psl 112 ayat 1)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa	1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
		2.	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
		3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
		4.	Monitoring dan Evaluasi

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan	1. Penilaian Perlombaan Desa/kampung dan Kelurahan
		2. Penilaian Cerdas Cermat Desa/Kampung dan Kelurahan
		3. Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kampung dan Kelurahan
		4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan
		5. Monitoring dan Evaluasi
	Pembinaan Penataan Kewenangan Desa, dan Penetapan serta Penegasan Batas Desa	1. Fasilitasi dan koordinasi Penataan Kewenangan Desa.
		2. Sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		3. Pelatihan/Bimbingan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
		4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penataan kewenangan Desa, penetapan dan penegasan batas Desa.
		5. Monitoring dan Evaluasi
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberian dan Penyaluran Keuangan Desa, dan Pengelolaan Aset Desa	1. Pelatihan/Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa
		2. Pelatihan/Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Aset Desa.
		3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keuangan Desa dan Aset Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		4. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan kepada Desa, dan pengelolaan aset Desa.



Sekian dan terimakasih



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2021

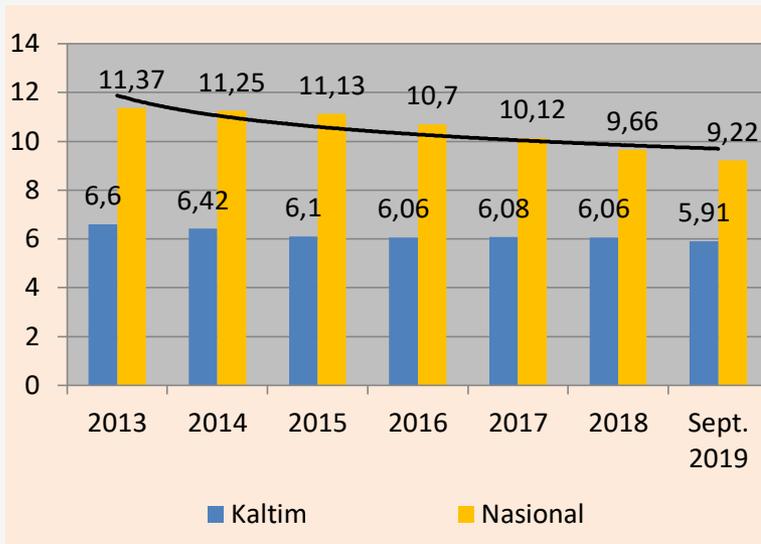
*BAPPEDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR*

Balikpapan, 10 Februari 2020

DASAR HUKUM

- ❖ UUD 1945 Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.**)
- ❖ Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ❖ Undang-Undang No. 6 th 2014 tentang “Desa “ Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, klemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
- ❖ Ps 84 (1) “Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten melalui SKPD, Pemerintah Des dan/atau BUM Des dengan mengikutsertakan masyarakat desa”
- ❖ Undang-Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- ❖ Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
- ❖ Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR



- Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan).
- Pada September tahun 2019 Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional
- Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 5,91% pada tahun September 2019 dengan jumlah 219,92 jiwa penduduk miskin

Provinsi / Kab-Kota	Tingkat Kemiskinan (%)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	7,91	7,64	7,94	7,87	8,76	6,00	9,28	9,03	
Kutai Barat dan Mahulu	8,25	8,28	7,70	7,53	8,33	8,68	8,72	9,15	
Kutai Kartanegara	7,21	6,94	7,52	7,43	7,99	7,63	7,57	7,41	
Kutai Timur	9,43	8,77	9,06	9,10	9,31	9,16	9,29	9,22	
Berau	5,46	5,24	4,83	4,76	5,33	5,37	5,41	5,04	
P P U	8,67	8,57	7,70	7,56	7,92	7,49	7,63	7,40	
Balikpapan	3,39	3,30	2,48	2,46	2,91	2,81	2,82	2,64	
Samarinda	4,31	4,18	4,63	4,56	4,82	4,72	4,77	4,59	
Bontang	5,40	5,20	5,16	5,10	5,06	5,18	5,16	4,67	
Mahulu	0	0	0	0	10,50	10,65	11,29	11,62	
KALTIM	6,77	6,68	6,06	6,42	6,10	6,00	6,08	6,06	5,91
NASIONAL	12,49	11,67	11,37	11,25	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

Kemiskinan di pedesaan (112.75 jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan (108.16 jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai

STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

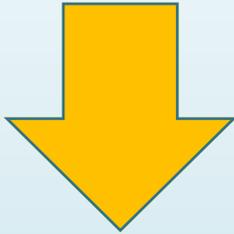
NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	PENGUKURAN		(%)	TOTAL NILAI	TOTAL NILAI IDM 2017	KETERANGAN	JUMLAH DESA BERDASARKAN STATUS					
			SUDAH	BELUM					MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TINGGAL	TOTAL
1.	PASER	139	139	0	100%	81,3984	0,5856	TERTINGGAL	0	5	64	60	10	139
2.	KUTAI KARTANEGARA	193	193	0	100%	112,2327	0,5815	TERTINGGAL	1	5	80	86	21	193
3.	BERAU	100	100	0	100%	60,9656	0,6097	BERKEMBANG	0	6	27	49	18	100
4.	KUTAI BARAT	190	190	0	100%	99,4178	0,5233	TERTINGGAL	1	0	23	102	64	190
5.	KUTAI TIMUR	139	139	0	100%	83,9075	0,6037	BERKEMBANG	0	12	62	56	9	139
6.	PENAJAM PASER UTARA	30	30	0	100%	19,5143	0,6505	BERKEMBANG	0	4	24	2	0	30
7.	MAHAKAM ULU	50	50	0	100%	26,7604	0,5352	TERTINGGAL	0	0	9	26	15	50
TOTAL		841	841	0	100%	484,1967	0,5757	TERTINGGAL	2	32	289	381	137	841

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari **Indeks Ketahanan Sosial**, **Indeks Ketahanan Ekonomi** dan **Indeks Ketahanan Ekologi Desa**

518 desa



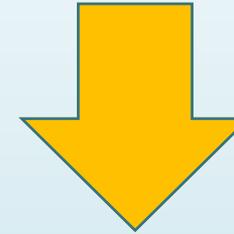
HAMBATAN DAN TANTANGAN



**SUMBERDAYA
MANUSIA**



INFRASTRUKTUR



EKONOMI

**KEMISKINAN
SEBAGIAN BESAR TERPUSAT PADA
DAERAH PERDESAAN, PEDALAMAN
DAN DAERAH TERISOLIR**

**SUMBER
DAYA
MANUSIA**



Kesadaran Bersekolah khususnya di perdesaan relatif masih kurang



Akses dan mutu pendidikan yang terbatas



Daya saing angkatan kerja yang kurang



Pola hidup masyarakat sehat terabaikan



Fasilitas air bersih yang masih kurang



Akses ke daerah pedalaman dan terpencil yang masih kurang



Elektrifikasi masih harus ditingkatkan



Permukiman yang layak huni masih kurang

INFRASTRUKTUR

EKONOMI

Diversifikasi keahlian masih kurang



Keterbatasan modal usaha



Arus barang tidak lancar karena buruknya infrastruktur



Kewirausahaan perlu digali dan di kembangkan





VISI

BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

2

Fokus Ekonomi & Kesejahteraan

**BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI
KERAKYATAN YANG BERKEADILAN**

1

Fokus SDM

**BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA
SAING, TERUTAMA PEREMPUAN,
PEMUDA DAN PENYANDANG
DISABILITAS.**

3

Fokus Infrastruktur

**BERDAULAT DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR
KEWILAYAHAN**

4

Fokus Lingkungan Hidup

**BERDAULAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM YANG BERKELANJUTAN**

5

Fokus Reformasi Birokrasi

**BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN
BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG
BERSIH, PROFESIONAL DAN
BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK**

MISI 1.
Berdaulat dalam
Pembangunan
Sumberdaya Manusia
yang Berakhlak Mulia
dan Berdaya Saing,
terutama perempuan
pemuda, dan
penyandang disabilitas

Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan Budaya
Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai estalase seni budaya Kaltim
Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas Terakreditasi Madya
Pengembangan SMA/SMK/MA/SLB Negeri terpadu bertaraf internasional (*boarding school*)

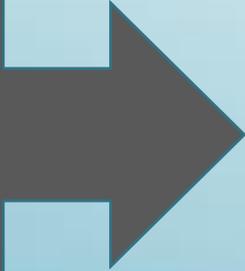
Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas

Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA

Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal

Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas

MISI 2.
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan



Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan

Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah

Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa

Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera

Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada setor industri hilir migas dan pertambangan

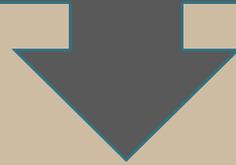
Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat

Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas

Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat

Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim

MISI 3
Berdaulat dalam memenuhi
kebutuhan infrastruktur kewilayahan



Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal

Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa

Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda

Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang

Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur

Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor

Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang

MISI 4
Berdaulat dalam Pengelolaan
Sumberdaya alam yang berkelanjutan



Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis

Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat

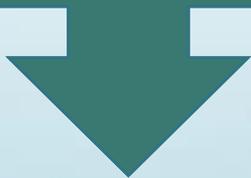
Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata

Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan

Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara

MISI 5

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik



Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis

Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)

Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan

Pencegahan korupsi

KEBIJAKAN PEMPROV KALTIM DALAM MENINGKATKAN STATUS DESA (150 DESA)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, memiliki target peningkatan status IDM 150 desa/kampung melalui *Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, yang tertuang didalam **RPJMD KALTIM TAHUN 2019 - 2023**

No	Kabupaten	Target RPJMD Tahun Berjalan					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Paser	2	4	5	6	8	25
2	Kutai Kartanegara	3	5	5	6	8	27
3	Kutai Timur	2	4	5	6	8	25
4	Kutai Barat	2	4	5	6	8	25
5	Penajam Paser Utara	2	-	-	-	-	2
6	Berau	2	4	5	6	8	25
7	Mahakam Ulu	2	4	5	5	5	21
Total		15	25	30	35	45	150

BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Pada APBD Provinsi Kaltim Tahun 2020 melalui alokasi belanja **Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota**, telah dialokasikan anggaran untuk desa-desa yang ada di Kalimantan Timur sebesar :

Rp.513,330 Milyard

Dimana alokasi belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota tersebut masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan seperti :

- Peningkatan jalan dan jembatan desa
- Peningkatan jalan usaha tani
- Peningkatan jalan lingkungan desa
- Peningkatan jaringan irigasi pertanian
- Drainase lingkungan
- Semenisasi desa

- Pembangunan SPAM air bersih

RUMUSAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD KALTIM 2019 - 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2023
1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	<u>Tujuan 1:</u> Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing (IPM)	Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai- nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	77,50
		Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	14,96
		Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,8
	<u>Tujuan 2 :</u> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Tingkat Kemiskinan)	Sasaran 4: Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,75
		Sasaran 5: Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	58,86
		Sasaran 6: Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	55

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	<u>Tujuan 3:</u> Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12,18	13,53
		Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	368
		Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	1,03
	<u>Tujuan 4:</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara)	Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	21
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	38,29
		Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	84,53
	Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,37	

ARSITEKTUR KINERJA RPJMD KALTIM 2019 – 2023

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Target
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN							
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1					
8. Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	478	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	25
						Jumlah BUMDesa yang aktif	25 Unit aktif
				2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	25
				3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	30
				4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Kampung Iklim	Jumlah kampung/ desa (Desa)	22

TERIMA KASIH





RENCANA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA DESA

Oleh :

BPKAD PROV. KALTIM



PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018

**TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Oleh :

KEPALA BPKAD PROV. KALTIM



RUANG LINGKUP

- 1. PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**
- 2. PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**
- 3. PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**
- 4. MONITORING & PENGAWASAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**
- 5. PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**



1. PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- 1. Dilakukan bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.**
- 2. Dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musrenbang.**
- 3. Ditujukan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang program strategis pembangunan daerah maupun nasional.**
- 4. Alokasi anggaran harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota.**
- 5. Alokasi anggaran tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan dan perundang-undangan.**



2. PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- 1. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota.**
- 2. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan beberapa hal :**
 - a. Untuk Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahap Pertama maksimal sebesar 25% dari nilai kumulatif seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan;**
 - b. Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik;**



- c) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahap selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 25% dengan menyampaikan laporan F-4;
- d) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap kedua disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%;
- e) Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap ketiga Disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90%.



3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- 1. Terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.**
- 2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan kepada Gubernur dengan ketentuan :**
 - a. Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;**
 - b. Laporan triwulan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;**



- c. Laporan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- d. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana contoh Form F-3 Lampiran III Peraturan Gubernur ini;
- e. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur;
- f. Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal **20 Desember** tahun anggaran berkenaan



4. MONITORING & PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

- 1. Monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Keuangan dan terlebih dahulu diberitahukan melalui surat resmi dari Pemerintah Provinsi.**
- 2. Pengawasan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.**
- 3. Pengawasan peruntukan dan aliran dana dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas perintah Gubernur.**



5. PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- 1. Pergeseran Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan;**
- 2. Pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Provinsi melalui Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;**
- 3. Pergeseran belanja bantuan keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi.**



KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
2. Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas Kabupaten/Kota.



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**



ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Balikpapan, 10 Februari 2020

OLEH: FAHMI PRIMA LAKSANA
Kabid Anggaran BPKAD Provinsi Kaltim



SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Pembahasan & Kesepakatan
KUA PPAS antara KDH dgn DPRD
→ M2/7/2020 - M1/8/2020

Penetapan RKPD
→ M4/6/2020

Penyusunan RKA-SKPD
→ M3/8/2020

Musrenbang RKPD
Provinsi → M2/4/2020

Raperda APBD
(Nota Keuangan)
→ M4/10/2020

60 Hari Kerja
(2 Bulan)

Forum Perangkat
Daerah (Rancangan
RKPD) → ≤ M2/3/2020

Persetujuan Bersama
Rancangan APBD dgn DPRD
→ ≤ M4/11/2020

Konsultasi Publik
→ M2/2/2020

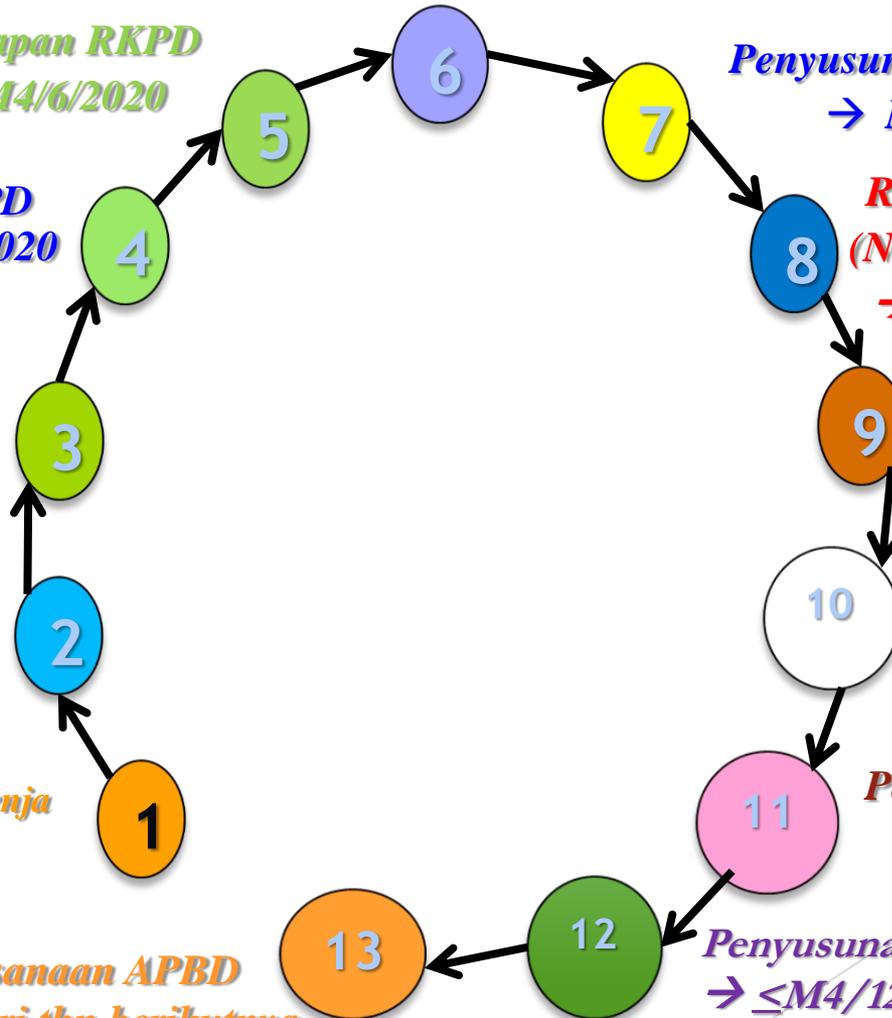
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
→ ≤ M1/12/2020
(15 Hari Kerja)

Ranwal RKPD (Ranwal Renja
SKPD) → M1/12/2019

Penetapan Perda APBD
→ ≤ M4/12/2020

Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
M1 / 1 / 2021

Penyusunan DPA SKPD
→ ≤ M4/12/2020





EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA & KAWASAN PERDESAAN

**Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**

Balikpapan | Hotel Novotel | 10 Februrari 2020

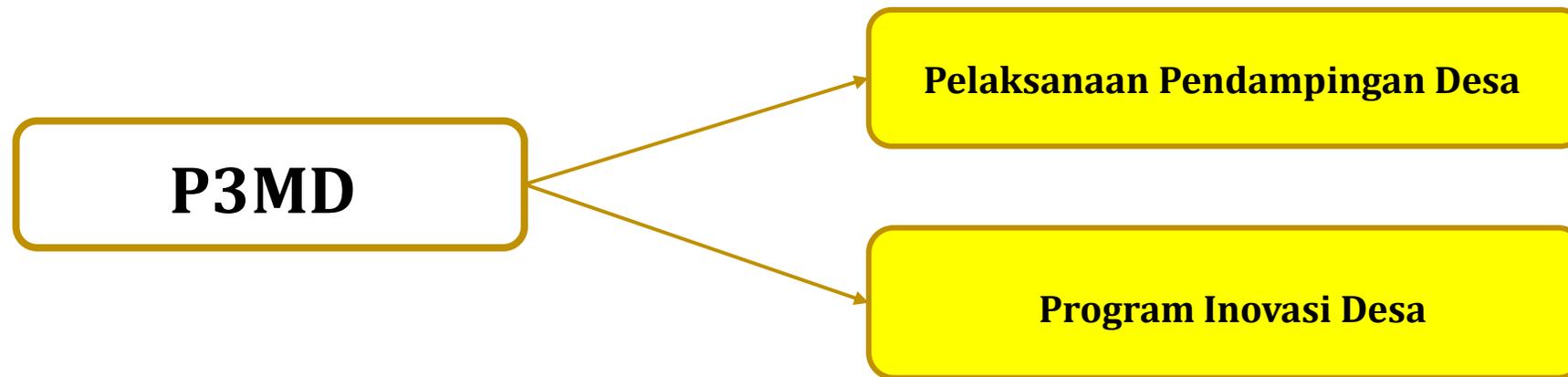


PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

*Desaku
Membangun*

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

Program Pembangunan Desa membawahi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)** yang bersumber dari dana APBN untuk pengelolaan dan pembinaan :



Untuk pelaksanaan di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola pelaksanaan P3MD mendapatkan pagu anggaran sebesar : Rp. 30.589.982,000,-

DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2019

- Pelaksanaan dekonsentrasi mengacu kepada Keputusan Dirjen PPMD nomor 01 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi P3MD tahun 2019.
- Dana dekonsentrasi yang di alokasikan pada tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 30.589.982,000,-
- Realisasi pelaksanaan mencapai 98.99% atau sebesar Rp. 30.281.301.048,- dan Menyisakan anggaran sebesar Rp. 308.680.952,- yang tidak terealisasi dan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	SUMBER DANA
- 5482	Pemberdayaan Masyarakat Desa :	30.589.982.000	30.281.301.048	98,99%	
- 5482.002	1 . Pendampingan Desa	23.036.053.000	22.842.756.503	99,16%	Rupiah Murni
- 5482.006	2 . Program Inovasi Desa	7.553.929.000	7.438.544.545	98,47%	Pinjaman Luar Negeri

P3MD

- **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)** adalah Program Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)** adalah bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam Pelaksanaan dan Implementasi dari **Undang-undang No. 6 Tahun 2014** tentang **Desa** Melalui Dana Desa dan Pendamping Desa Profesional.



**EVALUASI PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2019**

*Desaku
Membangun*

KOMPOSISI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) TAHUN 2018

Komposisi Pendamping

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten

1. TA Pemberdayaan Masyarakat Desa,
2. TA Pembangunan Partisipatif,
3. TA Pemberdayaan Ekonomi Desa,
4. TA Pengembangan Teknologi Tepat Guna,
5. TA Infrastruktur Desa,
6. TA Pengembangan Pelayanan Dasar

Pendamping Desa di Kecamatan

1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)
2. Pendamping Desa Teknis Infrastruktur (PDTI)

Pendamping Lokal Desa di Desa

TUGAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)

Permendes no. 03 Tahun 2015

Pendamping Lokal Desa

Bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan BUM-Des, dan pembangunan berskala lokal desa

Pendamping Desa Pemberdayaan

Bertugas di Kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerjasama desa, pengembangan BUM-Des, dan pembangunan berskala lokal desa

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

REKAPITULASI JUMLAH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data Desember 2019

No.	Kabupaten	Kec	Desa	Total		
				Kebutuhan	Terisi	Kosong
1	Paser	10	139	74	68	6
2	Kutai Kartanegara	16	193	103	99	4
3	Berau	12	100	63	52	11
4	Kutai Barat	16	190	99	90	9
5	Kutai Timur	18	139	85	78	7
6	Penajam Paser Utara	4	30	22	21	1
7	Mahakam Ulu	5	50	32	24	8
Jumlah		81	841	478	432	46

RINCIAN JUMLAH TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data Desember 2019

No.	Kabupaten	Jumlah		TENAGA AHLI			PENDAMPING DESA PEMBERDAYAAN			PENDAMPING DESA TEKNIK INFRASTRUKTUR			PENDAMPING LOKAL DESA			TOTAL		
		Kec.	Desa	KUOTA	TERISI	KOSONG	KUOTA	TERISI	KOSONG	KUOTA	TERISI	KOSONG	KUOTA	TERISI	KOSONG	KUOTA	TERISI	KOSONG
1	Paser	10	139	6	6	0	19	17	2	10	10	0	39	35	4	74	68	6
2	Kutai Kartanegara	16	193	6	6	0	27	26	1	16	16	0	54	51	3	103	99	4
3	Berau	12	100	6	6	0	15	15	0	12	7	5	30	24	6	63	52	11
4	Kutai Barat	16	190	6	5	1	26	24	2	16	13	3	51	48	3	99	90	9
5	Kutai Timur	18	139	6	5	1	20	20	0	18	15	3	41	38	3	85	78	7
6	Penajam Paser Utara	4	30	4	4	0	6	5	1	4	4	0	8	8	0	22	21	1
7	Mahakam Ulu	5	50	4	4	0	8	8	0	5	3	2	15	9	6	32	24	8
Jumlah		81	841	38	36	2	121	115	6	81	68	13	238	213	25	478	432	46

Setelah Pelaksanaan Rekrutmen di Bulan September Tahun 2019. Hingga saat ini, Tenaga Pendamping di provinsi kalimantan timur masih mengalami kekurangan sebanyak 46 orang. Kekosongan pendamping banyak terjadi di desa-desa yang kondisi geografis nya ekstrim dan minim infrastruktur dasar.

TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN DESA

1. Pengiriman laporan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sering mengalami keterlambatan. Hal ini menjadi menghambat proses pembayaran honorarium dan operasional Pendamping.
2. Dalam laporan Pendamping, Banyak terjadi ketidaksesuaian antara pengisian kolom cuti/ijin pada Laporan Waktu Kerja (LWK) dengan pengajuan permohonan ijin yang disampaikan kepada satker P3MD provinsi. Pendamping sudah meninggalkan lokasi tugasnya padahal permohonan cuti/ijin nya belum disetujui oleh satker P3MD, bahkan tidak mengajukan permohonan izin kepada satker.
3. Ditemukannya beberapa laporan terkait Tenaga Pendamping Profesional yang tidak berada di lokasi tugas pendampingan. Hal ini menyebabkan proses pendampingan menjadi tidak maksimal.
4. Dokumentasi kegiatan sarana dan prasarana di desa masih sangat minim dan tidak memberikan informasi kegiatan dan tahapan proses pembangunan mulai dari 0%, 50%, hingga 100%.

TANTANGAN DALAM PENDAMPINGAN DESA

5. Besaran Honorarium dan Operasional Tenaga Pendamping Profesional (TPP) terutama posisi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berada di desa sangatlah rendah. Mengingat kondisi geografis desa di Kalimantan Timur masih banyak yang ekstrim dan sulit terjangkau.
6. Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mendampingi 3 – 4 desa dengan Honorarium dan Operasional yang pas-pasan, tetapi harus mendampingi beberapa desa yang lokasinya berjauhan. Hal ini menyebabkan kinerja pendamping di lapangan menjadi tidak maksimal dan banyak yang mengundurkan diri.
7. Banyak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) khususnya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang mengundurkan diri dikarenakan lokasi tugas yang ekstrem dengan Honorarium dan Operasional yang kecil.
8. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi Tenaga Pendamping Profesional (TPP)



**EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI DESA TAHUN 2019**

*Desaku
Membangun*

LOKASI DAN ALOKASI PELAKSANAAN PID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

JUMLAH KABUPATEN:

7

KABUPATEN



JUMLAH KECAMATAN:

81

KECAMATAN



JUMLAH DESA:

841

DESA



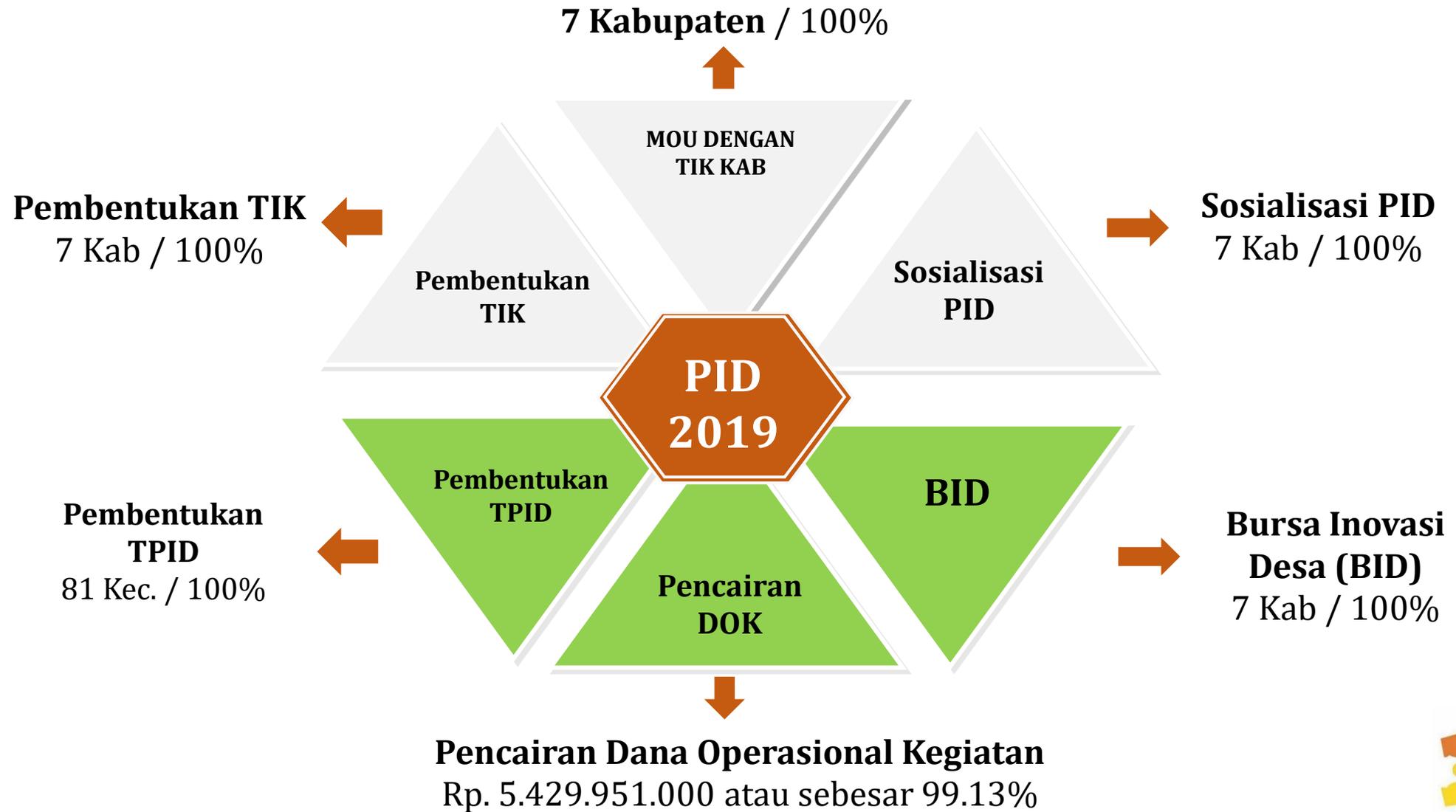
JUMLAH DANA BANTUAN PEMERINTAH:

5.477.551.000

MILIAR



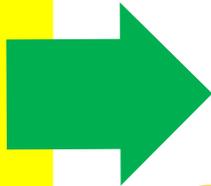
HASIL PELAKSANAAN *PROGRAM INOVASI DESA* PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019



TUJUAN PELAKSANAAN *BURSA INOVASI DESA*

BID

merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa



Pertukaran Ide dan gagasan Inovasi desa

Menjaring komitmen dan Ide Pemerintah Desa untuk mengadopsi atau mereplikasi inisiatif atau inovasi yang diperoleh dalam BID.

Ruang Konsultasi desa dengan P2KTD dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Konsolidasi pemangku kepentingan pembangunan Desa dan antar Desa

Memperkuat **keterlibatan OPD** dan lembaga lain dalam pembangunan desa

Ruang dialogis dan **pertukaran hasil-hasil-praktek baik** dalam pembangunan Desa

HASIL PELAKSANAAN *BURSA INOVASI DESA* PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019



BURSA INOVASI DESA :
6 KABUPATEN (85,70%)



JUMLAH DESA YANG HADIR :
686 DESA (81,57%)



PARTISIPASI PEREMPUAN :
1.202 (34,72%)



**BURSA
INOVASI DESA**



PARTISIPASI BID :

LAKI-LAKI = 147.690 ORANG
PEREMPUAN = 66.201 ORANG
TOTAL = 213.891 ORANG



KARTU KOMITMEN :

1.230 KOMITMEN REPLIKASI



KARTU IDE :

317 IDE INOVASI



EVALUASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2019

***Desaku
Membangun***

BESARAN DANA DESA TAHUN 2019

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



2019

1.	KUTAI KARTANEGARA	Rp 185.361.774.000	193 DESA
2.	KUTAI BARAT	Rp 173.097.834.000	190 DESA
3.	KUTAI TIMUR	Rp 171.877.602.000	139 DESA
4.	PASER	Rp 122.624.619.000	139 DESA
5.	PANAJAM PASER UTARA	Rp 34.774.857.000	30 DESA
6.	BERAU	Rp 109.901.417.000	100 DESA
7.	MAHAKAM ULU	Rp 72.481.479.000	50 DESA

TOTAL :

Rp 870.119.582.000 | 841 DESA

PENYALURAN DANA DESA 2019 DARI RKUN KE RKUD

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data : 31 Januari 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	ALOKASI DANA DESA DARI KEMENKEU	JUMLAH TRANSFER DARI RKUN KE RKUD							
					TAHAP I (20%)		TAHAP III (40%)		TAHAP II (40%)		TOTAL (100 %)	
					Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	PASER	10	139	122.624.619.000	24.524.923.800	20,00%	47.500.297.200	38,74%	49.049.847.600	40,00%	121.075.068.601	98,74%
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	37.072.354.800	20,00%	70.701.263.400	38,14%	74.144.709.255	40,00%	181.918.327.456	98,14%
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	21.980.283.400	20,00%	42.889.920.800	39,03%	43.960.566.800	40,00%	108.830.771.001	99,03%
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	34.619.566.800	20,00%	69.239.133.600	40,00%	69.239.133.600	40,00%	173.097.834.001	100,00%
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	34.375.520.400	20,00%	66.134.840.736	38,48%	68.751.040.800	40,00%	169.261.401.937	98,48%
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	6.954.971.400	20,00%	13.909.942.800	40,00%	13.909.942.800	40,00%	34.774.857.001	100,00%
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	14.496.295.800	20,00%	28.992.591.600	40,00%	28.992.591.600	40,00%	72.481.479.001	100,00%
TOTAL		81	841	870.119.582.000	174.023.916.400	20,00%	339.367.990.136	39,00%	348.047.832.455	40,00%	861.439.738.995	99,00%

PENYALURAN DANA DESA 2019 DARI RKUD KE RKDESA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data : 31 Januari 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	ALOKASI DANA DESA DARI KEMENKEU	JUMLAH TRANSFER DARI RKUD KE RKDESA							
					TAHAP I (20%)		TAHAP III (40%)		TAHAP II (40%)		TOTAL (100%)	
					Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	PASER	10	139	122.624.619.000	24.524.923.800	20,00%	49.049.837.600	40,00%	47.500.972.800	38,74%	121.075.734.201	98,74%
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	37.067.352.639	20,00%	73.339.565.092	39,57%	73.339.208.334	39,57%	183.746.126.066	99,13%
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	21.804.031.400	19,84%	43.371.992.170	39,46%	43.861.589.430	39,91%	109.037.613.001	99,21%
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	34.619.566.800	20,00%	69.239.133.840	40,00%	69.239.133.840	40,00%	173.097.834.481	100,00%
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	33.938.438.984	19,75%	67.899.675.329	39,50%	65.501.560.964	38,11%	167.339.675.278	97,36%
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	6.954.971.400	20,00%	13.909.942.800	40,00%	13.909.942.800	40,00%	34.774.857.001	100,00%
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	14.496.298.800	20,00%	28.992.591.600	40,00%	27.863.173.200	38,44%	71.352.063.601	98,44%
TOTAL		81	841	870.119.582.000	173.405.583.823	19,93%	345.802.738.431	39,74%	341.215.581.368	39,21%	860.423.903.622	98,89%

JUMLAH DESA CAIR (DANA DESA TAHUN 2019)

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Data : 31 Januari 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	ALOKASI DANA DESA DARI KEMENKEU	JMLH DANA DESA CAIR KE DESA			JMLH DANA DESA BELUM CAIR		
					TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
1	PASER	10	139	122.624.619.000	139	139	138	0	0	1
2	KUTAI KARTANEGARA	16	193	185.361.774.000	193	192	192	0	1	1
3	BERAU	12	100	109.901.417.000	99	99	99	1	1	1
4	KUTAI BARAT	16	190	173.097.834.000	190	190	190	0	0	0
5	KUTAI TIMUR	18	139	171.877.602.000	137	137	132	2	2	7
6	PENAJAM PASER UTARA	4	30	34.774.857.000	30	30	30	0	0	0
7	MAHAKAM ULU	5	50	72.481.479.000	50	50	48	0	0	2
TOTAL		81	841	870.119.582.000	838	837	829	3	4	12

Secara keseluruhan Pencairan Dana Desa tahap I, II dan III Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDes) adalah sebesar 98,88% atau sebesar Rp. 860.423.903.622,- dan masih terdapat 12 desa yang tidak salur di tahun 2019.

HASIL PELAKSANAAN DANA DESA 2019

PROV. KALIMANTAN TIMUR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



Jalan Desa
612.984 m



Jembatan
11.826 M



Pasar Desa
27 Unit



BUM Desa
26 Unit



Tambatan
Perahu
1.122 Unit



Embung
23 Unit

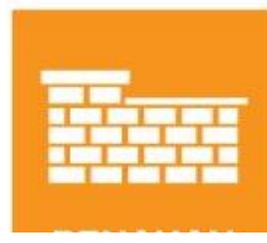


Irigasi
37 Unit



Sarana Olahraga
177 Unit

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Penahan Tanah
719 Unit



Air Bersih
705 Unit



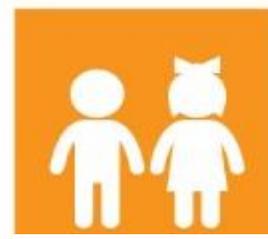
MCK
391 Unit



Polindes-
Poskesdes
39 Unit



Drainase
63.510 M



PAUD
132 Unit



Posyandu
145 Unit



Sumur
77 Unit

BESARAN DANA DESA TAHUN 2020

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



2020

1.	KUTAI KARTANEGARA	Rp 187.633.528.000	193 DESA
2.	KUTAI BARAT	Rp 179.976.813.000	190 DESA
3.	KUTAI TIMUR	Rp 183.445.486.000	139 DESA
4.	PASER	Rp 126.720.147.000	139 DESA
5.	PANAJAM PASER UTARA	Rp 39.814.579.000	30 DESA
6.	BERAU	Rp 116.218.996.000	100 DESA
7.	MAHAKAM ULU	Rp 78.166.630.000	50 DESA

TOTAL : Rp 911.976.179.000 | **841 DESA**

#6 TAHUN DANA DESA PROV. KALIMANTAN TIMUR (2015 - 2020)



No	Provisi	Tahun	Dana Desa
1	Kalimantan Timur	2015	Rp. 240,542,413,000,-
		2016	Rp. 300,216,745,000,-
		2017	Rp. 540,759,158,000,-
		2018	Rp. 731,009,055,000,-
		2019	Rp. 870.119.582.000,-
		2020	Rp. 911.976.179.000,-
TOTAL			Rp. 3.986.745.634.000,-

TOTAL DANA DESA TAHUN 2015-2020 : Rp. 3.986.745.634.000,-

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN DANA DESA

1. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang terlambat bahkan tidak dibuat, disebabkan karena rendahnya kualitas SDM di pemerintahan Desa. Akibatnya, penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya tidak dapat dicairkan karena tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban.
2. Penggunaan Dana Desa diluar bidang prioritas. Mengakibatkan penggunaan dana desa menjadi tidak tepat sasaran. Penggunaan dana desa harus diperuntukan kepada kegiatan yang bersifat Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di setiap desa. sehingga dalam proses Perencanaan, Penganggaran dan Pemanfaatan dana desa menjadi tidak maksimal.
4. Ketidakhadiran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Lokasi Tugas, sehingga dalam proses Perencanaan, Penganggaran dan Pemanfaatan dana desa menjadi tidak maksimal.

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN DANA DESA

5. Pengawasan Dana Desa yang masih belum optimal, karena kewenangan audit tidak melibatkan pendamping desa, tetapi hanya melibatkan BPKP dan Inspektorat yang pengawasannya tidak akan maksimal mengingat jumlah desa yang sangat banyak dengan lokasi yang beragam.

Jenis-jenis penyimpangan yang Dilaporkan :

- a. Tidak adanya pembangunan di desa;
- b. Pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana Anggaran Biaya;
- c. Dugaan adanya *mark up* oleh oknum aparat desa;
- d. Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. (Tidak adanya papan pelaksanaan kegiatan)
- e. Masyarakat tidak dilibatkan;
- f. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi;
- g. Kongkalikong dalam hal pembelian material bahan bangunan;



INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

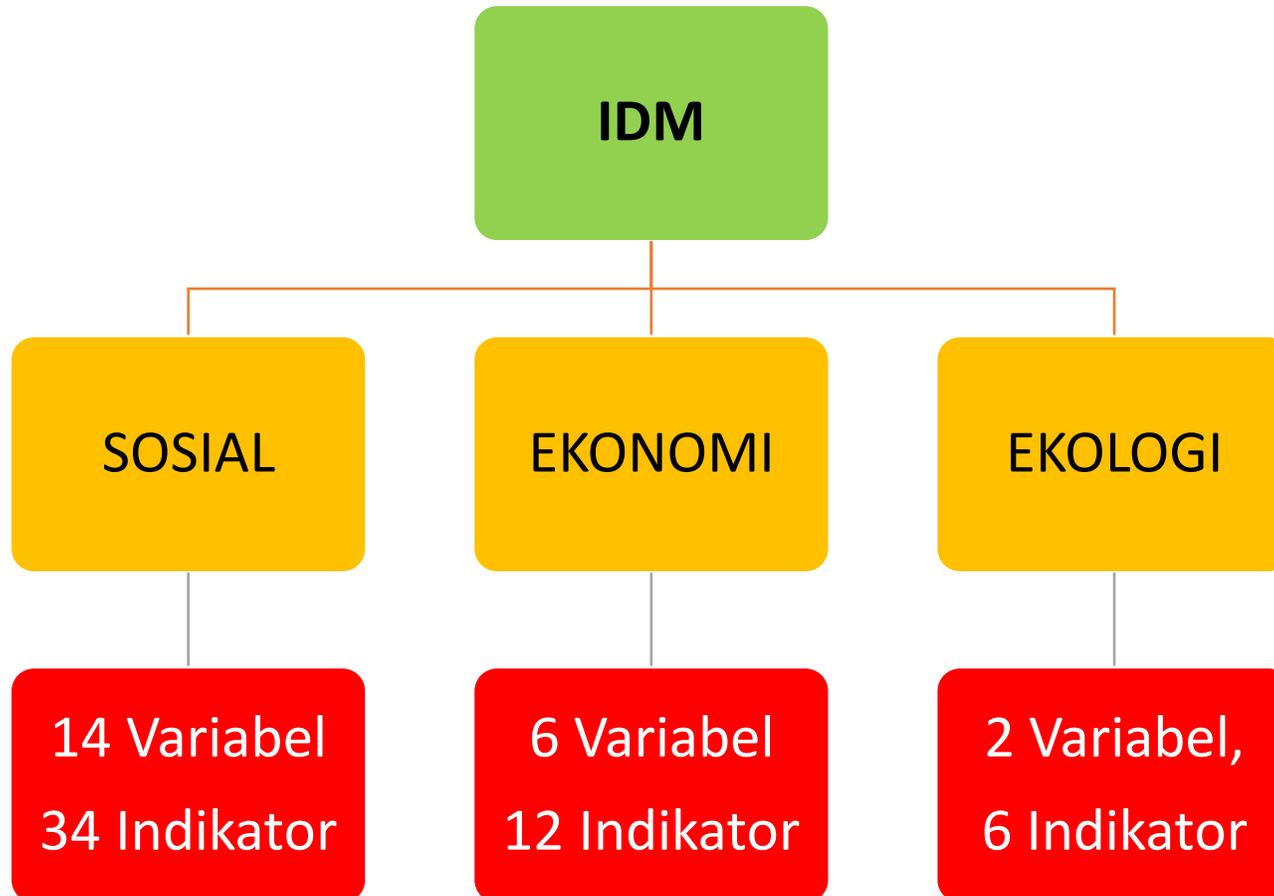
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

***Desaku
Membangun***

GAMBARAN UMUM IDM



Dimensi, Variabel, dan Indikator Pengukuran



Klasifikasi Desa

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

STATUS DESA DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019



NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	TOTAL NILAI IDM 2019	KETERANGAN	JUMLAH DESA BERDASARKAN STATUS					
					MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TOTAL
1.	PASER	139	0,6092	BERKEMBANG	1	9	77	47	5	139
2.	KUTAI KARTANEGARA	193	0,6423	BERKEMBANG	4	33	100	53	3	193
3.	BERAU	100	0,6539	BERKEMBANG	1	23	55	20	1	100
4.	KUTAI BARAT	190	0,5902	TERTINGGAL	1	10	75	98	6	190
5.	KUTAI TIMUR	139	0,6378	BERKEMBANG	3	21	70	44	1	139
6.	PENAJAM PASER UTARA	30	0,6905	BERKEMBANG	1	7	22	0	0	30
7.	MAHAKAM ULU	50	0,5862	TERTINGGAL	0	4	16	23	7	50
TOTAL		841	0,6241	BERKEMBANG	11	107	415	285	23	841

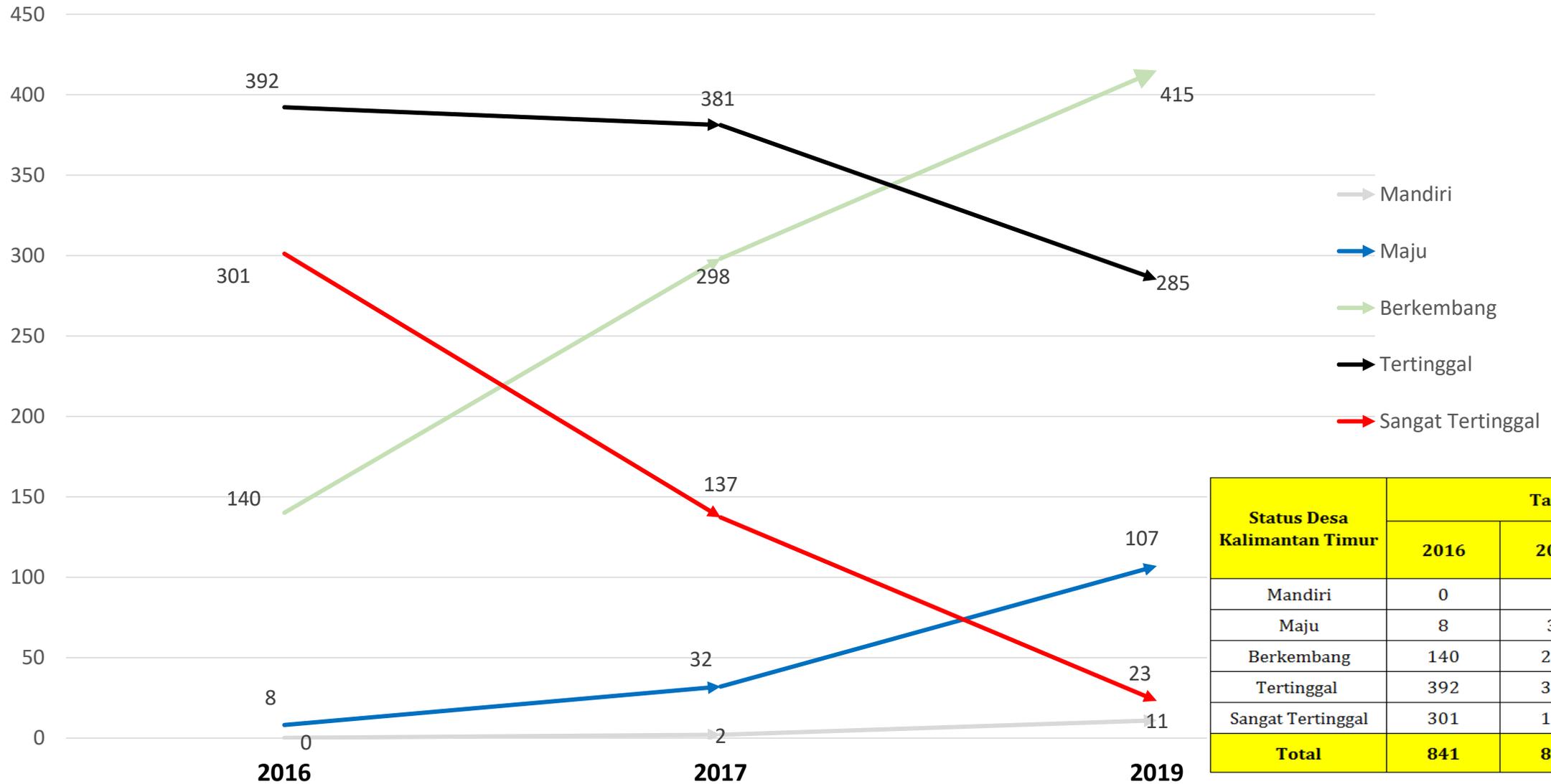
GAMBARAN UMUM IDM KALTIM & TREND TAHUN 2016 S.D 2019



Status Desa Kalimantan Timur	Tahun			Analisis Trend (persentase 841 desa)		
	2016	2017	2019	2016	2017	2019
Mandiri	0	2	11	0,00%	0,24%	1,31%
Maju	8	32	107	0,95%	3,80%	12,72%
Berkembang	140	289	415	16,65%	34,36%	49,35%
Tertinggal	392	381	285	46,61%	45,30%	33,89%
Sangat Tertinggal	301	137	23	35,79%	16,29%	2,73%
Total	841	841	841	100%	100%	100%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan desa di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu \pm 3 tahun sangat signifikan. Persentase desa sangat tertinggal turun sangat secara drastis jika dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 35,79% (301 desa) menjadi 2,73% (23 desa) pada tahun 2019. Hal Ini menjadi indikator bahwa proses pendampingan desa yang sedang berjalan saat ini memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Kalimantan Timur.

GRAFIK PERKEMBANGAN STATUS IDM KALTIM TAHUN 2016 S.D 2019



Status Desa Kalimantan Timur	Tahun		
	2016	2017	2019
Mandiri	0	2	11
Maju	8	32	107
Berkembang	140	289	415
Tertinggal	392	381	285
Sangat Tertinggal	301	137	23
Total	841	841	841

TANTANGAN DALAM PERHITUNGAN IDM



- I. Akurasi Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM) masih belum optimal, dikarenakan :
 1. Waktu perhitungan yang relatif pendek Sedangkan form pengisian data dalam kuisisioner berjumlah ± 700 pertanyaan.
 2. Tenaga Pendamping harus mendampingi 3 - 4 desa, sehingga kesulitan dalam mengisi kuisisioner yang banyak dan waktu yang terbatas.
 3. Tidak ada bantuan operasional tambahan untuk Tenaga Pendamping yang survei ke lapangan, padahal kondisi geografis desa di kaltim masih banyak yang sulit di jangkau.



PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

***Desaku
Membangun***

LINGKUP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

UU 6/2014/Pasal 83

a

Penggunaan dan Pemanfaatan Wilayah Desa dalam Rangka Penetapan Kawasan Pembangunan sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/ Kota

Pemanfaatan Wilayah

b

Pelayanan yang dilakukan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan

Pelayanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan

c

Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Ekonomi Perdesaan, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan TTG

d

Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan dan Kegiatan Ekonomi

Pemberdayaan untuk Meningkatkan Akses Ekonomi

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SEBAGAI PEMBANGUNAN MULTI SEKTOR



Penetapan Kawasan Perdesaan diharapkan mampu menjadi referensi bagi K/L terkait untuk melakukan intervensi dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai Pembangunan Multisektor

DATA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi	Kabupaten	Kawasan	Potensi Desa	Kecamatan	Desa	Status Desa
Kalimantan Timur	Paser	Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sukapura	Padi	Tanah Grogot	1. Sungai Tuak 2. Pepara 3. Pulau Rantau	Berkembang Berkembang Berkembang
	Kutai Kartanegara	Kawasan Argo Mina Pastoral	Padi	Tenggarong Seberang	1. Perjiwa 2. Embalut 3. Manunggal Jaya 4. Kerta Buana 5. Karang Tunggal 6. Bukit Raya 7. Bukit Pariaman 8. Bangun Rejo	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Mandiri Berkembang
		Kawasab Perdesaan Agrowisata Bahari	Wisata Alam	Loa Kulu	1. Sepakat 2. Ponoragan 3. Sumber Sari 4. Loh Sumber 5. Jembayan Tengah	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
	Kutai Timur	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur	Beras	Sangata Selatan	1. Sangatta Selatan 2. Sangkima 3. Teluk Sangkima	Mandiri Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
Teluk Pandan				4. Kandolo 5. Teluk Pandan		

* Data Terakhir Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah di input ke Kementerian Desa.

DATA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi	Kabupaten	Kawasan	Potensi Desa	Kecamatan	Desa	Status Desa
Kalimantan Timur	Kutai Barat	Kawasan Perkampungan Perbatasan Terpencil	Kerajinan Rotan	Bentian Besar	1. Tende 2. Sambung 3. Randa Empas 4. Tukuq	Tertinggal Berkembang Tertinggal Tertinggal
	Mahakam Ulu	Kawasan Perdesaan Long Pahangai	Kakao	Long Pahangai	1. Long Pahangai 2. Long Tuyuq 3. Lilu Mulang	Berkembang Tertinggal Tertinggal
	Berau	Kawasana Perdesaan Tanjung Redep	Minapolitan (Udang, Bandeng)	Pulau Derawan	1. Pulau Derawan 2. Teluk Semanting 3. Pagat Bertumbuk 4. Kasai 5. Tanjung Batu	Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Berkembang

* Data Terakhir Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah di input ke Kementerian Desa.



PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DESA DAN KELURAHAN

***Desaku
Membangun***

PENDAHULUAN PENYUSUNAN PROFIL DESA

- Dalam rangka ketersediaan informasi tentang potensi wilayah suatu kabupaten/kota yang mencakup sampai wilayah desa/kelurahan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri RI, menetapkan penyusunan Profil Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
- Tujuannya adalah untuk menjadikan Profil Desa dan Kelurahan sebagai basis data dan sumber informasi guna pemenuhan kebutuhan pembangunan.

KEGUNAAN & MANFAAT PROFIL DESA

❖ MEMBERIKAN GAMBARAN MENYELURUH TENTANG KARAKTER DESA/KELURAHAN YANG MELIPUTI POTENSI SUMBER DAYA ALAM, SDM, KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.



❖ MENGETAHUI GAMBARAN POTENSI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN YANG AKURAT, KOMPREHENSIF DAN INTEGRAL.

❖ SEBAGAI DASAR UNTUK MENETAPKAN PROGRAM KEGIATAN & DASAR PENETAPAN PELAKSANAAN DANA DESA (DD) DARI APBN & ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI APBD SECARA PROPORSIONAL

INSTRUMEN PENYUSUNAN PROFIL DESA

Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desadan Kelurahan

- Potensi SDA
- Potensi SDM
- Potensi Kelembagaan
- Potensi Sarana dan Prasarana

DATA PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten/Kota	Prodeskel		Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Progres
		Sudah Input	Belum Input			
1	Samarinda	35	24	0	59	59%
2	Balikpapan	34	0	0	34	100%
3	Bontang	14	1	0	15	93%
4	Berau	110	0	100	10	100%
5	Kutai Kartanegara	192	45	193	44	81%
6	Kutai Barat	68	126	190	4	35%
7	Kutai Timur	133	8	139	2	94%
8	Penajam Paser Utara	54	0	30	24	100%
9	Paser	142	2	139	5	99%
10	Mahakam Ulu	5	45	50	0	10%

UPDATE PROFIL DESA DAN KELURAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten/Kota	Yang Melakukan UPDATE DATA		Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Progres
		Sudah Update	Belum Update			
1	Samarinda	11	48	0	59	19%
2	Balikpapan	20	14	0	34	59%
3	Bontang	7	8	0	15	47%
4	Berau	53	57	100	10	48%
5	Kutai Kartanegara	94	143	193	44	40%
6	Kutai Barat	39	155	190	4	20%
7	Kutai Timur	5	136	139	2	4%
8	Penajam Paser Utara	49	5	30	24	91%
9	Paser	131	13	139	5	91%
10	Mahakam Ulu	0	50	50	0	0%

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA (I)

1. Belum semua desa/kelurahan mempunyai petugas yang mendampingi dalam melakukan pendataan profil desa/kelurahan secara manual.
2. Operator Profil desa/kelurahan yang tidak tetap dan sering berganti seiring dengan digantinya Kepala Desa/Lurah.
3. Pada umumnya setiap Desa/Kelurahan tidak mempunyai alokasi dana yang cukup untuk melakukan pendataan Profil Desa/Kelurahan, termasuk kontribusi Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Profil desa/kelurahan.
4. Masih banyak desa/kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami kesulitan jaringan internet atau blankspot dan juga pasokan listrik yang belum stabil sehingga tidak dapat mengakses data profil desa/kelurahan secara online.

TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA (II)

5. Desa/kelurahan yang telah menginput data profil desa/kelurahan secara online tidak melakukan updating data tiap tahunnya sehingga hasil analisis data profil desa/kelurahan tidak dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan.
6. Ada beberapa desa yang belum jelas batas administratif desa di beberapa Kabupaten/Kota.
7. Kabupaten/Kota mengalami defisit sehingga tidak dapat menganggarkan dana untuk kegiatan pelatihan data profil desa/kelurahan bagi tenaga operator desa/kelurahan.



SEKIAN & TERIMAKASIH

***Desaku
Membangun***

KEBIJAKAN PROGRAM DPMPD KALTIM TAHUN 2020-2021

*Oleh : Moh. Jauhar Efendi
(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim)*

**DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020**

Balikpapan, 10 Februari 2020



ZIG ZIGLAR

“TAK PERLU JADI HEBAT UNTUK
MEMULAI, TAPI KAU HARUS MEMULAI
UNTUK JADI HEBAT”



Nama :

Dr. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si.

Pangkat :

Pembina Utama Madya

Jabatan :

- Plt. Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda Prov. Kaltim (2019-skrng)**
- Ka DPMPD Prov. Kaltim (2016-skrng)**
- Ka BPMPD Prov. Kaltim (2012-2016)**
- Kadis Kominfo Prov. Kaltim (2009-2012)**
- Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim (2004-2009)**
- Kabag Penerangan, Pemberitaan & Dokumentasi (2002-2004)**
- Sekretaris BKD Prov. Kaltim (2001-2002)**
- Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian (1999-2001)**
- Camat Penajam (1998-1999)**
- Camat Babulu (1997-1998)**
- Kasubbag Mutasi Jabatan (1995-1997)**
- Kasubbag Urusan Dalam & Keamanan (1992-1994)**
- Kasubbag Urusan Dalam (1990-1992)**



Riwayat Pendidikan



APDN Samarinda (1985)

IIP Jakarta (1990)

Sepala/Diklat Pim IV (1992)

S2 UGM (1995)

Sepama/Diklat Pim III (1999)

Monash University (2001)

South Australia University (2001)

Diklat Pim II (2003)

S3 UNPAD (2019)



Pengalaman Mengajar



01

Guru SMA Al- Khairiyah

02

Dosen Universitas
Widayagama Mahakam

03

Dosen Untag Samarinda

04

Dosen STIESAM Samarinda

05

Dosen S1 PIN UNMUL

06

Dosen S1 Ilmu Komunikasi
Unmul

07

Instruktur Diklat Struktural
PIM IV dan III

08

Instruktur Diklat Teknis
Fungsional

09

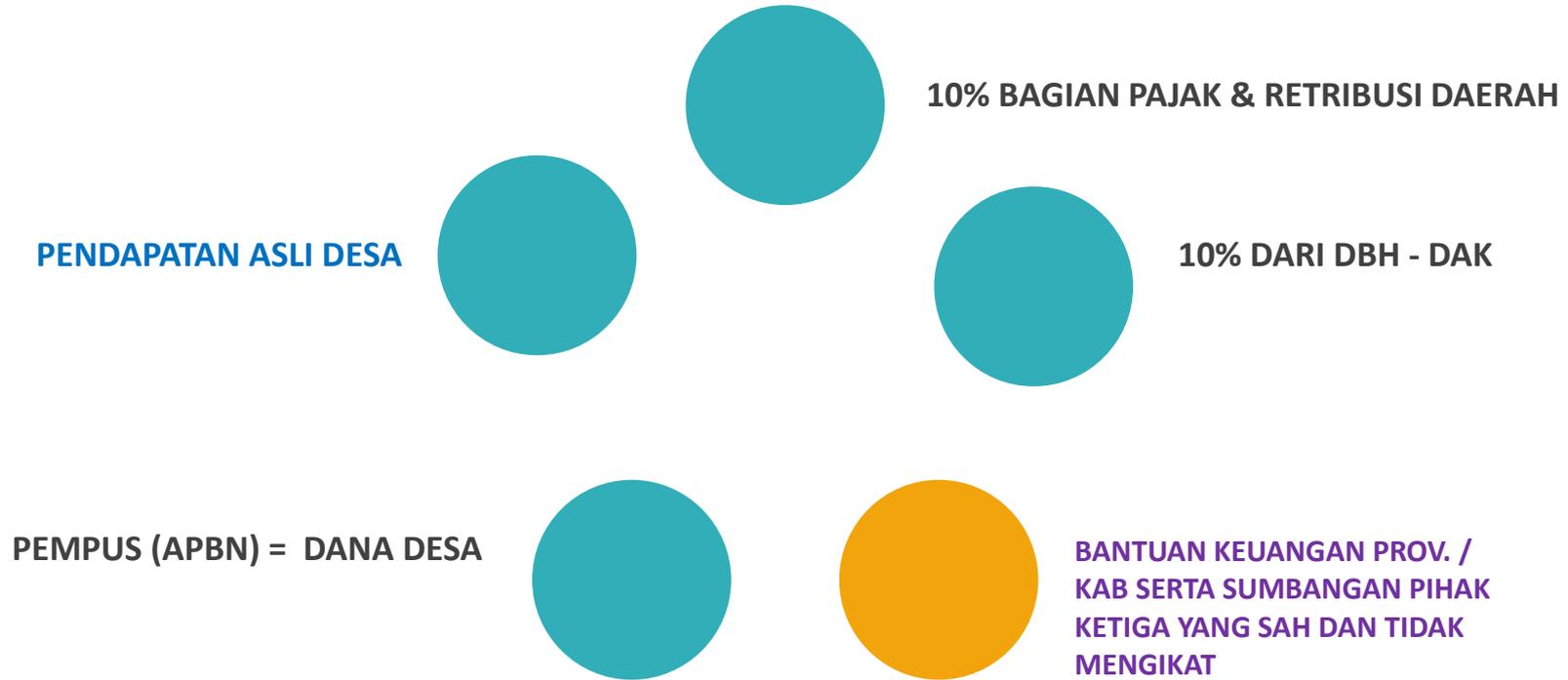
Narasumber di berbagai
instansi Pemerintahan dan
organisasi

JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA/KAMPUNG SE KALIMANTAN TIMUR

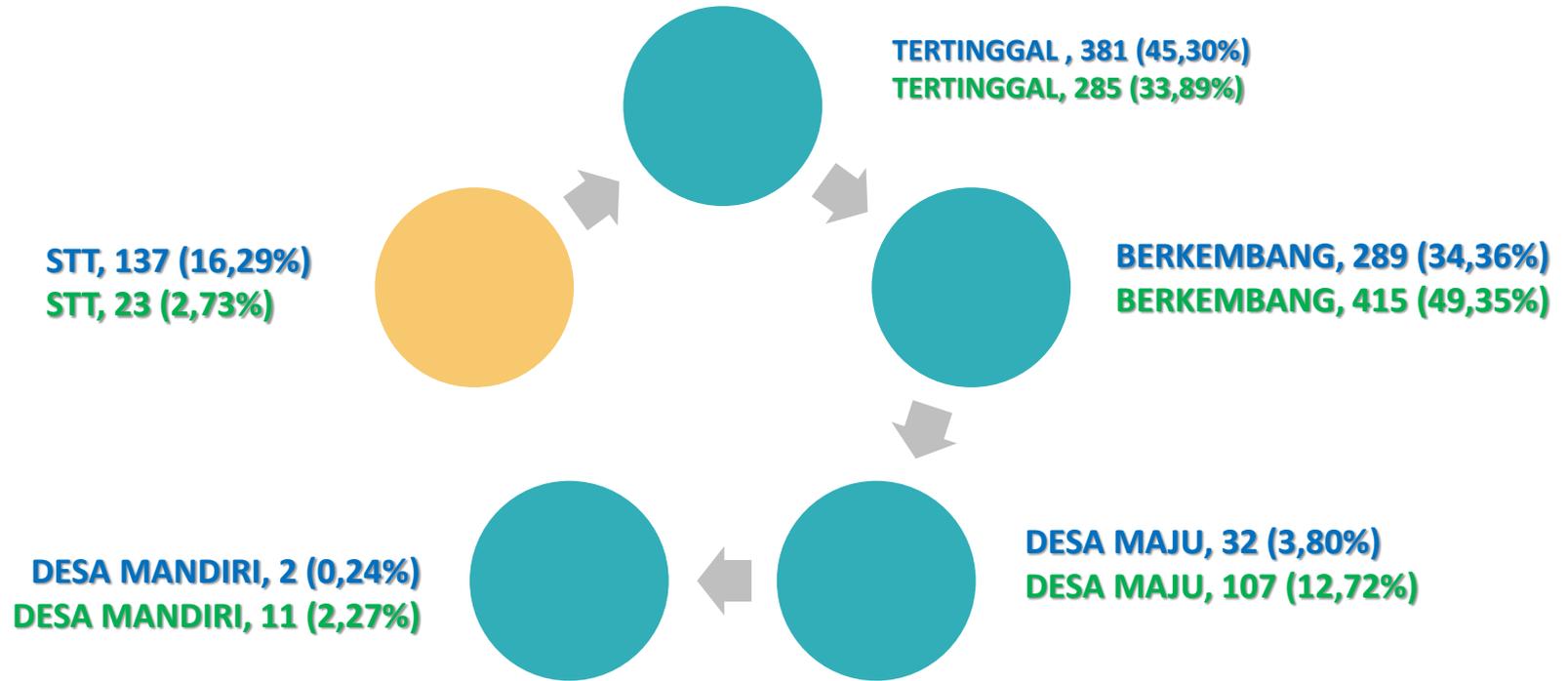


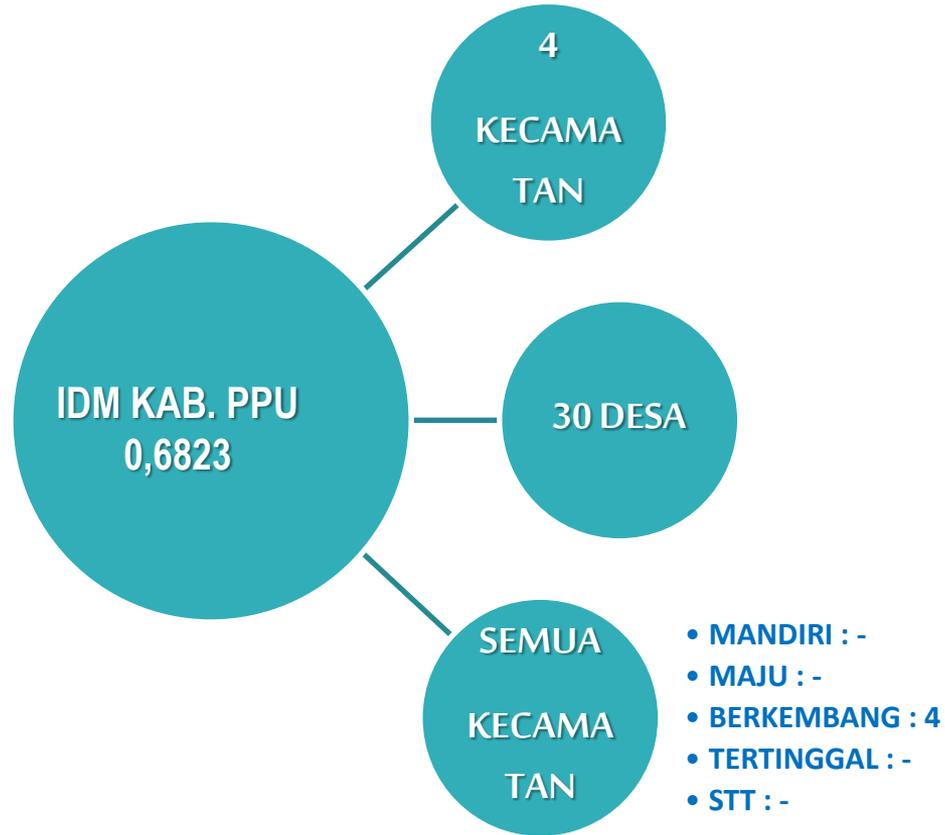
Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jlh. Kecamatan	Jlh. Kelurahan	Jlh. Desa/Kampung
64.01	Kab. Paser	10	5	139
64.02	Kab. Kutai Kartanegara	18	44	193
64.03	Kab. Berau	13	10	100
64.07	Kab. Kutai Barat	16	4	190
64.08	Kab. Kutai Timur	18	2	139
64.09	Kab. Penajam Paser Utara	4	24	30
64.11	Kab. Mahakam Ulu	5	0	50
64.71	Kota Balikpapan	6	34	0
64.72	Kota Samarinda	10	59	0
64.73	Kota Bontang	3	15	0
		103	197	841

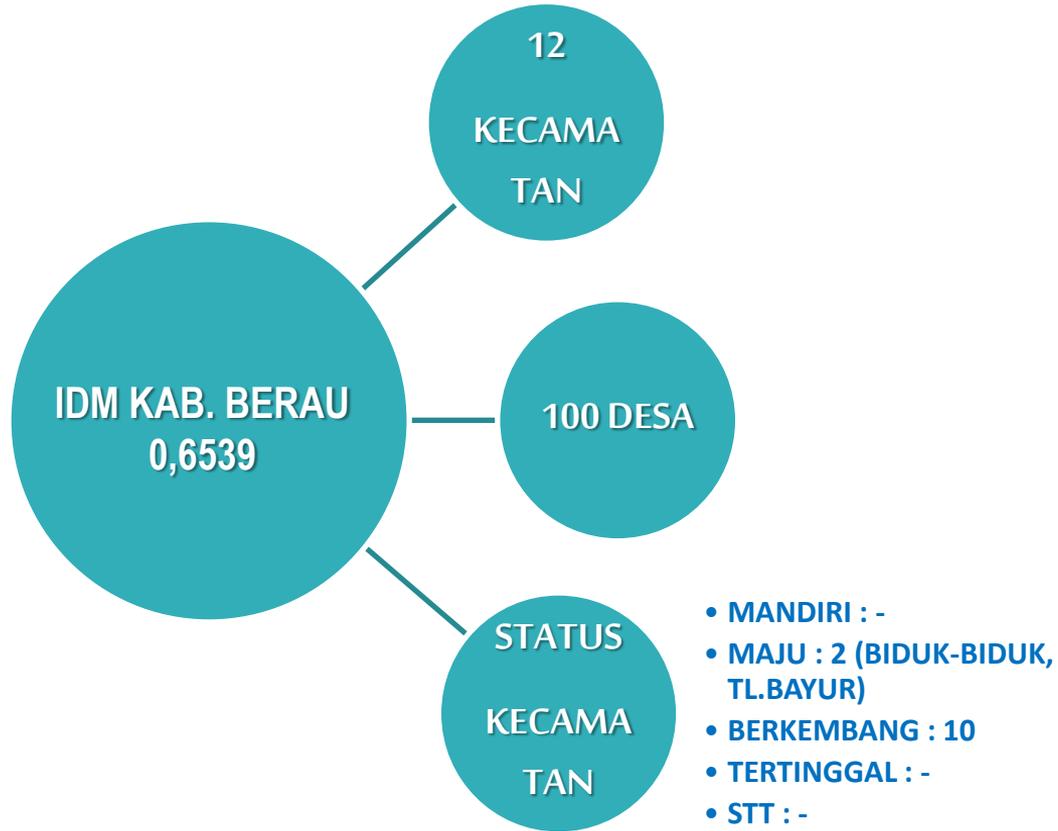
SUMBER KEUANGAN DESA

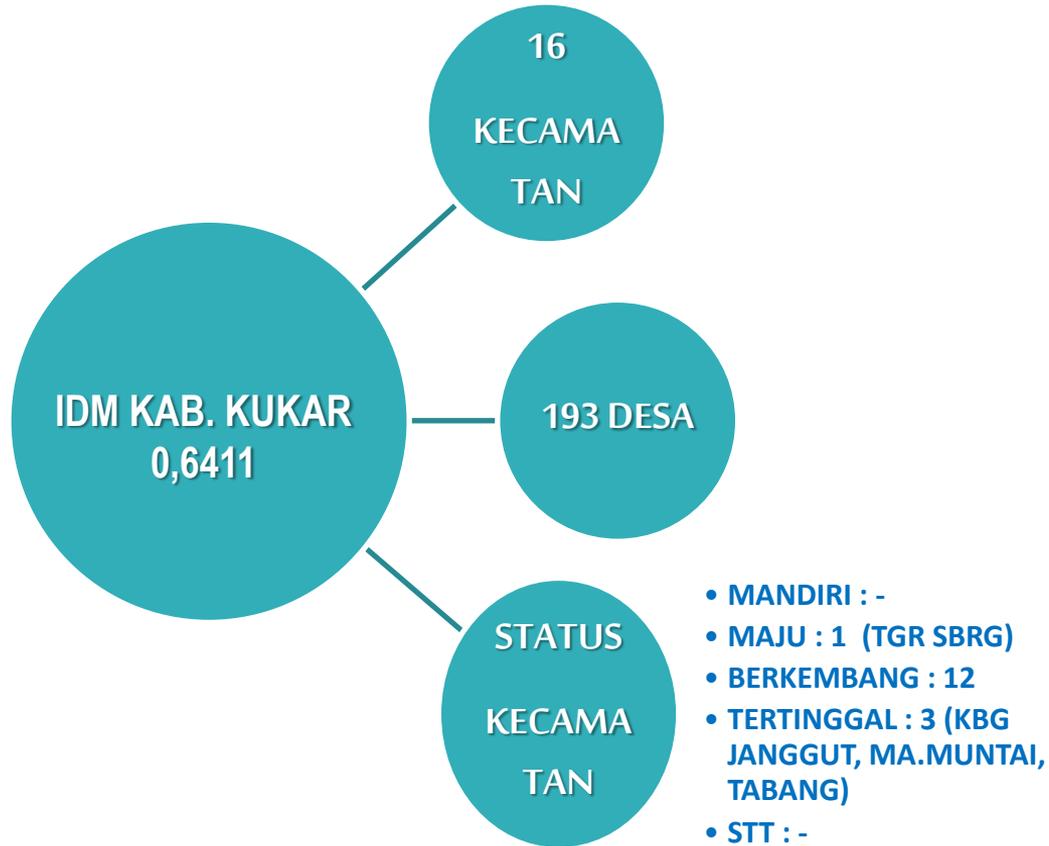


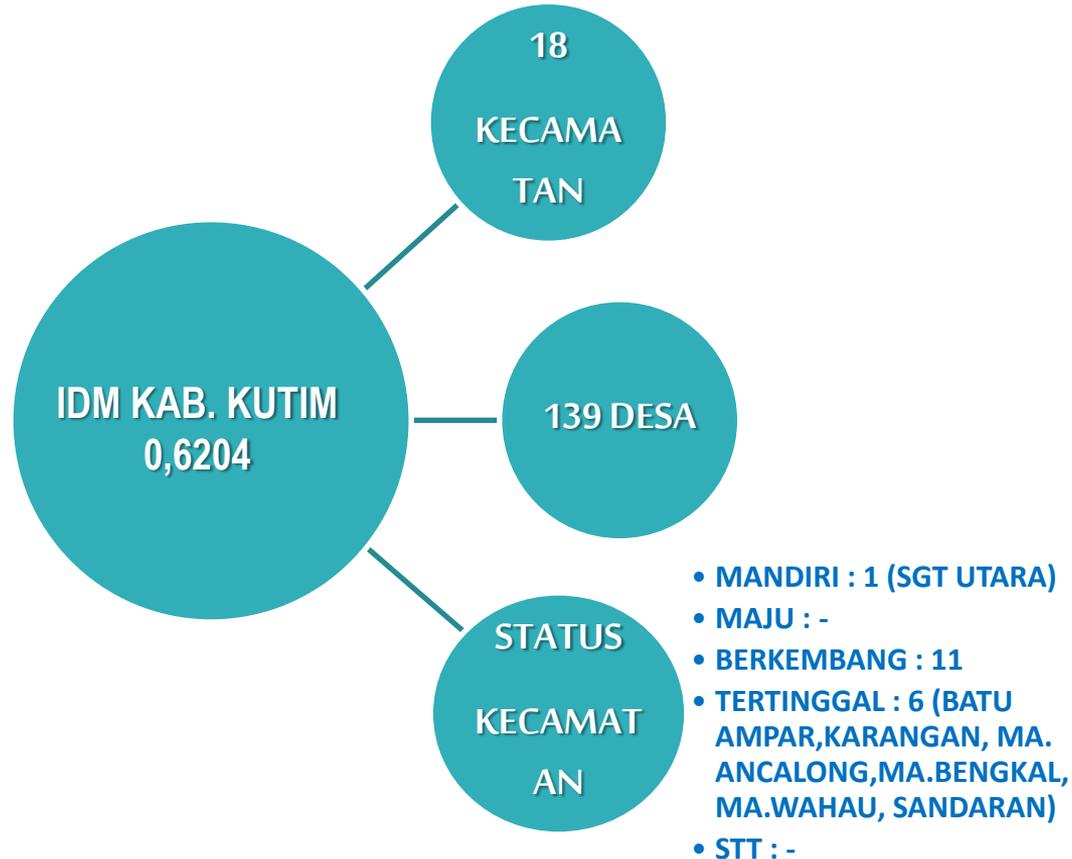
IDM KALTIM 2017 - 2019

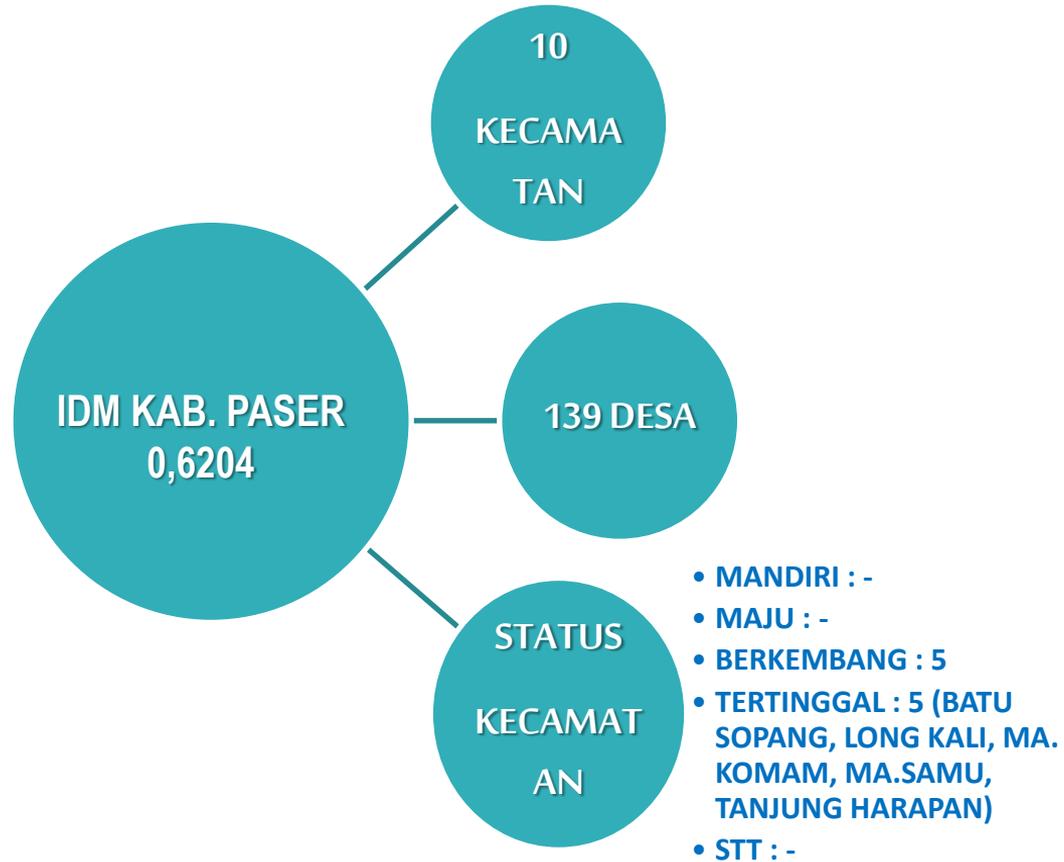


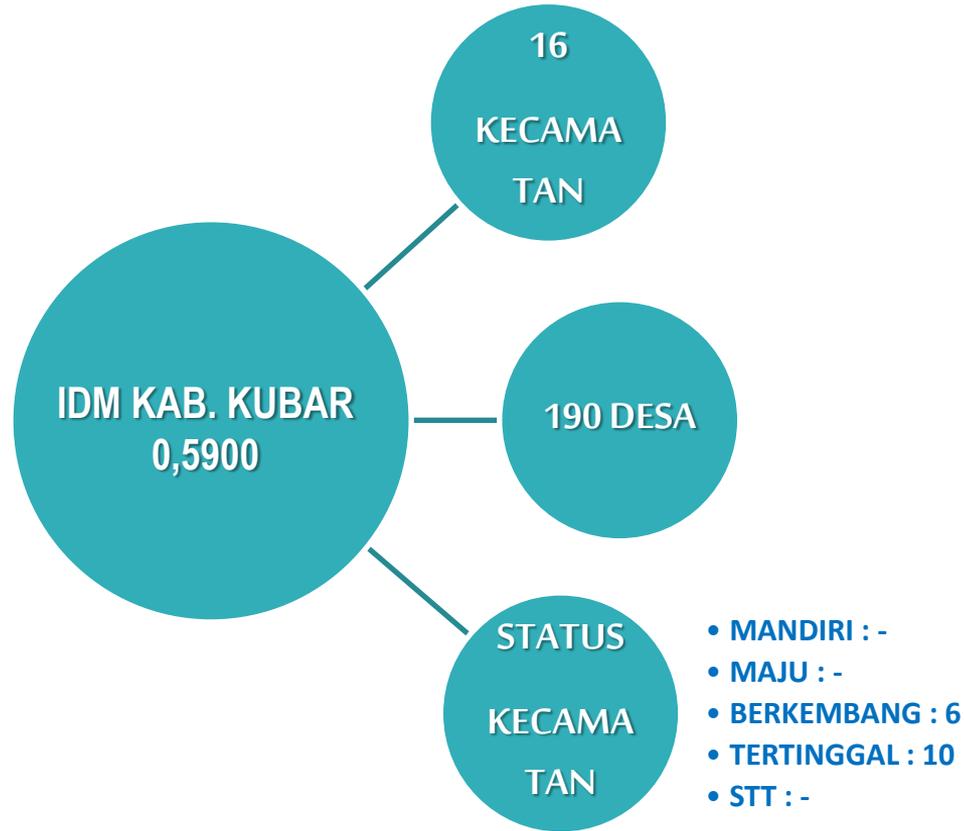


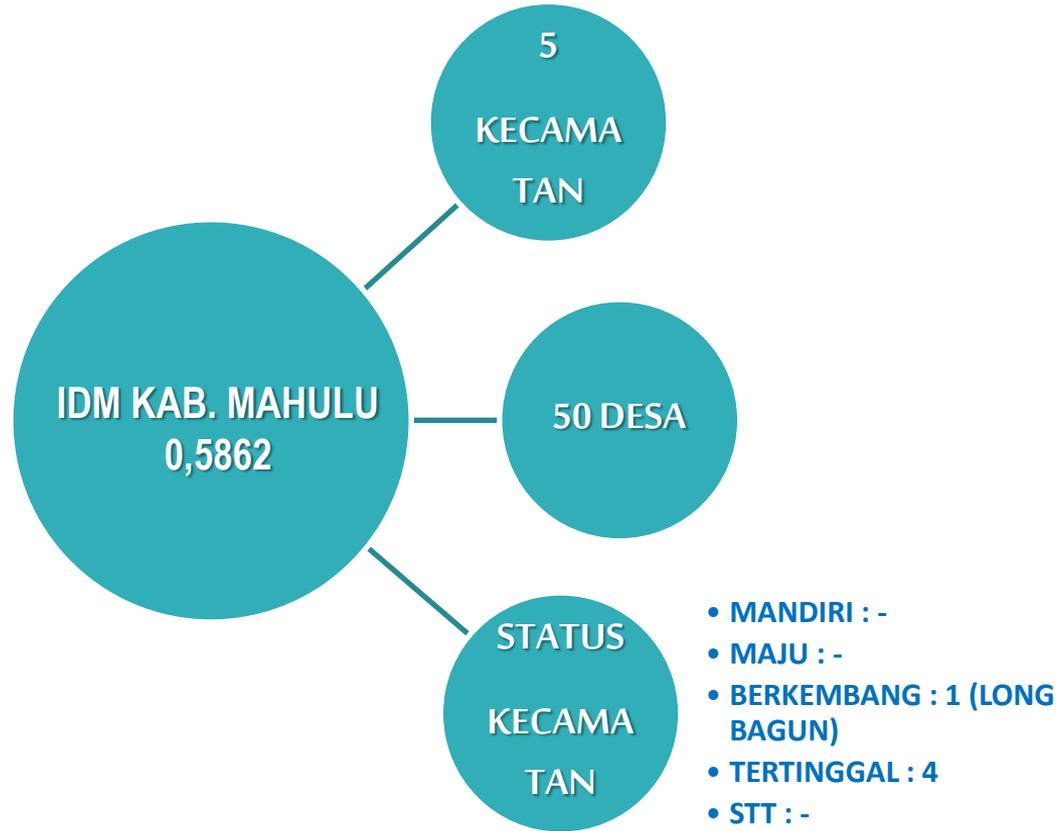


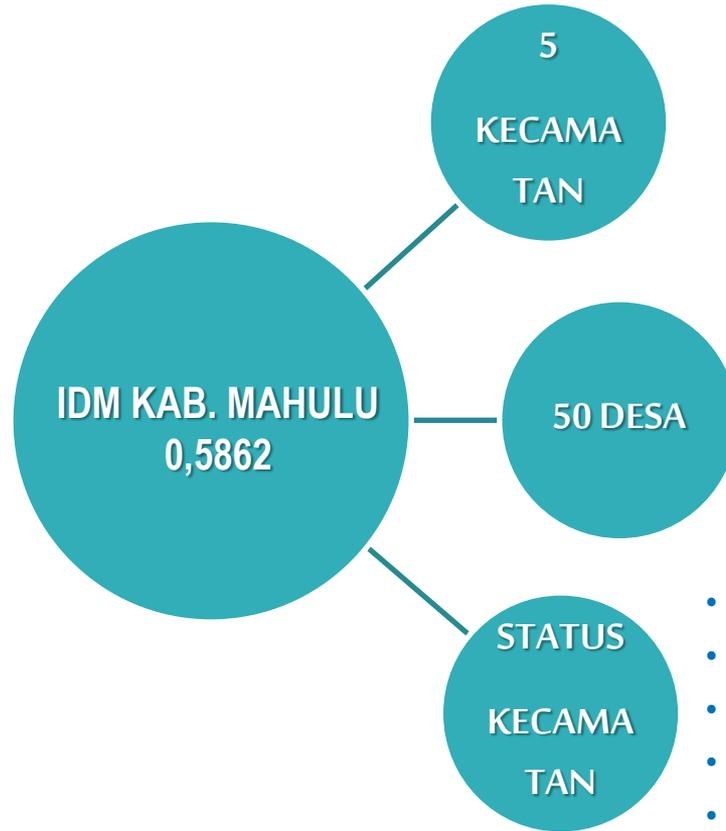












- MANDIRI :-
- MAJU :-
- BERKEMBANG : 1
- TERTINGGAL : 4
- STT :-

KELUARGA MISKIN DAN KELUARGA SEHAT





PENULIS BUKU “HITUNG SENDIRI
PENDAPATAN SAYA”

<https://efendijauharblog.wordpress.com>

f : Jauhar Efendi



@EfendiJauhar



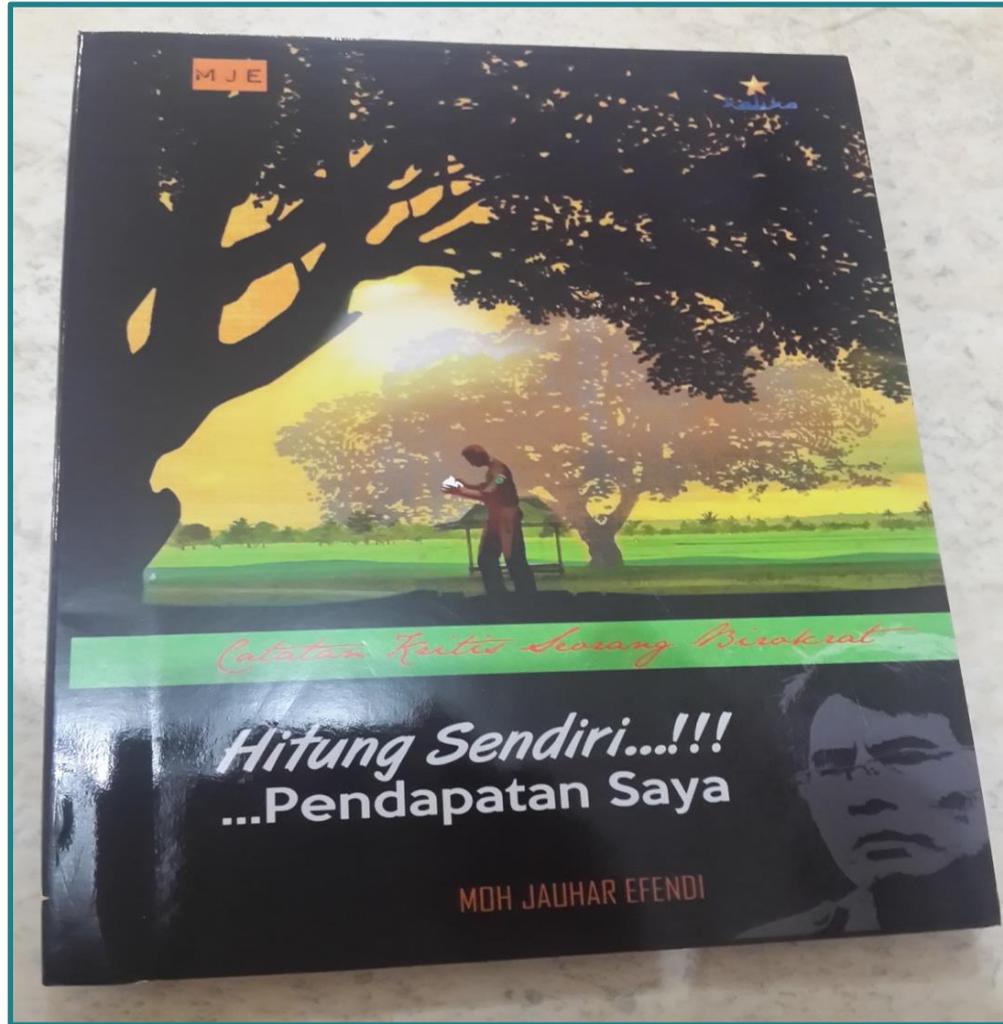
Hp. 081253326576
WA.0812-533-26576



@jauharefendi73



m.jauharefendi@yahoo.co.id





Hitung Sendiri...!!! **...Pendapatan Saya**

Sebuah catatan kritis akan selalu menarik untuk dibaca. Terlebih penulisnya seorang pejabat penting pemerintah, eselon dua, di sebuah provinsi yang dikenal kaya. Kaltim kaya dan karena itu jadi lumbung pendapatan nasional. Kekayaan alamnya dikeruk siang malam, nyaris tanpa henti, untuk membiayai pembangunan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya di Nusantara.

Tidak semua pejabat mampu menulis. Kalau pun bisa menulis, umumnya tidak cukup memiliki keberanian untuk menceritakan apa adanya. Tetapi, Mohammad Jauhar Efendi -- akrab disapa Johar atau Jauhar -- tidak termasuk dalam kelompok itu. Di tengah kepadatan tugas dan kesibukannya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Provinsi Kalimantan, ia masih sempat menorehkan catatan-catatan kritisnya.

Catatan kritisnya terkait banyak hal. Suatu kali, Johar mengajak kita menengok ke belakang di awal reformasi. Bahwa eforia reformasi juga telah merasuk ke masyarakat desa-desa di wilayah Babulu dan Penajam. Dua kecamatan di Kabupaten Paser (sekarang masuk wilayah Kabupaten PPU) itu ia pimpin tahun 1997-1999.

Kali lain, Johar juga tidak bisa diam saja melihat rendahnya respon pemerintahan saat ini dalam menyikapi ragam masalah publik dan tuntutan perkembangan zaman. Dan buku yang sekarang ada di tangan Anda ini adalah hasil "ketidakdiaman"-nya atas apa-apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.

Apresiasi :

DR. Drs. H. Awang Faroek Ishak MM, M.Si (Gubernur Kalimantan Timur)
DR. Ir. H. Irianto Lambrie, MM (Gubernur Kalimantan Utara)
Prof. DR. H. Budiman Rusli, Drs. MS (Guru Besar Universitas Padjadjaran)
Effendi Gazali, Phd, MPS ID (Pakar Komunikasi Universitas Indonesia)
Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS (Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

ISBN: 978-979-942-52-7





DAFTAR ISI

Apresiasi

Gubernur Kalimantan Timur	vi
Gubernur Kalimantan Utara	vii
Guru Besar Universitas Padjajaran	x
Pakar Komunikasi Politik UI	xii
Guru Besar IPDN	xv

Kata Pengantar	xviii
-----------------------------	-------

BAGIAN SATU

<i>Catatan Harian Seorang Camat</i>	1
Ayah Kantornya di Lantai Berapa?	2
Ramli yang Mana?,	6
Izinkan Saya Membunuh	11
Sengketa Tambak	16
Presiden Saja Bisa Dilengserkan	21
Mundurinya Sang Penguasa	26
Hitung Sendiri Pendapatan Saya!	31
Teladan Kapolpos Babulu	36

BAGIAN DUA

<i>Menyoal Ketidakadilan</i>	40
Menyoal Hubungan Pusat-Daerah,	41
Otonomi Khusus : Sebuah Perjuangan	46
Prioritas Penggunaan Dana Desa	51
Pentingnya Pembentukan Satkersus Dana Desa	55
Perubahan Organisasi: Sebuah Keniscayaan	59
Pilkada Serentak 2015	63
Pilkades Serentak 2016	70
Defisit Anggaran: Saatnya Menata Ulang Kebijakan Dana Hibah	76

**BAGIAN TIGA**

<i>Menyorot Masalah Publik</i>	80
Manajemen Sampah	81
Hutan Menara	89
Kepentingan Publik	93
Hukum Praktik Curang Jual Beli	100
Apa Salah Arcandra Tahar?	104
Paspur Haji Palsu?	109
Nilai Sebuah Keamanan	114
Daftar Pustaka	118
Tentang Penulis	120







mje

The logo consists of a stylized icon on the left and the lowercase letters 'mje' on the right. The icon is a circle divided into a light blue upper-left quadrant and a green lower-right quadrant, with a small blue square containing a white cross in the center. The letters 'm' and 'j' are light blue, 'e' is orange, and the dot above 'j' is dark blue.



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT, SDA&TTG

Novotel, 10 Februari 2020



**Realisasi Capaian Sasaran Indikator Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tahun Anggaran 2019**

No	Nama BuMdes	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Usaha
1	Usaha Jaya Makmur	Kerta Bumi	Kuaro	Paser	Perkebunan Sawit
2	Sumber Rejeki	Tabru Paser Damai	Batu Engau		Saprodi
3	Jogowono Diwongso	Kedang Ipil	Kota Bangun	Kukar	Tepung Tapioka, Gula Aren dan ATK
4	Karya Usaha Mandiri	Kedang Murung			Simpan Pinjam, Kerupuk, Sarang Walet dan Ikan
5	Kota Bangun Ilir	Kota Bangun Ilir			Perikanan dan Simpan Pinjam
6	Rama Mandiri	Rantau Makmur	Rantau Pulung	Kutim	Listrik Desa, Simpan Pinjam dan Depot Air Minum
7	Long Segar	Long Segar	Telen		Kebun Sawit
8	Lambing Prima	Lambing	Muara Lawa	Kubar	Pertanian, Peternakan dan Industri Kecil Rumah Tangga
9	Menarung Sejahtera	Ombau Asa	Barong Tongkok		Fotocopy dan ATK
10	Subur Lestari	Bukit Subur	Penajam	PPU	Toserba dan Perkebunan Sawit
11	Harapan Bersama	Karang Jinawi	Sepaku		Perkreditan Desa, Perkebunan Sawit
12	Amparan Tikar	Dumaring	Talisayan	Berau	Pariwisata, Perkebunan dan Perikanan
13	Langkawit	Pulau Derawan	Pulau Derawan		Desa Wisata, Pengelolaan Speed Boat
14	-	Long Gelawang	Laham	Mahulu	
15	Karya Agung	Batu Majang	Long Bagun		Pasar Desa



PETA ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Perkembangan BUMDes Tahun 2019 dengan kategori aktif

NO	Nama Kabupaten	Status		
		Aktiv	Tidak aktif	Belum dibentuk
1	PPU	29	1	0
2	Berau	36	32	32
3	Paser	88	44	7
4	Mahakam Ulu	27	15	8
5	Kutai Barat	85	96	9
6	Kukar	85	91	17
7	Kutai Timur	73	2	64
Jumlah		423	281	137
		704		

LOMBA PENILAIAN BUMDESA TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALTIM**TAHUN ANGGARAN 2019****KATEGORI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BUMDES**

NO	NAMA BUMDES	DESA	KECAMATAN	KAB
1	Amanah	Padang Jaya	Kuaro	Paser
2	Payang Sejahtera	Sungai Payang	Loa Kulu	Kukar
3	Bina Bersama	Temelow	Sepaku	PPU

KATEGORI INOVASI BUMDES

NO	NAMA BUMDES	DESA	KECAMATAN	KAB
1	Bersinar Desaku	Muara Enggelam	Muara Wis	Kukar
2	WKS	Jemparing	Long Ikis	Paser
3	Kemang	Juaq Asa	Barong Tongkok	Kubar

PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2019

1. Pemerintah Desa Long Gelawang belum menemukan SDM yang memiliki kapasitas dibidang manajemen BUMDes
2. Belum adanya forum rembuk dan pelatihan pengelolaan BUMDes yang menghadirkan 15 Bumdes yang menjadi terget dalam rencana kerja 2019.
3. DPMD Kabupaten belum sepenuhnya mengutus BUMDes terbaik untuk mengikuti penilaian tingkat Provinsi Kaltim dengan kategori terbaik pengelolaan keuangan dan aset serta terbaik inovasi BUMDes.
4. Terdapat perbedaan data jumlah BUMDes antara Pendamping Profesional dengan data BUMDes Bidang Ekonomi/Seksi BUMDes

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Peningkatan kemandirian Ekonomi Masyarakat	1	Rapat Kerja Teknis Badan Usaha Milik Desa	Paser dan Samarinda
	2	Pelatihan Pengelolaan Bummdes	Samarinda
	3	Sosialisasi Pendirian Bumdes	Kabupaten
	4	Penilaian Bumdes	Samarinda dan Kabupaten
	5	Koordinasi dan konsultasi	Kemendes, PDT&Trans
	6	Monitoring Perkembangan Bumdes	7 Kabupaten

PROGRAM KAMPUNG IKLIM +

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development (VLED)	1	Pembentukan Tim Kerja (Panitia Kegiatan)	Paser dan Samarinda
	2	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim + serta Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang ramah Lingkungan.	Kabupaten
	3	Koordinasi dan Konsultasi Implementasi Kampung Iklim + dalam Pengembangan Desa Rendah Emisi	Kemendes, PDT&Trans, dan Kementerian LHK
	4	Monitoring Pengembangan Emisi Rendah Desa di Kabupaten	Kabupaten/Kota



PROGRAM DAN KEGIATAN 2021

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Peningkatan kemandirian Ekonomi Masyarakat	1	Rapat Kerja Teknis Badan Usaha Milik Desa	Samarinda
	2	Pelatihan Pengelolaan Bumdes	Samarinda
	3	Sosialisasi Pendirian Bumdes	Kabupaten
	4	Penilaian Bumdes	Samarinda dan Kabupaten
	5	Koordinasi dan konsultasi	Kemendes, PDT&Trans
	6	Monitoring Perkembangan Bumdes	7 Kabupaten
	7	Penyusuna Aplikasi e-BUMDesMart	Samarinda

PROGRAM KAMPUNG IKLIM + TAHUN 2021

Program : Perencanaan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan :	
	1 Pembinaan Perencanaan Desa Berwawasan Lingkungan	Kabupaten
	2 Sosialisasi Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan	Kabupaten/De sa
	3 Bimtek dan fasilitasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes yang berawawasan lingkungan serta Monitoring dan evaluasi	Kabupaten

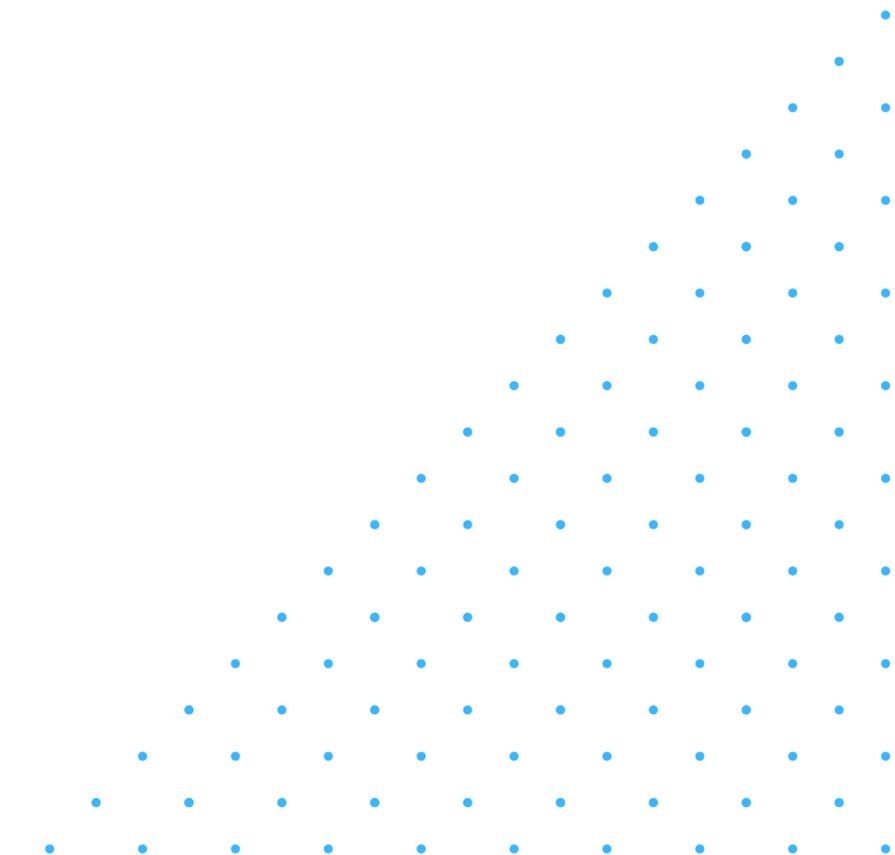


Thank
you!!



LAMPIRAN

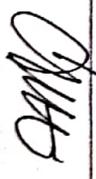
ABSENSI



DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

KUTAI TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Rahmaul Roesas	Sekretaris	DPMD Rutim	D/P	085349734477	-	
2	AGUSTINA WIKI	Kasabag Umum	DPMD Kutim	P/D	081254355892	-	
3	FIRRIAH HIDAYATI	KASUBAG PROGRAM	DPMD KUTIM	P/D	0813503432246	-	
4	NUR OCTAVIANY	STAF PROGRAM	-	P/D	081257579403	-	
5	JAINUDDIN	KASUBAG KEUMAH	-	P/P	085247473088	-	
6	Idayanti Lilung Suelan.	Staf Umum & Program	-	P/P	0853 8707 2050	-	
7	Latih Alhussaini I. F	Staf Umum & Program	-	P/P	-	-	

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
8	FITRIANSYAH	Kasi Penerimaan Dca ASg PUS	DPMO Kantor Timor	L/P	08125381443	FITRIANSYAH 1909 @ 9.mol.tim	
9	EXSIA MURSMADI	KABID REKRESI	DPMO KUMH	L/P	08247307655	EXSIA.MURSMADI@timor em	
10				L/P			
11				L/P			
12				L/P			
13				L/P			
14				L/P			
15				L/P			
16				L/P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

KUTAI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	F. SGRADIRAHMAN	KORDIS	DPK	L/P	081516228690		
2	Erlinsiana	Kasubag PRK	DPK	L/P	082251084580	erlinsiana@gmail.com	
3	Orlicia	STAF	DPK	L/P	0812 8423 3145		
4	Silvia Lestari	Staf	DPK	L/P	085389087040		
5				L/P			
6				L/P			
7				L/P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

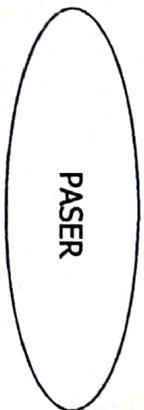
KUTAI
KARTANEGARA

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	DAFIP HARJANTO	KADIS	DPMD	Ⓐ	0811584605	dat.kartanegara@gmail.com	f
2	LILIS SURYANI	Kegubog. Penyus Peng. & Keagr.	DPMD.	Ⓜ	08125845095.		f
3	BURHAKSUDIRKI.SB	KASUBAG. UMUM	-	L/P	08125349575		f
4	SURYA HARMA.	STAF	-	L/P	082150265872	surya.dondokular@gmail.com.	f.
5	Mr. Tasyan Darmas.	Pst Pamban.	-	L/P	08125781720.		f
6	Bayu Santoso.	KASIT. CAGY.	DPMD.	L/P	081376316005		f
7	SURYA ANWARA	KASIBD. FPM	DPMD Kutai	L/P	082449950077		-

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

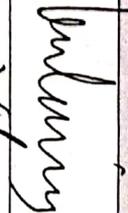


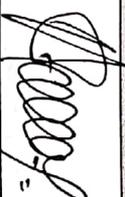
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	HULAIMI	KADIS	DPMD KAB. PASER	L/P	081328984222		
2	NURUL BARIAH	KASUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM	DPMD KAB. PASER	K/P	081346458445	nurulbariah@gmail.com	
3	M. NURRIKUSYAH	KABID.	---	L/P	09524712222		
4	Rizki Rosdiana	STAF	DPMD PASER	L/P	082250067788		
5	SAKELI	SEKELIS	---	L/P	08128403222		
6	ISMALIC		---	L/P	082272603222		
7				L/P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

PENAJAM PASER
 UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Dir. DUL PRISMANA	KADIS	DPMD	♂ / P	0812 5052 9335		
2	Hj. Nurhayati S.Sos.MM	Ket. Sid. Pemas	DPMPD	L / ♂	0813 46 3821 35		
3	SURBANO	Ket. Kab. PPK	DPMD	♂ / P	0813 56 80 9333		
4	Dwiy Sireni	Ket. Kab. Wumu	DPMD	♂ / P	0813 47 520433	dwiy.sireni82@gmail.com	
5	Marsella	staf	DPMD	♂ / P	0813 46282885	relda.yu@gmail.com	
6	ARN. RAHMAN	SAEP	DPMD	♂ / P	0813 50 519020		
7	KADP ROKI	Kepuskep BMD ADM	BPS. PEMERINTAHAN	♂ / P	0811 123452		

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
8	G. ABIMANYU. A. R.	KASI UPTM. SDA PED.	DPM D	L / P	0815 5024 5993.		
9	BARI	Kasi BEU. DAET	DPM D PPU	L / P	082243323003		
10	H. Sudi	Sekutary	DPM D	L / P	0813 46 233 638		
11	Fera.	Pelaksanaan	DPM D	L / P	0812533769889	penderdpmddpu@gmail.com	
12				L / P			
13				L / P			
14				L / P			
15				L / P			
16				L / P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

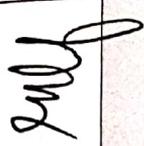
MAHAKAM ULU

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	<i>Su Ricarda</i>	<i>Ketua RW</i>	<i>PPM K</i>	L / P	<i>08124640726</i>	<i>Rurawoegunawati</i>	<i>[Signature]</i>
2				L / P			
3				L / P			
4				L / P			
5				L / P			
6				L / P			
7				L / P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

BERAU

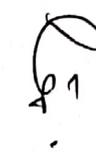
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Mr. H. Iyha Kusir, MH	Kadis	DPML	L / P	081349 784904		
2	Subirwan	KABID PK	DPMK	L / P	0813 4770 8822	Sudirwan@berau-cem	
3	RUSMIATI	Ketubing Peny. Program, ber & ket	DPMK	L / P	0821 5702 5298		
4				L / P			
5				L / P			
6				L / P			
7				L / P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Tempat : Hotel Nivotal Balikpapan

PERANGKAT DAERAH
PROVINSI

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Henyo Santoso	Ketid. SDMP	BAPPEDA	L/P			
2	Andria Asri	Kontrib. kelas	Banyuda	L/P		andriarasri@gmail.com	
3	Fahmi FL	Ketid. ang	Bekas	L/P			
4	Hutayanto	Kontrib. ang	PLKAD	L/P			
5	Syahrir	vario.	Occ. Locatng.	L/P	08125301139		
6	Nurul Hamidah	Ketid. kemis	Din. ko. pro. keti.	L/P	082145891264	gizikahin@gmail.com	
7	Natara Isnaning	Depn. Pramati Ketid.		L/P	08125503386		

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
8	Syamsulhuda	Asisten Administrasi	Arkas Puncak Jaya	L/P	0815575807	Syamsulhuda1717@gmail.com	
9	M. Zain	Staff	—	L/P	081347290008		
10	Mubandura	Staff	Organisasi	L/P	0813472188508		
11	M. Zamrud	Staff	Asisten Staff	L/P	082350292921		
12	Khair Rahman	Staff, PK	BSSDM	L/P	082159470589		
13	Arief Mader	Staff	DPKPP	L/P			
14	Tuti Retnowati	Konvens Pengawas	Disetubud Prop	L/P	08125805837		
15	Karnelina	Pengelola La Kepes Staff UPD/WIT	Staff UPD/PV	L/P	0811592080		
16				L/P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

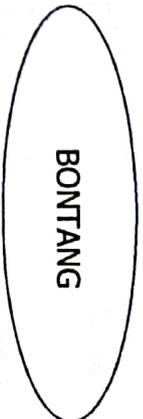
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	drg. Deby E	seketaris DP2PA Smd	DP2PA Smd	L / (P)	081220204850	deby_nisa@gmail.com	
2	Juliana R	kepeng. per	Sekeloa Smd	(L) / P			
3	HSF-1-5	kepeng.	- / -	(L) / P	08154631057K	hysaur14@gmail.com	
4	M. Yawin	staf DP2PA	DP2PA Smd	(L) / P	081346226673		
5	Dardanelia Y.S.	Kasi DP2PA	DP2PA Smd	L / P	082111950685	dardanelia.yusanti@gmail.com	
6				L / P			
7				L / P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan



NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Dra Hj Kartina, MT	Kabag Pemerintahan	Setda Bontang	L/P	082450677091		
2	ARIF S	KASUBAG AOPEM	SETDA BONTANG	L/P	081327341033		
3	RINI WIRAHAYANI	Kasi Bidang Partisipasi Masyarakat	DISPM	L/P	08125316081		
4	Miranti	Staff	DISPM	L/P	082151335532		
5	Juwahidjan	kas PERTE	DISPM	L/P	082148969892		
6	H. Giv A L	Kabid. PM	DISPM	L/P			
7				L/P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan



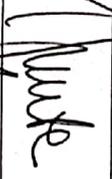
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Ariyasa. Aza. K	Kasubag Bina Man. ke & Kel.	Aza. kota Bpn	L / P	081538297		
2				L / P			
3				L / P			
4				L / P			
5				L / P			
6				L / P			
7				L / P			

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020

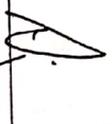
Hari / Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
 Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

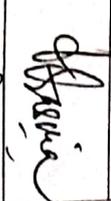
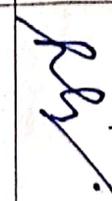
DPM-PD PROVINSI

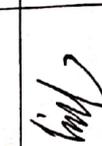
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Mok. Jauhar Pras.	Kepmer	DPDAS Prov	L/P	08155336676	m.jauharpras@dpdprov.jakob.co.id	
2	Suwardo	Sekretaris	DPM-PPD	L/P	0812258169943	0812258169993	
3	Norr Fathma	Kelce	DPKPD	L/P	081346695077		
4	Helvin	KS. PKM	DPMD	L/P	081352573737	helvin@dmwul.co	
5	Maryam			L/P	081250197781		
6	Muswinanda R.			L/P	0855246114220		
7	Ismaeni	Kasi PIDE	PrupP	L/P	085250693941		

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
8	SRI Marnan	staf	DPMPD	L/P	0821-49458769		
9	Abdi G	Staf	DPMPD	B/P	081349041475		
10	ISKANDI TRAKORWATI	KABID III	DPMPD	L/P	08125302231		
11	DVR	Kasi ID		L/P	08125902722		
12	Hikmah Nur Zahra	Pelaksana	DPMPD	L/P	0857 52009009		
13	Esthi. S. Pini	Kasi P&P	DPMPD	L/P	0812 5315 703		
14	Kudus	Adanya keu	"	L/P	08547201492		
15	Dahan	staf Keuangan		L/P	0812 54028961		
16	M. SBT		DPMPD	L/P	0815 20361673		

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
17	Arsana Dhanika P	Chief Relations	Purba	L/P	6812 5814 309		
18	Am. Fausa	Relations		L/P	6813 4728 9236		
19	Muryah	Lead User	DPWPP	L/P	6812 5328 5193		
20	Mawati	Staff User		L/P	6822 5098 0555		
21	Febrie	Staff User		L/P			
22	Rizki Tisnadewi	Ketid POKP	DPWPP-Peru	L/P	0811 5843 093		
23	Ammaranda	Staff	DPWPP-Peru	L/P	0812 4666 9009		
24	Anggr Amelia S	Staff User	DPWPP	L/P	0053 8688 8865		
25	E. Novita F	Staff User		L/P			

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
26	Roqita - A	staf	DPM - Pendas	L / @	0812223127152.		
27	Iada tsabimawati	staf	DPM - Pendas	L / @	0812 5690 0777		
28	Qorri lara fionni	staf	DPM - Pendas	L / @	081253083966		
29	Farida Rizki	Staf	DPM - Pendas	L / @	085328266107		
30	Lelino	staf	DPM - Pendas	D / P			
31	Petha dengari	-	-	D / P	085349850012		
32	Zul Bahmi E.	staf	DPM - Pendas	D / P	081357411381		
33	Rizki Nishti	KAKIP BEM	DPM - Penda	L / @	0812 5861 7736		
34	Pina Fernanda Handayani	Staf Program	DPM - Pendas	L / @	085226278000	Pinfernan@gmail.com	

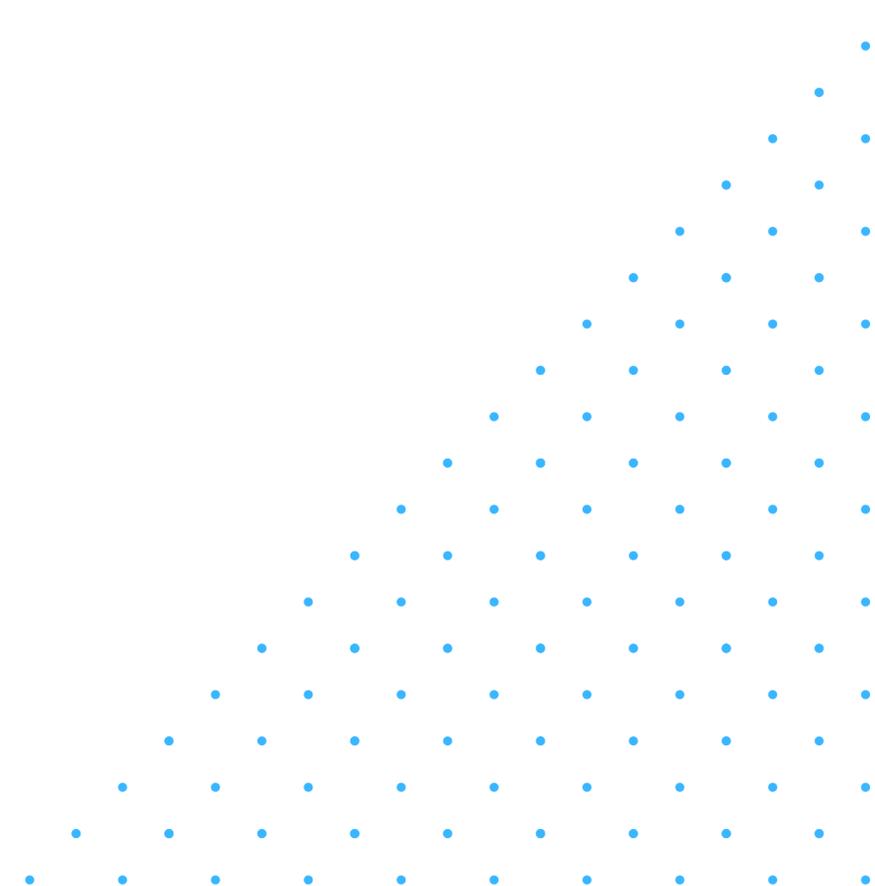
NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
35	Puliso Romanti S	Pelaksana Penerimaan	DPNUPD Prov.	L / ♂	0813 4765 2266		
36	Kusmawati	Kasi KKA	DPNUPD	L / ♀	0813 47200302		
37	Sani Rahman	Walegum	DPNUPD Prov	L / ♂	0812 5374 632		
38	HAPSAT HIRTI	palatsana	DPNUPD prov	L / ♀	0822 99200589		
39	Soesan Soetomo	-	DPNUPD -	♂ / P	0812 5557 7082		
40	ABDUL HAQIL	Staf BDR	DPNUPD - PD	♂ / P	0812 5378 3085		
41	MISTE; Anj	Staf		♂ / P	0852 4733 7708		
42	Anji Kawan	Relaksium	DPNUPD	♂ / P	0852 5052592		
43	Nazly	Manully Program	DPNUPD	L / ♀	0812 567 8267		

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	JENIS KELAMIN	NO. HP	EMAIL	TANDA TANGAN
44	A. Asyiah	Pelaksana	DPM-PD Prov.	T/P	081254137900	kosalmaqyfe@gmail.com	
45	Abdul Mujid	Kecamatan	DPM - PD.	D/P	0812-5393.945		
46	Zakaria	Pelaksana	DPM. PD.	D/P	0813 4718666	-	
47	Ali Jati	Pelaksana	DPM-PP	D/P	0813 4651020		
48	Siti Umaman	Kusabang. Mu	DPM-PD	L/P	08125508893		
49	Palawan	Pelaksana	DPM-PP	D/P	08127328340		
50	Nur Nurhid	Pemeran	DPM - PP	D/P	0823-2040-9991	nurhid77@gmail.com	
51	MITA PRISTYA	Pelaksana	DPM - PD	L/P	0822 4671 6952		
52	N. Nurwan	Pelaksana	DPM - PD	D/P	08125309544		



LAMPIRAN

GALERI KEGIATAN





Suasana Tempat Acara Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 di Hotel Novotel Baliikpapan



Suasana Tempat Acara Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020 di Hotel Novotel Baliikpapan (1)



Buku Kecil untuk peserta Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020



Panitia Depan Acara Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020



Operator dan Notulis Acara Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2020



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta (I)



Round Table untuk para peserta yang disiapkan oleh panitia



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua panitia, peserta dan narasumber



Kepala Dinas dari Kab (dari kiri : Paser, Kutai Barat, PPU, Kukar, dan Berau)



Moderator, Kepala Dinas, serta narasumber menyanyikan lagu Indonesia raya



Pembacaan Doá



Laporan Ketua Panitia



Laporan Ketua Panitia (I)



Sambutan PLt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim



Sambutan PLt. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim (I)



Foto bersama setelah sesi Pertama



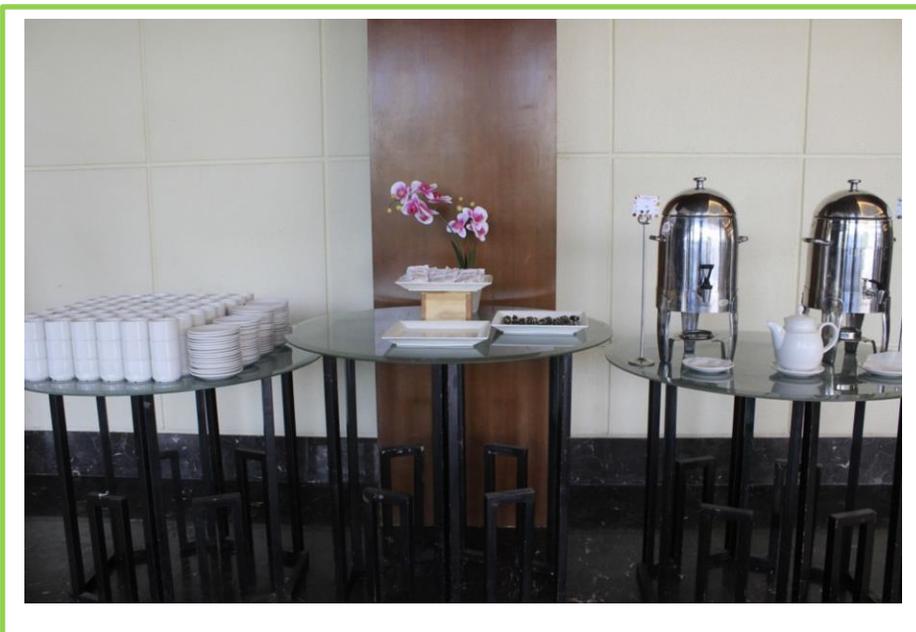
Foto bersama setelah sesi pertama (I)



Snack



Snack (I)



Coffe Break



Menu Makan Siang



Menu Makan Siang (I)



Menu Makan Siang (I)



Narasumber (Kabid Kelembagaan dan Sosbudmasy. DPMPD Prov. Kaltim)



Narasumber (Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Prov. Kaltim)



Narasumber (Kabid.. Kawasan Perdesaan)



Narasumber (Kabis. UEM dan TTG)



Narasumber (Perwakilan BPKAD Setda Prov. Kaltim)



Narasumber (Perwakilan BPKAD Setda Prov. Kaltim)



Sesi Tanya Jawab



Sesi Tanya jawab (I)



Sesi Tanya Jawab (II)



Sesi Tanya Jawab (III)



Kepala Dinas dan 4 Kabid DPMPD Prov. Kaltim

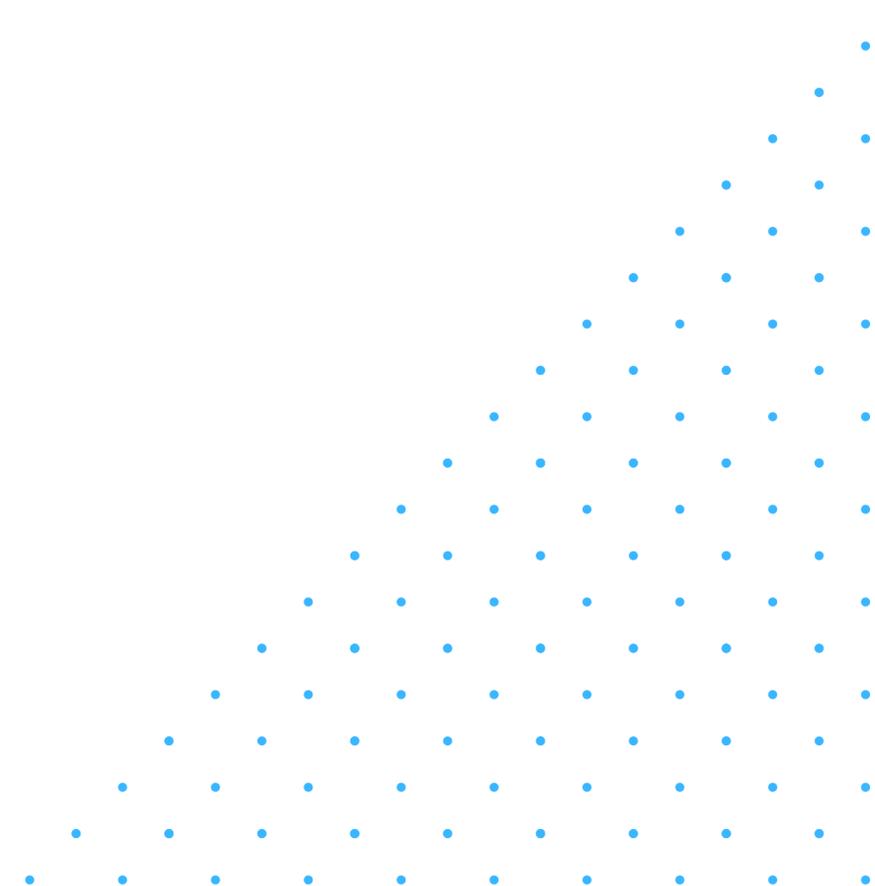


Foto bersama panitia



LAMPIRAN

NOTULENSI





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jl. MT. Haryono No. 96/IV A ■ (0541) 7779725 Fax. 7779726
SAMARINDA 75124

NOTULENSI

Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Waktu : 07.30 WIB – 16.45 WIB
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim
Jumlah Peserta : 125 Orang
Tema Rapat : Sinergitas Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pembahasan Rakor :

Pembukaan

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya (semua peserta dan panitia)
2. Pembacaan Do'a (Oleh Fachroni. S.STP)
3. Sambutan Ketua Panitia Disampaikan oleh Bapak Ir. Surono,. M.Si

Tujuan utama pelaksanaan rakor bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 2020 diakui sebagai ajang menetapkan dan menyepakati target 30 desa sasaran yang akan ditingkatkan statusnya menjadi berkembang pada 2021.

Salah satu tujuan kita berkumpul disini menetapkan desa-desa yang akan ditetapkan menjadi target sasaran peningkatan status desanya dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang.

Dia menilai tepat disepakati dan ditetapkan desa yang menjadi target agar sasaran programnya jelas. Menyasar desa-desa dimaksud agar fokus mendorong memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada indikator-indikator penilaian IDM yang akan didongkrak.

Menurutnya, DPMPD diberikan peranan untuk meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan melalui penetapan target IDM 150 Desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang.

Target tersebut diwujudkan melalui 4 program prioritas, yaitu program pembangunan lembaga ekonomi perdesaan, program pembangunan desa dan kawasan, program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta program kampung iklim target 150 desa.

Kemudian dijabarkan selama lima tahun kedepan yang mulai dari 2019 menyasar 15 desa, 2020 25 Desa, 2021 30 desa, 2022 35 desa, dan 2023 45 desa.

Dengan pelaksanaan rakor diharapkan tercipta sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim, termasuk dalam pencapaian target peningkatan status IDM 2021.

Selain itu, rakor bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendorong dan faktor penghambat untuk dijadikan perbaikan pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, sinergitas rencana program kegiatan Tahun Anggaran 2021 antar provinsi dan kabupaten kota.

Termasuk menyiapkan materi usulan nomenklatur program kegiatan berdasarkan Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, verifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan bagi desa melalui bankeu provinsi.

4. Sambutan Kepala Dinas Sekaligus Membuka Acara

Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Kaltim menunjukkan capaian kinerja cukup memuaskan.

Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi tolok ukur perkembangan status desa Kaltim tahun 2019 mampu menduduki peringkat 19 secara nasional atau 0,62059 poin.

Untuk wilayah Kalimantan, Kaltim unggul di atas Kalbar, Kalteng dan Kaltara yang masing-masing menduduki peringkat 22, 25, dan 28. Meskipun masih di bawah Kalsel yang menempati peringkat 14 secara nasional.

Selain itu, posisi IDM Kaltim juga mampu mengungguli Sumsel, Sulteng, Aceh, dan Sumut.

Menurutnya, kondisi status IDM desa di Kaltim yang masuk kategori mandiri sebanyak 11 Desa atau 2,27 persen, maju sebanyak 107 desa atau 12,72 persen, kategori berkembang sebanyak 415 Desa atau 49,35 persen, desa tertinggal sebanyak 285 desa atau 33,89 persen, dan sangat tertinggal 23 desa atau 2,73 persen dari 841 desa se Kaltim.

Dia berharap capaian tersebut terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tentunya dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan bekerja lebih maksimal lagi, khususnya dari pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk mewujudkan peningkatan Desa Mandiri sehingga pada akhirnya akan terwujud masyarakat Kaltim yang berdaulat.

Pemprov Kaltim sendiri dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 yang dituangkan dalam renstra DPMPD 2019-2023 mematok target meningkatkan status 150 Desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang.

Kepada kabupaten melalui DPMD mari saling bahu-membahu membangun sinergitas dan koordinasi untuk dapat memenuhi target tahunan dan lima tahunan.

Sedangkan terkait rakor dia berharap melalui kegiatan ini dimaksudkan untuk sinkronisasi dan penyelesaian kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pengambilan kebijakan mengenai permasalahan dihadapi sehingga dapat diberikan alternatif solusi pemecahan permasalahan dihadapi dalam bidang pemberian masyarakat dan pemerintahan desa.

Selain itu sebagai upaya mewujudkan harmonisasi dan sinergitas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Kaltim.

Rakor yang dihadiri jajatan DPMPD Kaltim, perwakilan OPD terkait lingkup Kaltim, DPMD Kabupaten se Kaltim dan pelaksanaan urusan bidang pemerintahan kabupaten se Kaltim tersebut menghadirkan narasumber dari BAPPEDA Kaltim dan BPKAD Kaltim.

Acara Inti

5. Presentasi dari Narasumber BAPPEDA Disampaikan oleh Bapak Drs. Hariyo Santoso
JUDUL : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2021
 - Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan).
 - Pada September tahun 2019 Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional
 - Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 5,91% pada tahun September 2019 dengan jumlah 219,92 jiwa penduduk miskin
 - Kemiskinan besar terpusat pada daerah perdesaan, pedalaman, dan daerah terisolir
 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, memiliki target peningkatan status IDM 150 desa/kampung melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang tertuang didalam RPJMD KALTIM TAHUN 2019 – 2023.
 - Pada APBD Provinsi Kaltim Tahun 2020 melalui alokasi belanja **Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota**, telah dialokasikan anggaran untuk desa-desa yang ada di Kalimantan Timur sebesar **:Rp.513,330 Milyar**. Dimana alokasi belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota tersebut masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten/Kota.

- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan seperti : Peningkatan jalan dan jembatan desa, Peningkatan jalan usaha tani, Peningkatan jalan lingkungan desa, Peningkatan jaringan irigasi pertanian, Drainase lingkungan, Semenisasi desa, Pembangunan SPAM air bersih
6. Presentasi dari Narasumber BPKAD disampaikan oleh bapak H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM
- Pergub 21/2018 tentang tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggung jawaban bankeu Pemprov Kaltim.
 - Ruang lingkupnya pemberian belanja bankeu, penyaluran bankeu, pertanggung jawaban dan pelaporan belanja bankeu, monitoring dan pengawasan belanja bankeu, pergeseran belanja bankeu.
 - Pemberian lenja bankeu dilakukan bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan dan mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah serta pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota, dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musrenbang, ditujukan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang program strategis pembangunan daerah maupun nasional, alokasi anggaran harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota, lokasi anggaran tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten/Kota dan diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota.
 - Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan beberapa hal : Untuk Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahap Pertama maksimal sebesar 25% dari nilai kumulatif seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan,
 - Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Spesifik tahap selanjutnya disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 25% dengan menyampaikan laporan F-4, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap kedua disalurkan sebesar 40% setelah realisasi keuangan pada penyaluran Tahap Pertama mencapai 80%, Untuk Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik tahap ketiga disalurkan sebesar 35% setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran Tahap Pertama dan Tahap Kedua mencapai 90%.
 - Pertanggung jawaban dan pelaporan belanja bankeu terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan kepada Gubernur dengan ketentuan : Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, laporan triwulan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Laporan Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana contoh Form F-3 Lampiran III Peraturan Gubernur ini, Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur, Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal tahun anggaran berkenaan
 - Monitoring dan pengawasan belanja bankeu : Monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Keuangan dan terlebih dahulu diberitahukan melalui surat resmi dari Pemerintah Provinsi, pengawasan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, pengawasan peruntukan dan aliran dana dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas perintah Gubernur.

- Pergeseran belanja bankeu : Pergeseran Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan, pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Provinsi melalui Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pergeseran belanja bantuan keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi.
 - Ketentuan lainlain : Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya, terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk program prioritas Kabupaten/Kota.
7. Persentasi dari Kepala DPMPD
- Kebijakan Program DPMPD 2019-2023
 - Pemprov Kaltim sendiri dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 yang dituangkan dalam renatra DPMPD 2019-2023 mematok target meningkatkan status 150 Desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi desa berkembang.
 - Menurutny, kondisi status IDM desa di Kaltim yang masuk kategori mandiri sebanyak 11 Desa atau 2,27 persen, maju sebanyak 107 desa atau 12,72 persen, kategori berkembang sebanyak 415 Desa atau 49,35 persen, desa tertinggal sebanyak 285 desa atau 33,89 persen, dan sangat tertinggal 23 desa atau 2,73 persen dari 841 desa se Kaltim.

Tanya Jawab

- Dul Azis PPU : Dorong Provinsi segera realisasikan bantuan keuangan provinsi sebab dulu pernah ada pada 2015, tapi banyak yang tidak merasakan.
- Sudirman Berau : Tidak sepakat jika dikatakan Dana Desa banyak tapi masih banyak penduduk miskin. Sebab Dana Desa tidak fokus tangani Dana Desa. Dan auntuk sekoor pemebrdayan masyarakat tapi juga ada untuk pembangunan infrastuktur.
- Desi Kota Samarinda : Bidang pemerintahan masil nempel di Dinas Pemberdayaan Perempuan, kedepan sudah pisah.
- Suryati Dinas Pangan : salah satu prgram prioritas pemerintah kmando strategi pertanian (kosntratani) dipimpin camat Bisa diamnafatakn DPMPD untuk kembangkjan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
- DLH : Senang salah satu dari empat proogram prioritas proklam. Melalui proklam mampu menurunkan emisi menunkan 16 drajat dari target nasional. Mari bersama. Ecara nasional sampai 2030 ada 6b porgam kampung iklim kaltim sebagian 200 kampungh iklim diharap tdk sekedar dicangkan tpi disertifikasi ada legalitas kementerian. Pencapaiannya kemungkinan besar ada FCPF 1550 desa. DLH ada 45 lokasi pembinaan.

Tanggapan Kepala DPMPD Kaltim (Moh Jauhar Efendi) : berbicara masaah kesehatan kedepan pemerintah harusnya tidak membedakan lokasi tempat tinggal dan status soosial masyarakat.

Indek Ketahan Sosia, Indeks Ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan. Perlu dibedah mana yang masih rendah itu yang disasar. Banyak indikatrynya.

Bankeu sesua arahan Gubernur kaltim diarahkan membuat formulasi yang berbeda peruntukan dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Diarahkan lebih untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Ishoma

8. Sesi Rapat Koordinasi Teknis

Pemaparan dari masing masing bidang (isi paparan) (dipandu oleh sekretaris)

Moderator Surono : Evaluasi Program Kegiatan 2019 terkait faktor pendukung dan faktor penghambat Mohon respon kabupaten kota terhadap paparan narasumber

Pemateri

Kabid I (Noor Fathoni): Rapat mengkoordinasikan prgram kegiatan agar sinergis. Evaluasi program kegiatan 2019 bidang I ada satu program dan kegiatan-egiatan mengatasi

Program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa : 1. pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, 2 Monitoring penyaluran Dana Desa, 3. Pentaan adminsitasi desa (Lomba desa).

Rencana kerja TA 2020 program dan kegiatan sama dengan 2019 Bedanya di sub kegiatan, yakni peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kapasitas BPD. Pelatihan Siskeudes bagi KAUR Keuangan.

Rencana kerja 2021 mengacu Permendagri 90/2019. Mencoba mengusulkan program kegiatan yang menjadi tupoksi bidang pemerintahan desa.

Kabid II (Riani Tisnadewi): Paling utama soal pendamping desa yang sampai sekarang tidak selesai pemenuhan kuotanya hingga saat ini. Kurang 46 dari 478 kuota yang terisi hanya 32. Terus meningkatkan peran meningkatkan peran pendamping tenaga pendamping profesional. PR bagi provinsi yang pintar pendampingnya. Desa selalu didampingi.

Dalam pendampingan pendamping masih dihadapkan beberapa tantangan seperti tidak diokasi kegiatan, melaksanakan tugas tidak sesuai SOP, honorarium kurang, letak geografis yang terbilang sulit dijangkau.

Bursa inoovasi Desa diharap memberikan dampak dalam proses penyaluran dan penggunaan Dana desa kedepan. Sebab tahun 2020 sudah tidak ada. Ini program bersumber dari Loan.

Kabid III (Isnaini Trikorawati) : Bersyukur perjuangkan bankeu provinsi yang fokus pengembangan LKD sebagai mitra pemerintah.

Kinerja pelayana ada tiga Pembinaan dan fasilias pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan lembaga adat desa, pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat, pembinaan dan fasilitasi pengembangan ketahanan sosbudmasy.

Permasalahan pembangunan desa diantaranya belum dimanfaatkannya LKD sebagai mitra pembangunan. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa juga belum dilirik malah memanfaatkan peran tenaga pendamping profesional, kurang koordinasi.

Evaluasi 2019 lomba Posyandu diikuti 9 kabupatenkota dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. Keterbatasan anggaran memengaruhi besaran nominal hadiah karena peaksanaan diakhir tahun anggaran sehingga tahapannya tidak sesuai petunjuk. Diminta kabupaten kota antisipasi setidaknya dilaksanakan Juni.

BBGRM target 10 yang ikut hanya 5. Karena terbentur hadiah terbilang kecil bahkan tidak ada, sehingga tidak semangat. 2021 akan dianggarkan.

PPU dan Kubar lokus stunting nasional.

Rencana kerja Th 2020. Program sudah menggunakan nomenklatur permendagri 90/2019.

Rebug stunting akan dilaksanakan Thn 2020 dan Th 2021. Anggarankan Rp1 Milyar 2021 untuk peningkatan kapasitas LKD dan KPMD seiring surat edaran Mendagri terkait kewajiban memberikan anggaran peningkatan kapasitas LKD dan KPMD. Tugas kabupaten dorong desa bentuk LKD dan desa alokasikan anggarannya, serta kabupaten juga menganggarkan.

Kabid IV (Rusniati):

Tahun 2019 sudah melaksanakan lomba BUMDes.

Program dan kegiatan TA 2020 Rapat Kerja Teknis BUMDes, pelatihan pengelolaan BUMDes dll. Gelar TTG Tingkat Provinsi di baikpapan dan nasional di Jawa Barat. Akan buat surat edaran terkait program pendampingan kegiatan Pamsimas kabupaten kota.

Hasil Keputusan Rakor :

Lampiran keputusan Berita Acara yang ditanda tangini oleh seluruh DPMPD Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Timur

Pimpinan Rapat,



Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
NIP. 19611216 198603 1 014

Notulis,

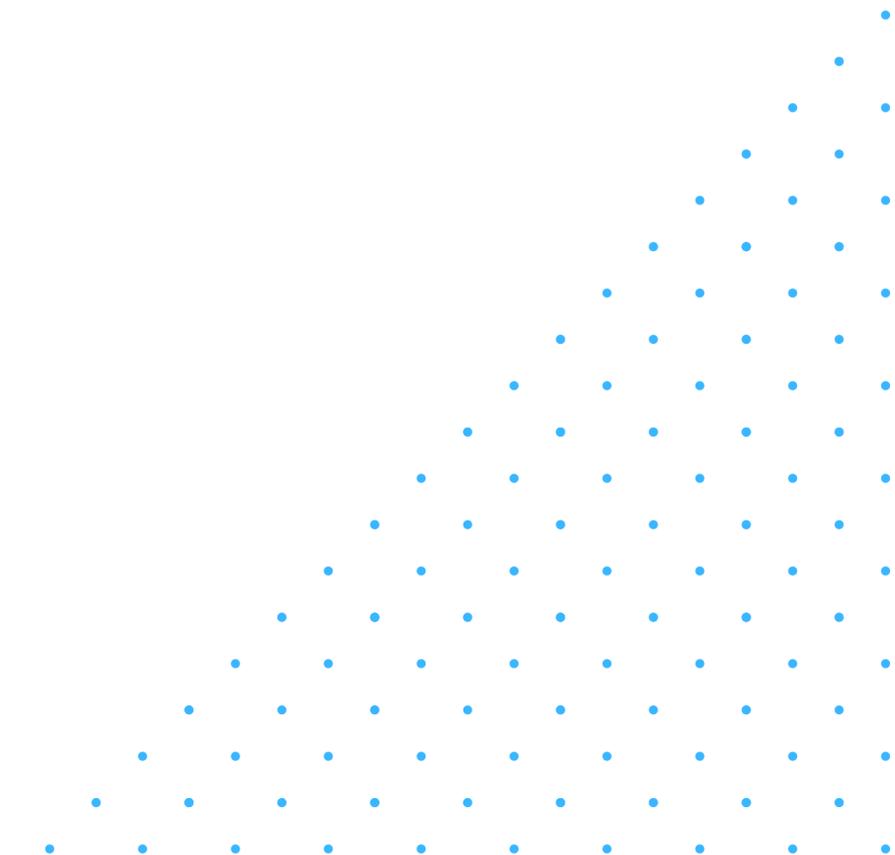


Fachroni. S.STP
NIP. 1990314 201406 1 001



LAMPIRAN

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini, **Senin tanggal Sepuluh bulan Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, beberapa Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung atau Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur (*sesuai daftar hadir terlampir*)

Setelah mendengar, memperhatikan dan membahas :

1. Paparan Narasumber dari Bappeda, BPKAD dan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Paparan Kepala Bidang tentang Program/Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2021
3. Masukan dan tanggapan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Masukan dan tanggapan dari DPMPD/K Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
5. Hasil Pembahasan terhadap Permasalahan dan Isu Strategis Program/Kegiatan Prioritas Bidang PMD dalam pencapaian target meningkatkan IDM 150 desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal

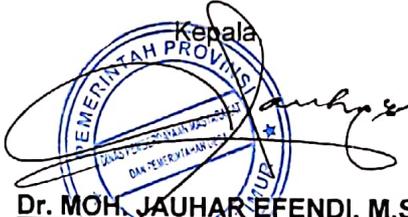
MENYEPAKATI :

- Pertama** : Mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2019 – 2023 dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu meningkatkan IDM terhadap 150 desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal se Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023
- Kedua** : Mendukung desa-desa yang akan menjadi lokus pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Bidang PMD, yaitu 25 desa pada tahun 2020 dan 30 desa pada tahun 2021.
- Ketiga** : Mensinergikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2021 pada OPD terkait dan Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian target Misi Kedua RPJMD Bidang PMD
- Keempat** : Rancangan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai usulan terhadap penyempurnaan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

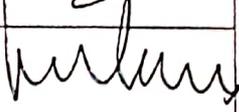
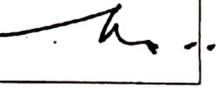
- Kelima : Menggali potensi sumber-sumber pendapatan Desa sesuai Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- Keenam : Komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan keuangan kepada Desa mulai Tahun 2021 dan seterusnya
- Ketujuh : Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dikhususkan bagi Kelurahan
- Kedelapan : Melakukan Studi Komparasi Bidang PMD ke Daerah yang dianggap berhasil.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan masukan pada penyempurnaan Rancangan Awal RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

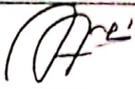
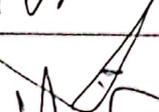
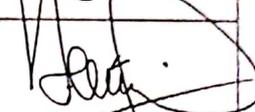
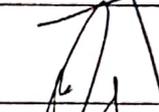
Balikpapan, 10 Februari 2020

Kepala

Dr. MOH. JAUHAR EFENDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

DPMPD KABUPATEN/KOTA :

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Tandatangan
1	Ilyas	DPMK BERAU	
2	DAFIP HARYANTO	DPMPD KURAR	
3	DUL AZIS	DPMPD PPV	
4	Rahmat Rosadi	DPMPD KUTIMA	
5	Hulamin	DPMPD PASIR	
6	T. SYAIDIRAHMAN	DPMK KURAR	
7	Suriand	DPMPK Mahulu	
8	DEAST EURIYANI	DP2PA Samarinds	
9	ARIF SUPRIYADI	Bagian Pemerintahan Bontang	
10	Arifudin Ardi. k	Bagian Pemerintahan Balikpapan	

PROVINSI :

NO	Nama	Lembaga/Instansi	Tandatangan
1	NURUL WAHABAH	DINKES PROV.	
2	NAHA	DPMPD PROV	
3	Rizau Tiswaden	DPMPD - Provinsi	
4	RUSLIATI	DPMPD - provinsi	
5	Nora Fathoni	DPMPD Prov. Kalimantan	
6			
7			
8			
9			
10			